



# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



## Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti



## Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan



## Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik



## Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif



## Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara



## Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif



## Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

Versi Digital



[kominfo/LKJKOMINFO2022](http://kominfo/LKJKOMINFO2022)

Pelajari Laporan Kinerja Kominfo Tahun 2022 selengkapnya pada versi digital dengan cara memindai QR Code di atas.

## Daftar Isi

Daftar Tabel	3
Daftar Grafik	5
Daftar Gambar	7
Kata Pengantar	11
Ringkasan Eksekutif	17

## 01

**Pendahuluan 25**

Latar Belakang	27
Maksud dan Tujuan	35
Permasalahan Strategis & Kebijakan	36
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	59
Komposisi Pegawai	63
Sistematika Pelaporan	65

## 02

**Perencanaan Kerja 67**

RPJMN Tahun 2020—2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024	69	Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2022	97
RKP Tahun 2022 dengan Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2022	78	Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2022	103
Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024	80	<i>Timeline Refocussing Anggaran</i>	105
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	91	Proyek Kementerian Kominfo yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2022	107
Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022	92	Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023	113
		Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2023	119

## 03

**Akuntabilitas Kinerja 121**

Capaian Kinerja Organisasi	123
Kinerja Lainnya	209
Realisasi Anggaran	221
Penghargaan	225

## 04

**Penutup 227**

<b>Lampiran 233</b>	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022	233
Lampiran 2. Hasil Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektorat Jenderal	235

## Daftar Tabel

1. 1	Gambaran Kondisi Capaian Tahun 2021, Kondisi yang Diinginkan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	53	3. 18	Progres Migrasi Siaran TV Analog ke Digital berdasarkan	164
1. 2	Izin Penggunaan Dana PNBK pada Kementerian Kominfo 2021-2024	57	3. 19	Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital	165
2. 1	Dukungan Kementerian Kominfo dalam RPJMN yang Dituangkan Dalam Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024	75	3. 20	Target Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital pada RPJMN, RENSTRA, dan PK	166
2. 2	Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Kominfo tahun 2020-2024	80	3. 21	Data Pemantauan Harga Set Top Box tahun 2022	169
2. 3	Sasaran Strategis Kementerian Kominfo 2020—2024	87	3. 22	Capaian Dukungan Infrastruktur Penyiaran Digital	175
2. 4	Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022	91	3. 23	Target Dukungan Infrastruktur Penyiaran Digital pada PK, RENSTRA, dan RPJMN	175
2. 5	Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo 2022	101	3. 24	Capaian Distribusi STB bagi Rumah Tangga Miskin	176
2. 6	Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo 2023	117	3. 25	Target Distribusi STB bagi Rumah Tangga Miskin pada PK, RENSTRA, dan RPJMN	176
3. 1	Capaian IKSS Kementerian Kominfo Tahun 2020—2022	123	3. 26	Meningkatnya Pemahaman, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital	179
3. 2	Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	129	3. 27	Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK	181
3. 3	Capaian Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G	131	3. 28	Target Literasi Digital pada RPJMN, RENSTRA, dan PK	181
3. 4	Target Penyediaan Layanan Mobile Broadband 4G pada RPJMN, RENSTRA dan PK	132	3. 29	Capaian SDM mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	188
3. 5	Penyediaan Akses Mobile broadband 4G di Wilayah Non 3T	134	3. 30	Target SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TIK pada RPJMN, RENSTRA, dan PK	188
3. 6	Capaian Progres Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio	140	3. 31	Jenis/Akademi Pelatihan Program	190
3. 7	Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio pada RPJMN, RENSTRA, dan PK	140	3. 32	Capaian Target Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Digital	191
3. 8	Capaian Progres Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1	145	3. 33	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	194
3. 9	Target Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1 pada RPJMN, RENSTRA, dan PK	146	3. 34	Capaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	200
3. 10	Capaian Penyediaan Sewa Kapasitas Satelit	148	3. 35	Target Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah pada RPJMN, RENSTRA, dan PK	200
3. 11	Target Penyediaan Kapasitas Satelit pada RPJMN, RENSTRA, dan PK	148	3. 36	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	202
3. 12	Capaian Penyediaan Akses Internet	149	3. 37	Indeks RB Kementerian Kominfo Tahun 2022	205
3. 13	Target Penyediaan Akses Internet pada RPJMN, RENSTRA, dan PK	150	3. 38	Kategori dan Predikat Nilai RB	205
3. 14	Capaian Utilisasi Palapa Ring	155	3. 39	Startup Digital Aktif	214
3. 15	Target Utilisasi Palapa Ring pada RPJMN, RENSTRA, dan PK	155	3. 40	Realisasi Anggaran Tahun 2022 per Eselon I	215
3. 16	Jangkauan Infrastruktur Serat Optik Broadband pada Kecamatan	157			
3. 17	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	162			

## Daftar Grafik

1. 1	Anggaran Kementerian Kominfo 2020 - 2022	56
1. 2	Komposisi Pegawai berdasarkan Unit Kerja (per 31 Desember 2022)	63
1. 3	Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang PNS Kementerian Kominfo (per 31 Desember 2022)	64
1. 4	Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan (per 31 Desember 2022)	64
3. 1	Penyediaan Akses <i>Mobile Broadband</i> 4G di Wilayah 3T	133
3. 2	Tren Ketersediaan ODP pada Kecamatan di Indonesia	158
3. 3	Indeks Literasi Digital berdasarkan Segmentasi Masyarakat	184
3. 4	Indeks Literasi Digital berdasarkan Wilayah	184
3. 5	10 Daerah dengan Indeks Literasi Digital Tertinggi	185
3. 6	Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Pilar	186
3. 7	Perbandingan Indeks-Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2021 - 2022	186
3. 8	Saluran Informasi yang Tersedia di Domisili Responden (%)	198
3. 9	Awareness Isu Prioritas Nasional (%)	198
3. 10	Statistik Penanganan Konten pada Situs Tahun 2022	209
3. 11	Statistik Penanganan Konten pada Media Sosial s.d Tahun 2022	210
3. 12	Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2019—2022	221
3. 13	Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019—2022 Berdasarkan Jenis Belanja	222
3. 14	Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022 berdasarkan Sumber Dana	222
3. 15	Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022 per Eselon I	223



## Daftar Gambar

1. 1	Lima Langkah Percepatan Transformasi Digital	31	3. 10	Bantuan Penyediaan Alat Bantu Siaran Set Top Box untuk Rumah Tangga Miskin	177
2. 1	Visi dan Misi Presiden	70	3. 11	Kerangka Kurikulum dan Program Literasi Digital	182
2. 2	Persetujuan Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024	72	3. 12	Indeks Literasi Digital Provinsi DI Yogyakarta	185
2. 3	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kominfo 2020—2024	73	3. 13	Produk Informasi dan Jejaring Komunikasi Publik	195
2. 4	Alur Perencanaan dan Penganggaran	79	3. 14	Tema Program Prioritas Komunikasi Publik	196
2. 5	Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional	82	3. 15	Bisnis Proses GPR	196
2. 6	Kerangka Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024	83	3. 16	Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik	197
2. 7	Peta Strategi Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024	90	3. 17	Kendala Dalam Mengakses Informasi	201
2. 8	Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 2	92	3. 18	Statistik Penanganan Konten pada Media Sosial Tahun 2022	210
2. 9	Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 3	92	3. 19	Statistik Penanganan Konten Pada Situs Kumulatif s.d Tahun 2022	210
2. 10	Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 5	93	3. 20	Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dan Menkominfo saat pengesahan RUU PDP dalam rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kominfo, Kemendagri, serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), 7 September 2022	213
2. 11	Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 7	95	3. 21	Rapat Paripurna RUU PDP di Gedung Nusantara II DPR RI pada 20 September 2022 (Hal 213)	213
2. 12	Alokasi Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2022	103			
2. 13	Linimasa <i>Refocussing</i> Anggaran Kementerian Kominfo TA 2022	105			
2. 14	Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 2	108			
2. 15	Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 3	108			
2. 16	Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 5	109			
2. 17	Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 7	111			
2. 18	Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2023	119			
3. 1	Sebaran BTS On Air di Wilayah 3T dan Non 3T tahun 2015—2022	137			
3. 2	Rencana Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1	144			
3. 3	Linimasa Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1	146			
3. 4	Peta Palapa Ring	153			
3. 5	4 Pilar Persiapan Pelaksanaan <i>Analog Switch Off</i> (ASO)	163			
3. 6	<i>Dashboard</i> Simulasi Pemancar Televisi Digital	165			
3. 7	Wilayah Siaran Sudah ASO	167			
3. 8	Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran Televisi Terrestrial di Dunia	168			
3. 9	Lokasi Dukungan Infrastruktur Penyiaran Digital	173			





“Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan lompatan besar inovatif melalui akselerasi transformasi digital Indonesia. Agenda transformatif ini tidak hanya ditujukan agar sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran Indonesia dapat semakin maju, tetapi juga untuk mendorong perluasan akses dan kebermanfaatan teknologi digital agar dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.”



**Johnny G. Plate**

Menteri Komunikasi dan Informatika

## Kata Pengantar

# “Akselerasi Transformasi Digital Menjadi Kunci Peningkatan Potensi Daya Saing Global, dan Pembangunan Jangka Panjang”

Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menjadi salah satu perhatian khusus dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah di tahun 2022. Percepatan transformasi digital pasca pandemi memegang peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan produktivitas bisnis melalui digitalisasi, mendorong produksi barang dan jasa yang kompetitif melalui adopsi teknologi, serta memfasilitasi penciptaan lapangan kerja baru.

Sementara untuk mendukung reformasi struktural, Kementerian Kominfo melaksanakan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik agar lebih efektif dan efisien. Melalui penataan birokrasi, Pemerintah menargetkan setiap aparatur menjadi semakin profesional, berintegritas, dan makin mengutamakan kepuasan pelayanan masyarakat. Di samping itu, reformasi struktural secara besar-besaran juga sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Cipta Kerja. Presiden telah menekankan agar semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus sinergis dalam melaksanakan dan memanfaatkan reformasi struktural ini.

Kementerian Kominfo terus berupaya untuk memastikan ketercapaian target pembangunan nasional dalam lingkup tanggung jawab Kementerian Kominfo, yang berfokus pada upaya percepatan transformasi digital nasional meliputi pembangunan infrastruktur digital, digitalisasi pemerintahan, mengembangkan ekonomi digital, serta mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat, termasuk melakukan pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Pada saat bersamaan dengan pembangunan infrastruktur, Kementerian Kominfo bersama Kementerian/Lembaga lain, serta seluruh *stakeholder* juga menjaga keseimbangan ekonomi nasional dengan mendukung kebijakan terkait perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Berbagai upaya tersebut telah mendukung Indonesia dalam menjaga resiliensi di tengah dinamika global yang sedang mengalami tekanan ekonomi global.

Dari sisi tata kelola dan layanan publik, Kementerian Kominfo terus meningkatkan kualitasnya dengan menjaga nilai evaluasi reformasi birokrasi, implementasi penerapan manajemen kinerja, serta akuntabilitas pelaporan. Melalui kepemimpinan Presiden Joko Widodo, birokrasi selama pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan dengan cepat dan berani dalam mengambil keputusan, serta melakukan terobosan yang di luar kebiasaan sehingga memberikan manfaat dan hasil bagi rakyat. Hal ini merupakan salah satu capaian reformasi birokrasi dengan Kementerian Kominfo memiliki peran strategis di dalamnya yaitu sebagai penghantar bangsa dan rakyat Indonesia memasuki era baru yaitu bermigrasi ke era transformasi digital.

Seiring dengan terkendalanya pandemi COVID-19, berbagai risiko dan tantangan global juga terus meningkat dan memicu pelambatan pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut terkait dengan *The Perfect Storm* atau 5C yakni COVID-19, *Conflict*, *Climate Change*, *Commodity Price*, serta *Cost of Living*. Dinamika geostrategis dunia yang berdampak pada *supply chain* dunia dan memicu kesulitan baru. Namun, Indonesia sudah memiliki modal dasar melalui pengalaman Indonesia yang cukup baik dalam menghadapi situasi pandemi dan mempunyai kekuatan yang luar biasa yang diwariskan dari nenek moyang kita yaitu kegotongroyongan, kolaborasi, kerja bersama dan koordinasi.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak negatif pada perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya UMKM, melainkan ada sisi lain yang berkaitan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Sisi lainnya adalah pandemi COVID-19 mendorong akselerasi transformasi digital masuk era baru, era *digital society*, tentu infrastruktur digital menjadi fondasi utama. Kementerian Kominfo terus berupaya mengembangkan infrastruktur untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, meliputi pembangunan *last mile* untuk mengkoneksikan lebih dari 12.500 desa, hingga lokasi-lokasi layanan publik yang belum memiliki kualitas jaringan internet yang bagus dan terjangkau.

Sehubungan dengan pemerintahan digital, pemerintah telah memulai pembangunan Pusat Data Nasional yang pertama di Kawasan Delta Mas, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya secara bertahap akan disusul dengan membangun tiga pusat data lainnya yakni di Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau, Ibu Kota Negara (IKN) baru di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan pusat data pemerintah ini untuk mendorong efisiensi, efektivitas, kedaulatan data negara, dan konsolidasi data nasional dalam inisiatif Satu Data Indonesia. Tersedianya pusat data menjadi penting karena manajemen data pemerintah merupakan kunci untuk mengembangkan transformasi masyarakat menjadi masyarakat digital.

Menyangkut ekonomi digital, Kementerian Kominfo mendorong generasi muda yang ingin mendirikan startup melalui berbagai program seperti Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital, Startup Studio, HUB.ID, dan IGDIX. Berbagai program tersebut disediakan bagi seluruh rakyat Indonesia secara cuma-cuma untuk mendukung ekosistem digital.

Lebih lanjut yaitu terkait masyarakat digital, Kementerian Kominfo mendorong masyarakat untuk membekali diri dengan berbagai *skill set* yang semakin dibutuhkan di era transformasi digital. Kebutuhan kecakapan digital di masa depan akan berfokus pada 4 hal yang dikenal sebagai ABCD yakni *Artificial Intelligence*, *Bitcoin*, *Cloud Computing*, dan *Data Analytics*.

ABCD semakin dibutuhkan sekarang untuk semua orang selain disiplin ilmu yang didapatkan dari perguruan tinggi. Selain menguasai ABCD, yang merupakan keterampilan teknis atau *hard skill*, talenta digital Indonesia diharapkan juga cakap dalam keterampilan nonteknis atau *soft skill* yang dikenal dengan 4C's yaitu *Complex Problem Solving*, *Critical Thinking*, *Creativity*, dan *Communication*. Keterampilan *soft skill* dibutuhkan untuk melengkapi *hard skill*. Kombinasi antara *hard skill* dan *soft skill* merupakan keterampilan yang dibutuhkan di saat ini dan masa depan.

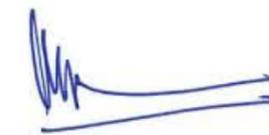
Tahun 2022, Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah Presidensi G20, peluang ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kebangkitan ekonomi nasional serta mendorong pemulihan ekonomi global. Salah satu bagian dari Presidensi G20 adalah pertemuan *Digital Economy Working Group* (DEWG) yang membahas pemanfaatan kekuatan teknologi digital untuk mencapai pemulihan bersama yang lebih kuat, secara inklusif dan berkelanjutan dari dampak pandemi COVID-19. Rangkaian pertemuan *Digital Economy Working Group* (DEWG) dan *Digital Economy Ministers' Meeting* (DEMM) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2022 telah berhasil dilaksanakan dengan dihadiri secara luring dan daring oleh lebih dari 600 delegasi dari negara anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional.

Pertemuan DEWG dan DEMM menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam *Chair's Summary*, di mana anggota G20 menyepakati untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi digital untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

Anggota G20 juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan bagi kelompok rentan, dan mengatasi berbagai macam tantangan digital seperti kesenjangan digital, penyalahgunaan teknologi, kurangnya literasi dan kecakapan digital, dan batasan terhadap optimalisasi penggunaan data.

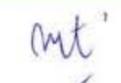
Melalui berbagai upaya dan kolaborasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022 untuk memastikan pencapaian target pembangunan nasional khususnya untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo mengapresiasi seluruh *stakeholder*, Kementerian/Lembaga/Daerah yang telah bekerja sama dengan baik, maupun masyarakat yang berinteraksi dengan Kementerian Kominfo. Kami berharap agar kerjasama yang baik selama ini dapat kita teruskan, kami akan selalu meningkatkan kualitas layanan agar lebih baik lagi. Tentunya kerjasama yang baik akan mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam perbaikan birokrasi dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kementerian Kominfo, serta dapat menjadi pengalaman berharga bagi generasi mendatang tentang bagaimana upaya Kementerian Kominfo mampu mendorong pemulihan ekonomi di era transformasi digital.

Jakarta, 17 Maret 2023



**Johnny G. Plate**

Menteri Komunikasi dan Informatika

Sekjen	Plt. Irjen	Dirjen SDPPI	Plt. Dirjen PPI	Dirjen APTIKA	Dirjen IKP	Kepala Badan Litbang SDM	Plt. Dirut BAKTI
		Digitally signed by Ismail	Digitally signed by Ismail				

# Ringkasan Eksekutif

RE

Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019—2024, Kementerian Kominfo selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, memiliki peran strategis dalam implementasi pelaksanaan transformasi digital nasional.

Peran tersebut menjadi fokus Kementerian Kominfo yang diarahkan ke dalam 3 (tiga) tujuan utama yang telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Kominfo tahun 2020-2024, yaitu meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital di 3 (tiga) aspek, yaitu bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, serta memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Melalui Rencana Strategis Tahun 2020—2024, Kementerian Kominfo telah menyiapkan arah kebijakan yang berfokus pada pelaksanaan transformasi digital melalui perluasan cakupan akses infrastruktur digital, penguatan adopsi teknologi, peningkatan talenta digital, dan penyelesaian regulasi pendukung.

Tahun 2022, merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra. Setiap tahunnya, perencanaan strategis tersebut dituangkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kominfo, yang di dalamnya memuat kinerja, *outcome*, *output*, dan kebutuhan anggarannya.



Kementerian Kominfo menetapkan target penyelesaian yang lebih agresif dalam implementasi program-program yang direncanakan sepanjang tahun 2022. Hal ini diupayakan agar masyarakat luas segera mendapatkan konektivitas yang dibutuhkan, dan mendorong percepatan penyediaan ekosistem digital bagi berbagai sektor ekonomi.

Kementerian Kominfo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp26.671 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 11%. Di mana dari keseluruhan pagu, sebesar 72% diperuntukkan dalam rangka ketercapaian program Penyediaan Infrastruktur TIK yang bertujuan untuk menyediakan konektivitas internet *broadband* cepat dan terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, dan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat. Proporsi anggaran sisanya dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan ekosistem digital nasional, termasuk yang mendukung pemerintah digital, ekonomi digital, dan Sumber Daya Manusia (SDM) digital.

Dalam pelaksanaan program dan kinerja tahun 2022, terjadi dinamika yang menjadi tantangan bagi Kementerian Kominfo untuk tetap *on track* dengan target dan rencana kinerja yang sudah disusun. Tantangan tersebut di antaranya adalah mulai dari ketersediaan, pemerataan dan kualitas infrastruktur TIK baik bagi masyarakat maupun pemerintahan, pemenuhan SDM talenta digital, hingga meningkatnya risiko keamanan siber karena peningkatan arus data yang eksponensial. Dalam menyikapi tantangan-tantangan yang ada, Kementerian Kominfo terus melakukan berbagai upaya melalui lima program yang saling bersinkronisasi yang diharapkan dapat menghadapi dan menyelesaikan semua tantangan yang ada. Program – program tersebut adalah Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Program Komunikasi Publik, dan Program Dukungan Manajemen.

Kemudian dengan adanya situasi keuangan negara yang sedang mengalami pengetatan mendorong Kementerian Kominfo mengambil kebijakan realokasi anggaran untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan berdampak juga kepada anggaran Kementerian Kominfo. Sepanjang tahun 2022, terjadi setidaknya 8 (delapan) kali *refocusing*, realokasi, dan penghematan belanja pada pagu alokasi anggaran Kementerian Kominfo tahun 2022, yang tentu mempengaruhi pergerakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Kominfo. Namun demikian, seluruh unit kerja Kementerian Kominfo tetap berupaya agar program dan kebijakan, terutama yang menjadi prioritas nasional dan berdampak penting bagi masyarakat, dapat terus berjalan dan target tercapai.

Terlepas adanya berbagai dinamika yang mempengaruhi pelaksanaan rencana program dan kinerja, secara umum Kementerian Kominfo dapat memberikan *deliverables* yang baik pada program-program prioritasnya. Pada Program penyediaan Infrastruktur TIK, sebanyak 15.395 lokasi layanan publik berhasil disediakan akses internet, seperti sekolah, kantor-kantor pemerintahan, termasuk fasilitas layanan kesehatan yang sangat penting untuk mendapat akses pada masa pandemi seperti ini. Kementerian Kominfo juga telah menyediakan akses 4G di 5.410 desa/kelurahan di wilayah 3T, dan di 2.786 desa/kelurahan di wilayah non-3T yang dilakukan oleh operator seluler.

Pada Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Kementerian Kominfo telah melakukan *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio, di antaranya untuk optimalisasi kualitas layanan jaringan 4G maupun pengembangan jaringan 5G, serta erat kaitannya dengan *Analog Switch Off* (ASO). Rencana penggelaran frekuensi 700 MHz untuk keperluan jaringan 5G yang sedianya digelar di tahun 2022, dilanjutkan ke tahun 2023, karena menyesuaikan proses penyelesaian penghentian siaran televisi analog yang masih berjalan. Namun demikian, layanan komersial 5G tetap dapat dinikmati masyarakat. Sejalan dengan proses ASO, juga dilakukan peningkatan jangkauan layanan siaran TV digital yang telah mencapai 76,44% populasi terjangkau.

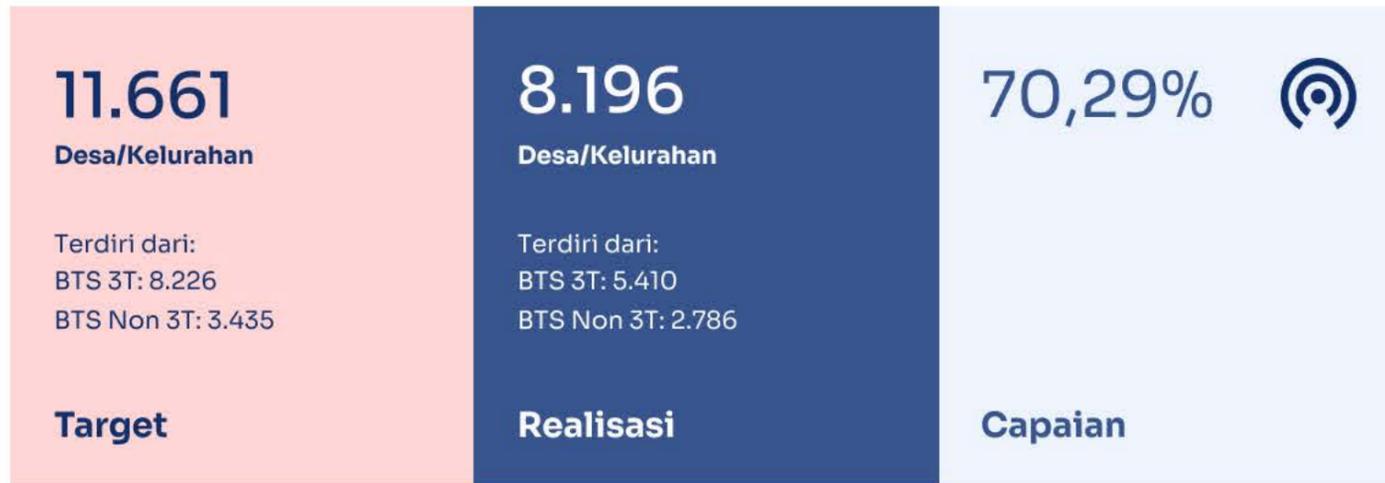
Selain itu, untuk program yang ditujukan pada pengembangan kompetensi SDM digital nasional, Kementerian Kominfo telah memberikan pelatihan Digital Talent Scholarship kepada sebanyak 245.224 SDM talenta digital. Selain itu, sebanyak 5.879.720 orang dari seluruh wilayah Indonesia mendapatkan pelatihan digital tingkat dasar meliputi kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.

Pada Program Komunikasi Publik, survei kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa 79,45% masyarakat puas terhadap akses dan kualitas konten informasi yang didiseminasi oleh Kementerian Kominfo. Informasi publik yang didiseminasi antara lain berupa kebijakan dan program pemerintah, *event* internasional dan nasional, seperti komunikasi publik *event* internasional dan program nasional, informasi program-program prioritas pemerintah di bidang POLHUKAM, bidang Perekonomian dan Maritim, serta bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Secara rinci, capaian kinerja Kementerian Kominfo tahun 2022 dapat dilihat pada halaman berikutnya.



## SS.1 Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau

Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G (kumulatif)



## SS.2 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital

Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital

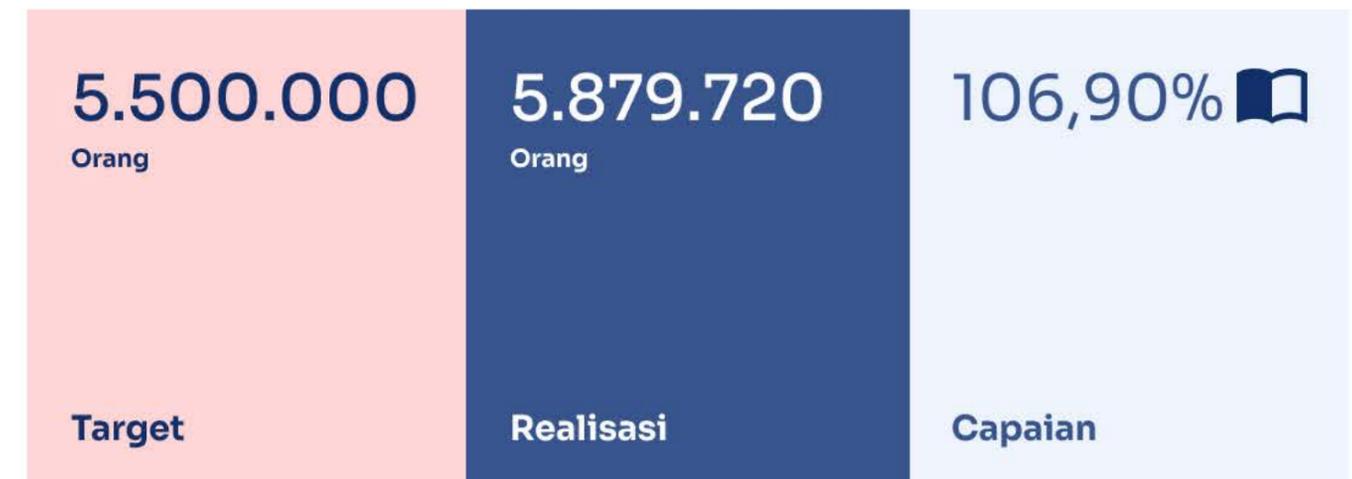


Persentase (%) Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk Layanan *Broadband* Sebesar 90 MHz



## SS.3 Meningkatnya Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital

Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK



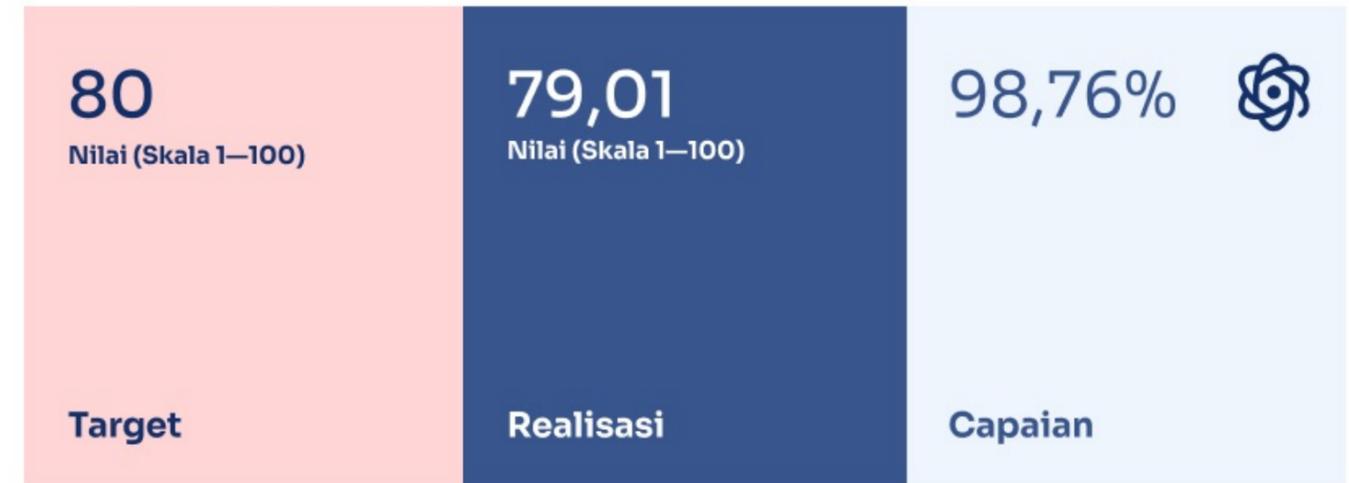
SS.3 Meningkatnya Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital

Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital



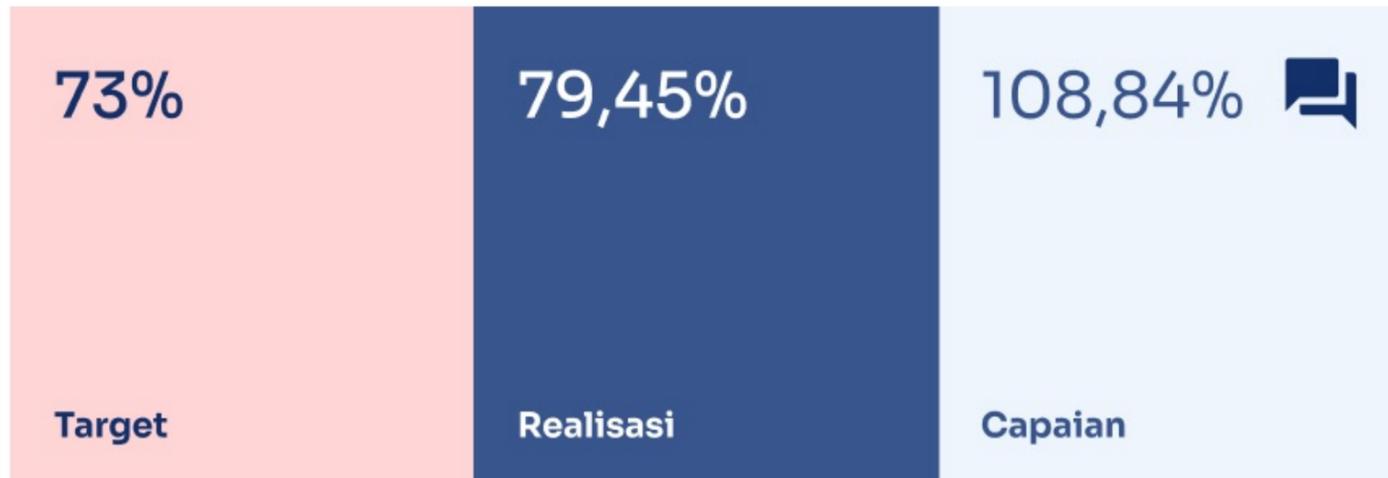
SS.5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)



SS.4 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah



Tahun 2022 menjadi tahun yang sulit baik bagi Kementerian Kominfo maupun kementerian/ lembaga lainnya, karena tantangan pencapaian kinerja sangat tinggi dengan adanya berbagai dinamika yang terjadi. Akan tetapi, hal ini menjadi bagian dari proses pembelajaran dalam memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih matang, lebih tangguh dan *agile* untuk menghadapi permasalahan ke depan.

Kementerian Kominfo terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi, digitalisasi serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini. Ke depannya, Kementerian Kominfo akan melanjutkan penyelesaian program-program tersebut di atas, sesuai dengan Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024, serta melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan dampak dan manfaat program Kementerian Kominfo dapat terasa secara keseluruhan oleh pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha atau industri.

# Pendahuluan

## Bab I

Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Permasalahan Strategis dan Kebijakan
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Komposisi Pegawai
- Sistematika Pelaporan

Dari sembilan misi arah pembangunan nasional, salah satu di antaranya adalah menjawab tantangan pandemi COVID-19 dengan melakukan akselerasi transformasi digital nasional.

Di situasi tantangan global yang luar biasa, maka berdasarkan atau dengan dampak pandemi COVID-19, Indonesia dengan *directive* Presiden sangat jelas melakukan akselerasi transformasi digital nasional, mengajak dan melibatkan peran serta masyarakat untuk memulai terlibat di dalam ruang digital.



## 1.1 Latar Belakang

Transformasi digital pasca pandemi penting dilakukan karena saat ini teknologi bukan sekadar alat dalam operasional bisnis atau organisasi, melainkan dasar dari sumber keunggulan kompetitif guna mendukung pertumbuhan daya saing nasional.

Dalam pelaksanaannya, transformasi digital memiliki tantangan mulai dari ketersediaan, pemerataan dan kualitas infrastruktur TIK baik bagi masyarakat maupun pemerintahan, pemenuhan SDM talenta digital, hingga meningkatnya risiko keamanan siber karena peningkatan arus data yang eksponensial. Transformasi digital akan mengakselerasi dan membuat berbagai aktivitas kerja pasca pandemi akan semakin efisien dan efektif.

Agenda transformasi digital nasional tidak bisa berjalan hanya dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan diperlukan dukungan semua pihak, seperti masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan penyelenggara teknologi komunikasi sehingga pembangunan transformasi digital dapat berjalan dengan baik.

### a. Kerangka Transformasi Digital Nasional

Transformasi digital saat ini tengah menjadi perhatian global, sebagian besar negara berusaha untuk membuat langkah menuju kemandirian teknologi dan digital, terutama pasca pandemi COVID-19. Transformasi digital terbukti dapat memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan produktivitas bisnis melalui digitalisasi, mendorong produksi barang dan jasa yang kompetitif melalui adopsi teknologi, serta memfasilitasi penciptaan lapangan kerja baru.

Terdapat pilar-pilar utama dalam mewujudkan transformasi digital suatu negara yaitu pilar pemerintahan digital, pilar ekonomi digital, dan pilar masyarakat digital yang didukung oleh fondasi infrastruktur digital serta penggerak oleh regulasi, pendidikan dan pengembangan SDM, investasi, dan keselarasan antar *stakeholder*. Setiap pilar pembangunan digital memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga untuk mewujudkan transformasi digital, dibutuhkan komitmen dan kolaborasi berbagai *stakeholder* untuk mewujudkannya.



### ▲ Infrastruktur digital

Pembangunan infrastruktur digital adalah pengembangan infrastruktur berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas, dan mengoptimalkan waktu dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan digital dan mengikis kesenjangan (*gap*) digital, membuat semua orang terhubung secara digital, sehingga pembangunan infrastruktur tersebut adil, inklusif, dan bermanfaat.

Pembangunan infrastruktur digital punya peranan penting dalam pertumbuhan daya saing nasional di berbagai sektor dan menjadi salah satu motor pemulihan seluruh sektor pasca pandemi. Karena kegiatan tetap harus dapat berjalan tanpa lagi diperlukan interaksi secara fisik, pembangunan infrastruktur digital makin mendesak untuk dipenuhi.

### ▲ Pemerintahan Digital

Transformasi digital pada pilar pemerintahan digital akan mengakselerasi dan membuat kerja-kerja pasca pandemi akan semakin efisien dan efektif. Transformasi digital dapat mempermudah kerja dan berkoordinasi antara Kementerian Lembaga atau Pemerintah Daerah khususnya pada pelayanan publik. Hal ini akan mewujudkan ekosistem budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan tertata.

Dalam mendukung transformasi digital, pemerintah juga telah melakukan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai pendukung percepatan digitalisasi. Berbagai langkah digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan telah menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mendorong efisiensi, mengurangi celah untuk berkorupsi, dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah perlu melihat digitalisasi sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekadar teknologi aplikasi. Digitalisasi harus dilihat sebagai upaya tata kelola pemerintahan yang berorientasi kepada *digital services*.

### ▲ Ekonomi Digital

Transformasi digital telah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya soal teknologi, melainkan juga memperhatikan unsur sosial seperti budaya dan masyarakat. Untuk mewujudkan transformasi digital, pelakunya tidak bisa berjalan sendiri. Semua komponen yang ada butuh kolaborasi untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk transformasi digital adalah mendorong berkembangnya ekonomi digital. Ekonomi digital menjadi bagian dari pilar transformasi digital dan telah menjadi penggerak baru pemulihan ekonomi nasional dan global. Salah satu tujuan dari transformasi digital adalah menciptakan pemulihan ekonomi global yang lebih inklusif terutama melalui integrasi digital pada berbagai sektor bisnis, mempercepat literasi dan keterampilan digital, serta reformasi tata kelola.

Perkembangan ekonomi digital juga turut menghadirkan peluang baru bagi perekonomian Indonesia guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mempercepat transformasi digital adalah kunci untuk membuka potensi kita dalam daya saing global dan pembangunan jangka panjang, memberdayakan masyarakat dan bisnis untuk meraih peluang pasar baru, terutama untuk pemulihan pasca pandemi.

### ▲ Masyarakat Digital

Dalam rangka peningkatan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital, pemerintah mendorong pemerataan literasi dan keterampilan digital masyarakat sebagai salah satu prasyarat transformasi digital yang inklusif. Sehingga, semua orang dapat memanfaatkan ruang digital secara produktif dan dinamis untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang cakap teknologi serta mendorong pertumbuhan nilai-nilai ekonomi baru.

Penyiapan SDM talenta digital menjadi faktor *enabler* utama yang dapat meningkatkan persentase keberhasilan pelaksanaan transformasi digital nasional. Sesuai dengan arahan ke-4 Presiden Joko Widodo terkait percepatan transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo perlu menyiapkan pengembangan SDM talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan transformasi digital nasional ini, Kementerian Kominfo tidak dapat berjalan sendirian, dibutuhkan kolaborasi peran antara lapisan masyarakat, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah pusat secara keseluruhan serta pihak-pihak lain yang sejalan dengan agenda transformasi digital untuk mendukung mewujudkan percepatan transformasi digital Indonesia. Selain itu, dengan dinamika yang tinggi, maka pemutakhiran dan perubahan dalam arah kebijakan strategis menjadi hal yang perlu disesuaikan pada perkembangan di setiap tahun anggaran. Bentuk nyata implementasi yang akan dilakukan terhadap enam arahan strategis tersebut akan diuraikan dalam program-program yang dilaksanakan Kementerian Kominfo.

## b. Peran Kementerian Kominfo Dalam Mendukung Transformasi Digital Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pelambatan ekonomi hampir di setiap sektor-sektor strategis. Pandemi COVID-19 memberikan dampak penurunan pada mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam.

Transformasi digital berperan penting dalam mengatasi berbagai isu pembangunan, termasuk dampak pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi selama lebih dari dua tahun ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk berbenah dan memastikan bahwa transformasi digital berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan, khususnya kelompok masyarakat miskin dan rentan. Transformasi digital perlu dilakukan dengan segera karena teknologi digital telah terbukti sangat bermanfaat untuk memitigasi dampak pandemi di beberapa sektor, misalnya, dengan mendukung kegiatan kerja secara daring (daring) serta mendorong digitalisasi dalam berbisnis (niaga elektronik/*e-commerce*). Peluang untuk mendorong transformasi digital yang lebih inklusif perlu dioptimalkan sebagai upaya untuk mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Indonesia.

Gambar 1. 1 Lima Langkah Percepatan Transformasi Digital

Sumber: setkab.go.id

### Lima Langkah

### Percepatan Transformasi Digital

# 01



“Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet.”

# 02



“Persiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis. Baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.”

# 03



“Percepat integrasi pusat data nasional.”

# 04



“Siapkan kebutuhan SDM talenta digital.”

# 05



“Yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya.”



Dalam rapat terbatas mengenai perencanaan transformasi digital tanggal 3 Agustus 2020, Presiden memerintahkan kepada Menteri Kominfo dan menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital karena di masa pandemi maupun *next pandemic*, mengubah secara struktural cara kerja, cara beraktivitas, cara berkonsumsi, cara belajar, cara bertransaksi yang sebelumnya *offline* dengan kontak fisik menjadi lebih banyak *online*. Lima arahan Presiden dalam rapat tersebut:

1. "Segera lakukan percepatan, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Percepatan penyediaan internet di 12.500 desa/kelurahan serta di titik-titik layanan publik."
2. "Persiapkan betul *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, di bantuan sosial, di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, di sektor perdagangan, di sektor industri, di sektor penyiaran, dan jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun, justru utilitasnya sangat rendah."
3. "Percepat integrasi Pusat Data Nasional."
4. "Siapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Talenta Digital. Ini penting sekali. Untuk melakukan transformasi digital, negara kita membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Ini perlu betul-betul sebuah persiapan atau kurang lebih 600 ribu orang per tahun, sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita."
5. "Saya minta juga yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital segera disiapkan secepat-cepatnya."

Sumber: Rapat terbatas mengenai perencanaan transformasi digital tanggal 3 Agustus 2020 <https://setkab.go.id/antisipasi-perubahan-presiden-berikan-5-arahan-soal-perencanaan-transformasi-digital/> (diakses pada tanggal 30 November 2022)

Kementerian Kominfo yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam situasi pandemi COVID-19 menyadari bahwa infrastruktur digital Indonesia yang memiliki keterbatasan baik dari ketersediaan maupun kualitas jaringan yang memadai serta kebutuhan talenta digital agar Indonesia dapat melakukan kegiatan ekonomi untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kementerian Kominfo juga merupakan salah satu Kementerian yang mendukung Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Pandemi COVID-19, telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur digital, digitalisasi pada sektor pemerintahan dan ekonomi, serta akselerasi kompetensi SDM talenta digital. Hal tersebut telah selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024, di mana Kementerian Kominfo fokus pada program-program kerja untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional serta pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Kementerian Kominfo memiliki peran strategis untuk mewujudkan mandat Presiden Joko Widodo terkait agenda percepatan transformasi digital nasional. Untuk itu, Kementerian Kominfo menetapkan enam arahan strategis dalam Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 untuk mewujudkan mandat tersebut. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah:

- |  |  |
|--|--|
| <p>1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;</p>   | <p>2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai platform yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, di antaranya pusat data, infrastruktur cloud, dan identitas digital nasional;</p>  |
| <p>3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;</p>  | <p>4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;</p>   |
| <p>5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan</p>     | <p>6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.</p>    |



Foto: Rapat terbatas mengenai perencanaan transformasi digital, 3 Agustus 2020

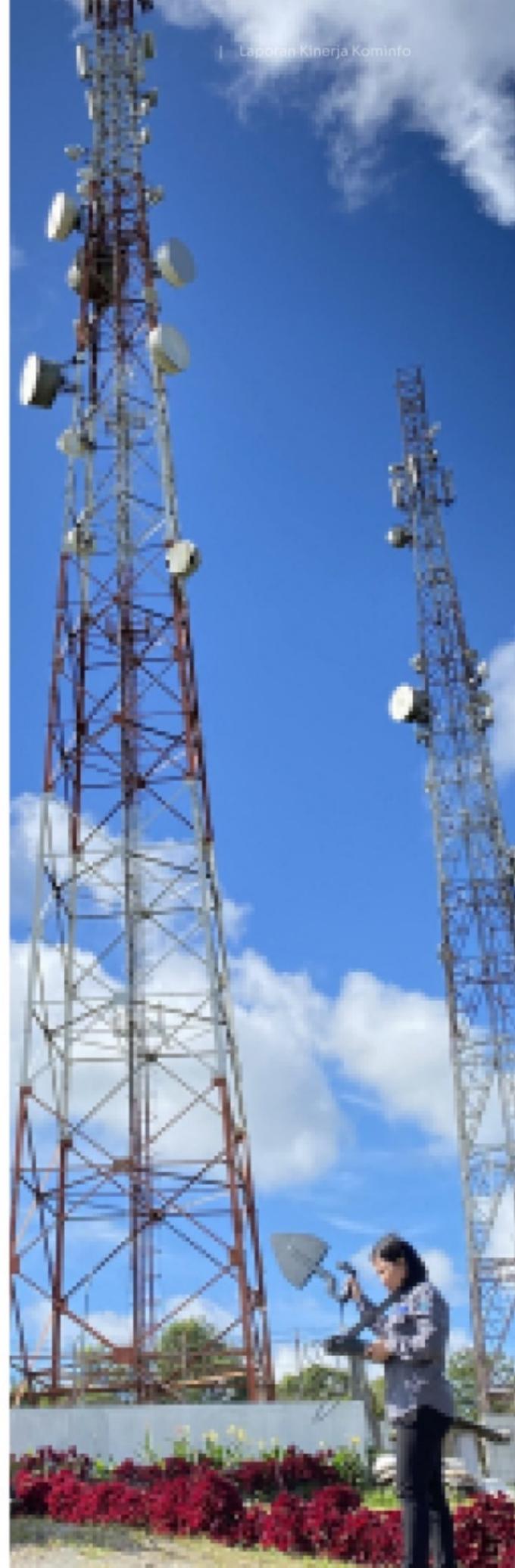
## 1.2 Maksud dan Tujuan

Kementerian Kominfo sebagai Instansi Pemerintah perlu menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan bentuk perwujudan asas akuntabilitas sebagai salah satu asas penyelenggaraan *good governance* dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kementerian Kominfo atas pelaksanaan APBN. Laporan Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022 juga disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kementerian Kominfo atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Laporan Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022 memuat informasi kinerja yang menjawab pencapaian atas target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan Kementerian Kominfo, dan digunakan sebagai alat kendali, evaluasi untuk perbaikan dan pemacu peningkatan kinerja Kementerian Kominfo serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder*.

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Foto: Awaluddin - Balmon SFR Kelas II Manado - Frekuensi Sudah Satukan Negeri, Tapi Tuhan Belum Menyatukan Kita



## 1.3 Permasalahan Strategis & Kebijakan

Kondisi atau hal-hal yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam merumuskan program-program strategis Kementerian Kominfo karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) sehingga perlu diantisipasi antara lain yang bersifat penting,

mendasar, berjangka pendek, menengah maupun panjang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang menentukan tujuan Kementerian Kominfo di masa yang akan datang.

### a. Permasalahan Strategis

Identifikasi permasalahan strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan melalui pelaksanaan program-program prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo sepanjang tahun 2022 adalah:

#### I. Cakupan Layanan *Mobile* dan *Fixed Broadband* yang belum merata

##### o *Mobile Broadband*

Cakupan layanan *mobile broadband* hingga Desember 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:



## II. Penyediaan Akses Internet untuk Daerah dengan Kondisi Geografis yang Sulit Dijangkau dan Termasuk Layanan Publik yang Belum Memiliki Akses Internet

Dari 83.218 Desa/Kelurahan di Indonesia, sebanyak 70.670 Desa/Kelurahan telah mendapatkan jaringan 4G di Indonesia. Sehingga jumlah desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G sebanyak 12.548 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 9.113 di wilayah 3T dan 3.435 di wilayah non 3T. Untuk *mobile broadband* di wilayah non 3T menjadi tanggung jawab Operator Seluler, sedangkan untuk wilayah 3T menjadi tanggung jawab BAKTI, Kementerian Kominfo. Hingga akhir tahun 2021, sebanyak 4.711 Desa/Kelurahan telah dibangun dan *on air* di wilayah 3T, lalu sebanyak 341 Desa/Kelurahan telah memperoleh layanan akses *mobile broadband* 4G di wilayah non 3T.

### o Fixed Broadband

Cakupan layanan *fixed broadband* hingga Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**60,84%**

### Jangkauan Jaringan Serat Optik hingga ke Kecamatan

Diukur berdasarkan Jumlah Kecamatan yang telah memiliki *Optical Distribution Point* (ODP) per tahun 2021 (4.398 dari 7.230 Kecamatan).

Penyediaan akses internet bagi titik layanan publik untuk sementara dilakukan melalui sewa *transponder/leased capacity* kepada penyedia satelit sebesar 27,58 Gbps, dengan distribusi penggunaan kapasitas sebesar 2 Mbps per titik atau lokasi untuk 15.556 titik. Titik atau lokasi layanan publik yang menjadi target penyediaan Akses Internet s.d tahun 2024 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Total Titik Layanan Publik		
		<b>501.112 Titik</b>
1	Sekolah/Pesantren	380.979
2	Pemda	90.541
3	Fas. Kesehatan	15.404
4	Polsek/Koramil/Lainnya	14.188

Total Titik Layanan Publik Online/Offline			
	Online	Offline	
		351.1112	150.000
1	Sekolah/Pesantren	287.079	93.900
2	Pemda	42.041	47.900
3	Fas. Kesehatan	11.704	3.700
4	Polsek/Koramil/Lainnya	10.288	4.500

Target Layanan Internet Cepat ▲

Untuk mempercepat dan mengefisiensikan anggaran maka Kementerian Kominfo melalui BAKTI membangun satelit untuk melayani 150.000 titik/lokasi layanan publik. Satelit tersebut merupakan high throughput satellite yang diberi nama Satelit Republik Indonesia (SATRIA). Satelit SATRIA dimaksud memiliki 11 lokasi stasiun bumi.

The diagram illustrates the SATRIA satellite system architecture. At the top, the 'Satria' satellite is shown in orbit. It connects to the 'Internet' (represented by a double-headed arrow) and the 'Gateway (Stasiun Bumi)' (represented by a satellite dish icon). The 'Gateway' connects to the 'Ground Segment' (represented by another satellite dish icon), which in turn connects to 'WiFi' (represented by a WiFi router icon). Below the diagram, it states '150.000 Layanan Publik' and 'Satelit SATRIA akan menyediakan layanan internet cepat (WiFi) untuk 150.000 layanan publik.' Below the diagram are two photographs: one showing a satellite component being worked on in a cleanroom, and another showing a large satellite panel being moved by a crane in a facility.

### III. Kurang Optimalnya Pemanfaatan Palapa Ring



#### Proyek Palapa Ring

- Existing Fiber Optic Operator
- Fiber Optic Palapa Ring
- - - Rencana Fiber Optic Operator
- Microwave Palapa Ring

Ruang Lingkup	Unit	Total	Barat	Tengah	Timur
Total Kabel	[Km]	12.229,085	2.123,700	3.102,399	7.002,986
Kabel Laut	[Km]	8.073,241	1.719,488	1.798,533	4.555,220
Kabel Darat	[Km]	4.155,844	404,212	1.303,866	2.447,766
Microwave	[hops]	55	-	6	49
Kabupaten	[no]	57	5	17	35
Situs	[no]	131	12	32	87

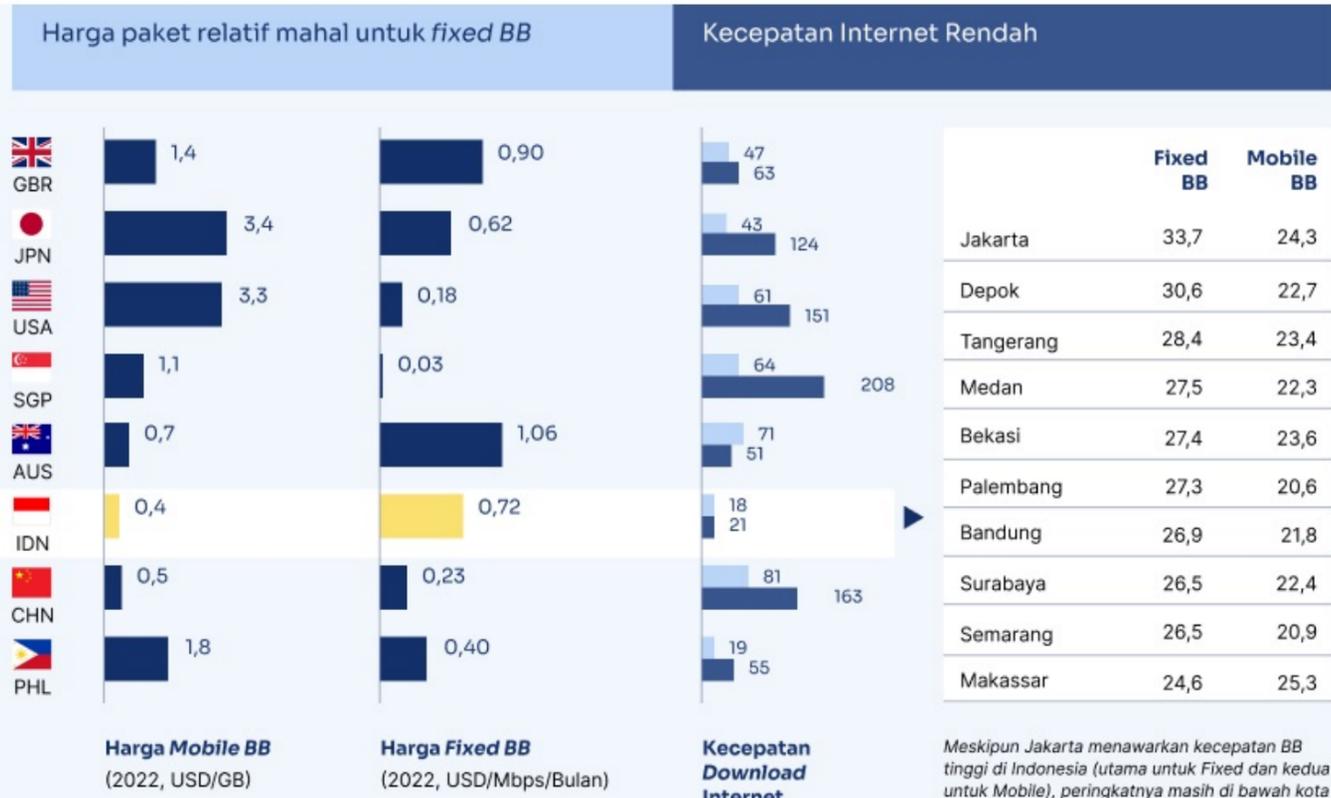
# 57

## Ibukota Kabupaten/ Kota (IKK)

Terhubung oleh adanya Pembangunan Palapa Ring

Pembangunan Palapa Ring yang menghubungkan 57 Ibukota Kabupaten/Kota (IKK) terdiri dari paket barat, paket tengah, dan paket timur. Dalam operasionalnya, pemanfaatan palapa ring paket barat, tengah dan timur kurang optimal, mengingat konfigurasi jaringan yang terputus sebagaimana diilustrasikan pada gambar di atas.

### IV. Kualitas Layanan Telekomunikasi Belum Maksimal



Masih rendahnya jumlah pengguna internet di Indonesia sebesar 76% dari total populasi (Internet World Stats, 2022). Hal ini diakibatkan karena harga layanan *mobile broadband* dan *fixed broadband* yang kurang kompetitif dan terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan studi ITU dalam Policy Brief "The affordability of ICT services 2021", rasio harga 1,5 Gb terhadap PDB sebesar 2%. Sedangkan di Indonesia, dengan PDB tahun 2021 sebesar Rp 62,2juta (Rp 5,18 juta per bulan), rasio harga paket 1,5 Gb terhadap PDB hanya sebesar 0,36%. Rasio harga tersebut masih termasuk kurang kompetitif mengingat rata-rata kecepatan internet di Indonesia tercatat berada di peringkat 115 dari total 138 negara berdasarkan laporan Speedtest Global Index 2021.

Sedangkan untuk layanan *fixed broadband* di Indonesia sebesar USD 0,72 (Rp 10.800 per Mbps/bulan), rasio harga berlangganan perbulan dibandingkan dengan PDB per kapita (Rp 5,18 juta per bulan) adalah sebesar 0,21%. Berdasarkan laporan Speedtest Global Index 2021, kecepatan rata-rata *fixed broadband* di Indonesia berada di peringkat 117 dari 178 negara, sehingga meskipun rasio harga yang termasuk terjangkau tersebut namun masih belum cukup bersaing dalam hal kecepatan internet atau kualitas layanan.

Peningkatan *demand* terhadap data, belum diikuti dengan penyediaan kualitas layanan telekomunikasi yang mumpuni dan merata. Biaya langganan yang perlu dikeluarkan masyarakat juga relatif tinggi.

Meskipun Jakarta menawarkan kecepatan BB tinggi di Indonesia (utama untuk Fixed dan kedua untuk Mobile), peringkatnya masih di bawah kota Metropolitan global (ke-42 untuk Fixed dan ke-33 untuk mobile dari 46 Metropolitan)

V. Ketersediaan Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Belum Optimal

VI. Upaya Percepatan Digitalisasi Penyiaran Televisi di Indonesia



**191 MHz**  
Tambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk *Mobile Broadband* s.d. 2014

**30 MHz**  
Tambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk *Mobile Broadband* 2020—2021

**2.047 MHz** Total Demand s.d. 2024

**546 MHz**  
Tambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk *Mobile Broadband* 2015—2019

**1.280 MHz**  
Tambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk *Mobile Broadband* 2022—2024

**Spectrum Demand s.d. 2024**

Hingga tahun 2024, dibutuhkan tambahan *bandwidth* spektrum frekuensi radio sebesar 1.280 MHz untuk memenuhi kebutuhan *mobile broadband* dan 5G.



**Indonesia termasuk negara tertinggal dalam proses digitalisasi penyiaran**

Negara-negara di kawasan Eropa, Afrika, Asia, dan lainnya membuat keputusan pada 2015 untuk menuntaskan migrasi televisi dari analog ke digital atau *Analog Switch Off (ASO)*.



**Teknologi analog memerlukan pita frekuensi sebesar 8 MHz**

dengan teknologi digital pita frekuensi sebesar itu bisa untuk memancarkan 5 siaran televisi.



**Frekuensi di 700 MHz TV analog bisa ditata ulang**

Dari 328 MHz yang digunakan untuk TV Analog dapat dihemat sebesar 112 MHz untuk keperluan selain penyiaran seperti layanan internet 5G.



**Perangkat infrastruktur TV analog hanya bisa digunakan oleh 1 stasiun TV**

ketika menggunakan digital, satu infrastruktur bisa digunakan sampai 13 stasiun TV.

Sesuai dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 60A yang menyatakan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital dan penghentian siaran analog (*analog switch off*) yang diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, atau paling lambat pada tanggal 2 November 2022.

Selain melaksanakan amanat UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelesaian ASO diharapkan juga dapat berkontribusi terhadap kebutuhan pita frekuensi dan penerimaan negara.

### VII. Pemanfaatan Ruang Digital yang Bersih, Sehat, Beretika, Sopan Santun, Penuh Tatakrama, Produktif dan Mampu Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat

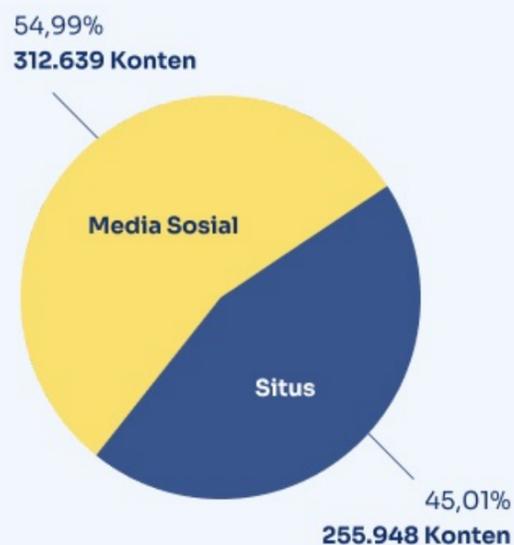
#### Situs Web Paling Dikunjungi di Indonesia

	google.com
	youtube.com
	facebook.com
	instagram.com
	twitter.com
	hotstar.com
	tokopedia.com
	ppgames.net
	shopee.co.id
	brainly.co.id
	wikipedia.org
	predictionexchange.com
	tiktok.com
	google.co.id
	yandex.com
	zoom.us
	tribunnews.com
	kompas.com
	detik.com
	pikiran-rakyat.com
	grid.id
	suara.com
	jpnn.com
	liputan6.com

Dari 25 situs web teratas yang paling dikunjungi di Indonesia, < 30% merupakan situs web lokal (berwarna biru)

#### Pengendalian Konten Negatif

568.587 Konten Negatif



1.773 Isu Hoaks      723 Isu Hoaks terkait COVID-19

Sepanjang 2021 sebanyak 568.587 konten negatif telah ditangani, Kementerian Kominfo juga telah memblokir sebanyak 1.773 isu hoaks. Di mana, isu hoaks terkait COVID-19 mendominasi sebanyak 723 isu hoaks.

Terdapat kesenjangan sikap adaptif masyarakat terhadap teknologi sehingga pemanfaatan TIK masih untuk konsumtif dan belum berdampak pada upaya memberdayakan diri atau peningkatan produktivitas.

### VIII. Belum Tersedianya Pusat Data yang Terintegrasi di Sektor Pemerintahan

#### Data Tersebar & Integritas Data Tidak Terpercaya

Ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan daerah

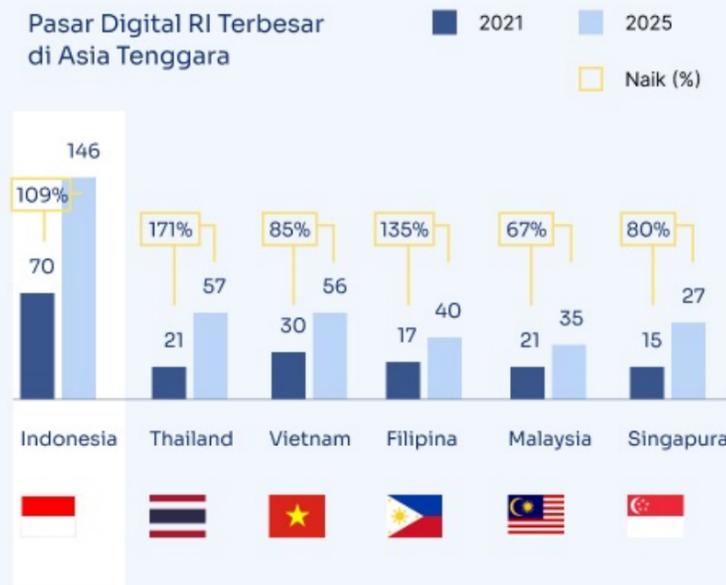
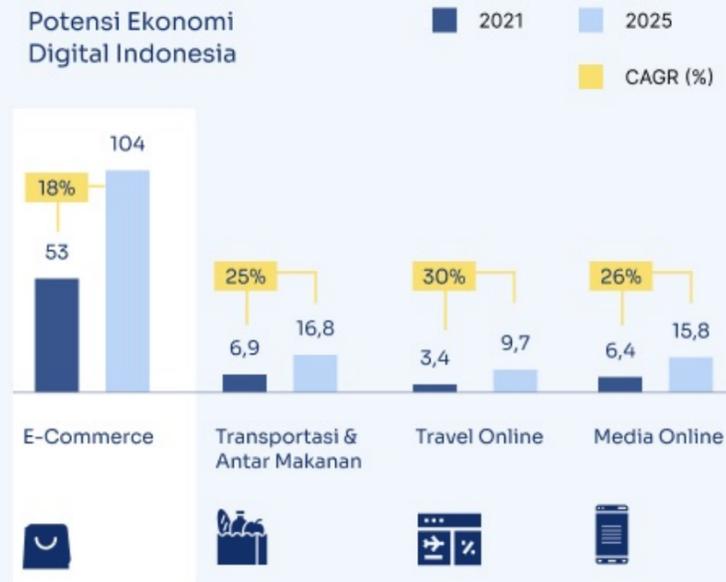
~19K statistik COVID melaporkan kesenjangan antara pemerintah pusat & daerah

Setiap lembaga pemerintahan membentuk database dan sistem sendiri tanpa kapabilitas interkoneksi, sehingga data menjadi tidak terpercaya dan terdapat disparitas pelaporan data.

Pemerintah Indonesia (Pusat dan Daerah) saat ini mengoperasikan sekitar 2.700 Pusat Data atau Ruang Server, di mana hanya 3% yang memenuhi standar internasional. Di samping resiko inefisiensi, keamanan informasi, tersebarnya data yang mempersulit integrasi layanan publik serta *Service Level Agreement* (SLA) yang rendah, menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik menjadi sulit diwujudkan.

### IX. Kurangnya Peran dan Partisipasi Pelaku Usaha Nasional dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Sumber: Laporan "E-Conomy SEA 2021" oleh Google Temasek, dan BAIN & Company



**GMV**  
Gross Merchandise Value: total nilai penjualan

**CAGR**  
Compound Annual Growth Rate: rata-rata pertumbuhan tahunan

## X. Kurangnya Ketersediaan SDM Digital

- Fokus prioritas pemerintah terpaku pada sektor tertentu, seperti UMKM, sedangkan transformasi digital seharusnya didorong pada berbagai sektor unggulan.
- Perkembangan inovasi startup digital masih mereplikasi model global, belum banyak yang berbasis teknologi. Selain itu terkendala pendanaan, ketersediaan SDM dan ekosistem yang memadai.
- *Research & development* bidang teknologi digital masih relatif rendah.
- Dari 64,2 juta UMKM yang ada tercatat telah berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB nasional. Namun menurut Kementerian Koperasi dan UKM, baru sekitar 8 juta UMKM yang telah *go online*, sehingga peran pelaku UMKM belum seluruhnya mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Dalam melaksanakan transformasi digital dibutuhkan literasi digital bagi masyarakat umum dan peningkatan skill dan pengetahuan bagi masyarakat umum, industri/pelaku usaha dan ASN.

Indeks literasi digital di Indonesia adalah 3,49 (dari skala 1-5) pada tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Sedangkan untuk meningkatkan skill dan pengetahuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan digitalisasi sebagaimana proyeksi kebutuhan SDM TIK sampai dengan 2030 (tabel di bawah) kebutuhan rata-rata per tahun sebanyak 64.785 SDM (sumber: studi Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo).

### Pentingnya Mendorong Literasi Digital

Maraknya Penyebaran Hoaks



1.528

Temuan Isu Hoaks

(Januari - Desember 2022)



Status Literasi Digital Indonesia di Tingkat Sedang

3,49

Indeks literasi digital nasional 2021

(Skala 1-5)

Daya Saing Digital Tertinggal

#37

Digital Competitiveness Ranking 2021

Indonesia menduduki urutan 37 dari 64 negara (Digital Competitiveness Ranking 2021)



Kesiapan Masyarakat untuk Menghadapi Transformasi Digital Perlu Ditingkatkan

#74

Indeks Internet Inklusif 2021: Readiness

Indonesia peringkat 74 dari 120 negara pada kategori Readiness dalam indeks internet Inklusif 2021

### Proyeksi Kebutuhan SDM TIK s.d 2030

Posisi yang Dibutuhkan		
1	Full Stack Programmer	197.991
2	Data Analyst/Big Data Scientist	158.393
3	Artificial Intelligence / Machine Learning Specialist	158.393
4	Network Engineer	118.795
5	Information Security Specialist	118.795
6	Cloud Computing Specialist	118.795
7	Scrum Master/DevOps Specialist	118.795
8	Enterprise Architect	79.197
9	Front-End Programmer	79.197
10	IoT Specialist	79.197
11	Mobile Programmer	79.197
12	Web Architect & Programmer	79.197
13	ICT Project Manager	39.598
14	Database Administrator	39.598
<b>Demand rata-rata/ tahun</b>		<b>64.785</b>

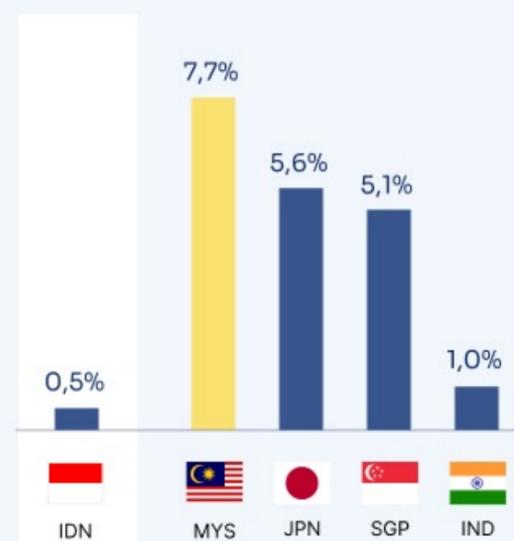
▲ Sumber: Studi Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo

## XI. Akses dan Kualitas Informasi Publik yang Kurang Optimal

Sebagaimana ditunjukkan grafik di bawah, jika dibandingkan dengan Malaysia, Jepang, Singapura dan India, posisi Indonesia masih tertinggal. Mobilisasi SDM internasional masih kurang, dan minimnya inisiatif untuk menarik SDM untuk masuk.

### Kurang Ketersediaan SDM

Jumlah pekerjaan di sektor ICT terhadap Total Tenaga Kerja (%)



Kominfo sedang melakukan proses peluncuran Agensi Talenta Digital untuk menyusun keterampilan digital talenta terpilih.

# 77,78%

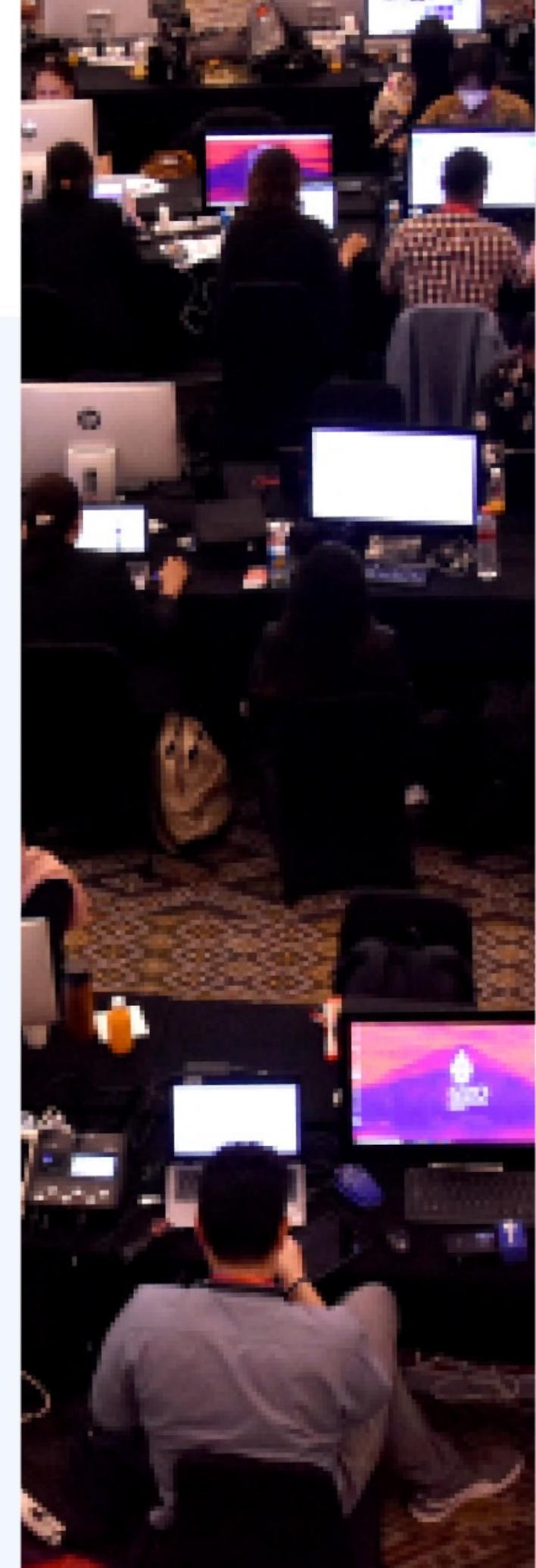
### Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Diukur melalui penilaian survey berdasarkan tiga kelompok kategori yaitu akses informasi, kualitas informasi, dan kepuasan masyarakat terhadap 400 panel yang tersebar di 13 kota di Indonesia yang dianggap mewakili seluruh masyarakat. Penetapan sampling berdasarkan teori *Central Limit Theorem* di mana distribusi sampling mendekati distribusi normal Ketika ukuran sampel semakin besar. Apabila jumlah sampel mencukupi ( $n \geq 30$  responden), maka distribusi sampel dapat dianggap memenuhi distribusi normal. Penambahan jumlah responden lebih banyak tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan.

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilakukan pemerintah belum disesuaikan agar lebih adaptif dan lebih efektif sehingga akses dan kualitas informasi terhadap kebijakan pemerintah masih kurang optimal.

## XII. Kurang Optimalnya Peran Kementerian Kominfo dalam Forum Internasional

Dalam berbagai forum internasional yang diikuti oleh Kementerian Kominfo seperti forum multilateral di antaranya International Telecommunication Union (ITU), Universal Postal Union (UPU), World Trade Organization (WTO), dan Group of 20 (G20), dan Forum regional seperti Asia Pacific Economy Cooperation (APEC), ASEAN, Asia Pacific Telecommunication (APT), Asian Pacific Postal Union (APPU), serta forum bilateral yaitu perundingan antara Malaysia, Australia. Kementerian Kominfo terus berupaya secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi secara maksimal dalam setiap forum internasional untuk mendorong kerjasama dalam bentuk bilateral, regional, maupun multilateral khususnya terkait percepatan transformasi digital.



## b. Kondisi saat ini (Capaian 2021) dan kondisi yang diinginkan (Target 2022), dan Target akhir periode RPJMN/RENSTRA 2024

Pandemi COVID-19 telah menciptakan kondisi *extraordinary* yang berdampak kepada berbagai sektor industri dan seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Salah satu akibatnya adalah penurunan sektor perekonomian yang terjadi karena ketidakseimbangan *demand* dan *supply* perekonomian akibat kebijakan *lockdown* di berbagai wilayah dunia. Namun kondisi di tahun 2022 mulai membaik, penurunan angka kasus COVID-19 yang salah satunya ditopang dengan peningkatan jumlah masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi telah meningkatkan probabilitas *herd immunity* sehingga mobilitas masyarakat dapat normal kembali.

Sebagai dampaknya, pertumbuhan ekonomi tahunan meningkat secara persisten selama empat kuartal berturut-turut dengan tumbuh di atas 5 persen sejak kuartal IV tahun 2021.

Pandemi COVID-19 juga merupakan momentum pelaksanaan percepatan transformasi digital Indonesia karena menjadi salah satu kunci dalam mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan dan membangun bangsa yang lebih tangguh. Pemanfaatan teknologi digital telah terbukti mampu berkontribusi sebagai daya ungkit ekonomi, hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang mampu mempertahankan pertumbuhan yang positif pada masa pandemi ini berkat dorongan transformasi digital di berbagai sektor ekonomi.

### Infrastruktur Digital

Kementerian Kominfo sebagai *leading sector* telekomunikasi dan komunikasi terus berupaya untuk mewujudkan transformasi digital nasional. Dari sisi infrastruktur digital, Kementerian Kominfo terus berupaya untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) lapisan yang meliputi *backbone* (jaringan tulang punggung), *middle mile*, dan *last mile*.

Pada lapisan *backbone*, Kementerian Kominfo melanjutkan program Palapa Ring kepada tahap peningkatan utilitas jaringan. Palapa Ring yang dibangun untuk mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi di seluruh Indonesia, telah membentang dari wilayah barat, tengah, dan hingga timur Indonesia. Sebagai lapisan *backbone*, maka pemanfaatan Palapa Ring didorong untuk dapat menjadi stimulus untuk penetrasi jaringan telekomunikasi para operator.

Tercatat hingga akhir tahun 2021, utilisasi Palapa Ring Wilayah Barat telah mencapai sebesar 144 Gbps dari kapasitas 300 Gbps, Palapa Ring Tengah sebesar 197 Gbps dari kapasitas 600 Gbps, dan Palapa Ring Timur sebesar 244 Gbps dari kapasitas fiber optik 800 Gbps, dan sebesar 73,63% untuk *microwave* (4.500 Mbps dari kapasitas 5.500 Mbps).

Selanjutnya, pada lapisan *middle mile*, Kementerian Kominfo menghadirkan satelit sebagai solusi dalam menjangkau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh penyediaan jaringan *terrestrial* menjadi solusi tepat guna dalam mengentaskan kesenjangan akses *broadband* internet. Proyek Satelit Multifungsi Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Satelit Republik Indonesia (SATRIA) merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Hingga akhir tahun 2021, telah dilakukan penandatanganan *financial close* dan dimulainya Konstruksi SATRIA dengan ditandatanganinya *Preliminary Working Agreement* (PWA) antara Badan Usaha Pelaksana, PT Satelit Nusantara (PSN) Tiga dan Pabrik Satelit Thales Alenia Space. Selain itu, masih dalam proses pembangunan stasiun bumi di 11 lokasi. Nantinya, Satelit SATRIA akan dimanfaatkan Kementerian Kominfo untuk menyediakan layanan internet *broadband* (termasuk akses WiFi gratis) ke lebih dari 150.000 titik layanan publik yang belum terlayani, seperti sekolah, rumah sakit, dan lokasi pemerintah daerah di beberapa lokasi paling terpencil di Indonesia.

Dari sisi *last mile*, Kementerian Kominfo berupaya menyelesaikan pemenuhan layanan seluler 4G di 9.586 desa/kelurahan di wilayah 3T, dan 3.435 desa/kelurahan di wilayah non 3T. Program *Base Transceiver Station* (BTS) 4G merupakan usaha bersama antara Kominfo dengan operator seluler untuk menyediakan akses seluler 4G di wilayah 3T dan non 3T. Kominfo melalui BAKTI melaksanakan pembangunan di desa-desa yang termasuk wilayah 3T, sedangkan operator seluler melaksanakan pembangunan di desa wilayah non 3T. Hingga bulan Desember tahun 2021, tercatat penyelesaian pembangunan BTS 4G di wilayah 3T sebanyak 4.711 desa/kelurahan, sedangkan di wilayah non 3T yaitu sebanyak 341 desa/kelurahan.

Selanjutnya, program *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio, yang merupakan program untuk menyediakan kapasitas dan kualitas jaringan bagi layanan akses *mobile broadband* 4G dan 5G. *Farming* dan *refarming* atau penataan spektrum frekuensi radio dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan *traffic data* internet, pengembangan jaringan 5G. Hal ini juga berkaitan erat dengan program Kementerian Kominfo lainnya seperti menuntaskan proses *Analog Switch Off* (ASO) pada digitalisasi penyiaran.

Sejauh ini, telah diperoleh penambahan spektrum frekuensi radio yang akan digunakan untuk optimalisasi kebutuhan *mobile broadband* di Indonesia.

Sebesar 191 MHz diperoleh pada periode 2010-2014, 546 MHz diperoleh pada periode 2015-2019, dan 30 MHz diperoleh pada tahun 2021. Total tambahan frekuensi hingga tahun 2021 yang diperoleh adalah sebesar 767 MHz.

Program selanjutnya, yang juga menjadi bagian dalam akselerasi transformasi digital yaitu program Digitalisasi Penyiaran. Digitalisasi penyiaran ini merupakan migrasi siaran televisi analog menjadi siaran digital atau *Analog Switch Off* (ASO). Migrasi ini diupayakan melalui penghentian siaran televisi analog secara nasional sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 60A. Untuk meningkatkan jangkauan populasi penyiaran digital, sepanjang tahun 2021 Kementerian Kominfo bersama dengan seluruh lembaga penyiaran akan memastikan proses transisi ke siaran digital berjalan baik. Untuk itu Kementerian Kominfo telah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara bersamaan melalui empat pilar utama. Pilar pertama, menyiapkan infrastruktur *multipleksing* yang merupakan infrastruktur utama dalam penyiaran digital. Kedua, dengan siapnya infrastruktur *multipleksing* maka setiap Lembaga Penyiaran harus mulai melakukan peralihan ke siaran digital dan dapat diawali dengan siaran *simulcast*, yaitu siaran digital tanpa mengakhiri siaran analog. Ketiga, untuk dapat menerima siaran digital maka dibutuhkan perangkat televisi digital atau menggunakan *Set-Top-Box* (STB) sebagai alat bantu bagi rumah tangga yang masih menggunakan televisi analog. Terakhir, pilar keempat yaitu sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara untuk menonton siaran televisi digital agar masyarakat terdorong untuk segera beralih ke siaran digital. Sosialisasi dimaksud juga untuk meningkatkan pemahaman dan untuk mengantisipasi mispersepsi yang mungkin terjadi di masyarakat. Dari segi jangkauan, hingga akhir tahun 2021, jangkauan layanan penyiaran digital di Indonesia 70,67% atau sebanyak 185.211.708 dari total populasi Indonesia.

## Pemerintah Digital

Dalam mendukung transformasi digital di pemerintahan, Kominfo melaksanakan tugas sesuai amanat Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peran Kominfo berfokus pada penyediaan aspek infrastruktur TIK pemerintahan, khususnya pembangunan Pusat Data Nasional. Proses panjang pada perencanaan dan diskusi teknis telah dilewati untuk menyiapkan konsep pembangunan Pusat Data Nasional berstandar internasional. Sesuai rencana pembangunan yang disiapkan, Pusat Data Nasional tersebut akan dibangun di 2 (dua) lokasi, yaitu Cikarang dan Batam, dengan pertimbangan kebutuhan integrasi data antar wilayah yang perlu dipenuhi.

Hingga akhir tahun 2021, progres capaian pembangunan PDN adalah sebagai berikut:

1. Telah diselesaikan dokumen Pra Desain, *Basic Design*, dan *Masterplan PDN*
2. Telah dilakukan beberapa persiapan untuk lelang pembangunan PDN antara lain persiapan lelang Manajemen Konstruksi (MK) dan *Project Management Officer* (PMO)
3. Telah diselesaikan naskah akademis pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) PDN
4. Telah ditandatangani dokumen *Financial Protocol* oleh Menteri Keuangan selaku perwakilan dari Pemerintah Indonesia dan Duta Besar Perancis di Indonesia yang bertindak sebagai perwakilan dari Pemerintah Perancis pada tanggal 15 September 2021
5. Telah ditandatangani dokumen *Implementation Agreement* oleh Menteri Keuangan selaku perwakilan dari Pemerintah Indonesia dan Natixis selaku perwakilan dari Pemerintah Perancis pada tanggal 30 Desember 2021.

Untuk program pembangunan peralatan dan sistem pengembangan teknologi Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), Kementerian Kominfo menyelesaikan pembangunannya di 6 (enam) Penyelenggara Telekomunikasi di tahun 2021.

Ke depan, Kementerian Kominfo berencana melakukan pengembangan dan penambahan instalasi sistem TKPPSE di 9 (sembilan) penyelenggara jasa telekomunikasi pada tahun 2022. Pengembangan teknologi ini ditujukan untuk dapat melakukan pemantauan terhadap PSE dalam penyelenggaraan sistem elektroniknya sesuai dengan kewenangan dari peraturan perundangan yang berlaku.

## Ekonomi Digital

Sebagai akselerator ekosistem digital nasional, Kementerian Kominfo menyelenggarakan berbagai program kerja yang ditujukan untuk memunculkan inovasi-inovasi baru bidang digital, menumbuhkan *entrepreneurship* bidang teknologi digital, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi pada sektor-sektor ekonomi. Terdapat beberapa program Kominfo antara lain Adopsi Teknologi pada UMKM dan pengembangan startup digital pada berbagai level.

Program Adopsi Teknologi Digital pada UMKM merupakan program Kominfo untuk mendorong UMKM khususnya sektor pengolahan agar mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam operasional usahanya agar dapat mencapai *scale-up* (peningkatan skala usaha). Hingga tahun 2024, program ini ditargetkan untuk melakukan *scale-up* bagi 33.000 pelaku UMKM yang tersebar di 13 kawasan prioritas.

Dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi digital baru, Kementerian Kominfo mengembangkan program pengembangan Startup Digital. Program startup ini dirancang dengan basis *end-to-end* yang dimulai dari level pengenalan terhadap startup melalui program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital, pengembangan startup digital di level *early stage* untuk mencapai *product market fit* melalui program Startup Studio, sampai dengan fasilitasi terjadinya *business matchmaking* melalui program HUB.id.

Penyelenggaraan program Startup Studio pada tahun 2021 mendapatkan 30 startup digital yang terpilih dari hasil kurasi, untuk di-*coaching* dan mengikuti seluruh rangkaian fasilitas program.

## Masyarakat Digital

Penyiapan SDM talenta digital menjadi faktor *enabler* utama yang dapat meningkatkan persentase keberhasilan pelaksanaan transformasi digital nasional. Sesuai dengan arahan ke-4 Presiden Joko Widodo terkait percepatan transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo perlu menyiapkan pengembangan SDM talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai dan berkelanjutan.

Melaksanakan amanat tersebut, Kementerian Kominfo menyiapkan program-program kerja bagi SDM nasional, agar mendapat peningkatan kompetensi bidang digital baik di level *basic*, *intermediate* hingga *advanced*. Pada level *basic*, terdapat program literasi digital bagi masyarakat Indonesia. Pada level *intermediate* dan *advanced*, dilaksanakan program Digital Talent Scholarship yang memberikan pelatihan keahlian bidang digital bagi SDM talenta digital nasional.

Pada tahun 2021 Kementerian Kominfo telah berhasil meliterasi 12.330.670 orang dan diharapkan dapat diteruskan hingga 2022 dengan target penambahan 5.500.000 orang yang terliterasi. Program Literasi Digital terbukti membawa dampak yang cukup signifikan dalam membangun pengetahuan dan keterampilan masyarakat pada level *basic* dalam bidang TIK di mana indeks Literasi Digital Indonesia yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 3,46 menjadi 3,49 pada tahun 2021.

Pada level berikutnya, yaitu *intermediate* dan *advanced*, Kementerian Kominfo menyelenggarakan program Digital Talent Scholarship. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian di bidang digital, antara lain seperti *Cybersecurity*, *Cloud Computing*, *Big Data Analytics*, *Artificial Intelligence*, *Digital Business*, dan tema-tema bidang TIK lainnya yang relevan dengan kebutuhan industri.

DTS terdiri dari berbagai macam jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada pelaksanaan tahun 2021 program ini telah diikuti oleh 191.720 peserta. Kebutuhan akan SDM Digital akan meningkat setiap tahunnya, karena itu Kementerian Kominfo juga terus berupaya menambah dan meningkatkan kualitas SDM Digital Indonesia pada tahun 2022. Kominfo menargetkan akumulasi SDM Digital yang dilatih menjadi 200.000 orang.

## Komunikasi Publik

Selain fondasi dan pilar-pilar transformasi digital yang telah diuraikan, komunikasi publik memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pelaksanaan diseminasi informasi komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo adalah agar masyarakat memperoleh pemahaman dan pemerintah mendapatkan kepercayaan publik. Dengan adanya komunikasi publik yang akurat, tepat, dan pemilihan gaya komunikasi serta narasi sesuai segmentasi kelompok masyarakat, kredibilitas pemerintah akan meningkat. Pada tahun 2021, hasil survei Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah telah mencapai 77,78%. Hasil survei ini menggambarkan ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka. Selanjutnya, pada tahun 2022, Kementerian Kominfo akan melanjutkan pelaksanaan diseminasi informasi publik yang lebih efektif dan efisien.

No	Program Kerja Prioritas	Kondisi saat ini (2021)	Kondisi yang diinginkan (2022)	Target RPJMN/ RENSTRA (2024)
1	Penyediaan BTS 4G di Wilayah 3T	4.711 (Desa/Kelurahan)	8.226 (Desa/kelurahan)	9.586 (Desa/kelurahan)
2	Penyediaan BTS 4G di Wilayah non 3T	341 (Desa/Kelurahan)	3.435 (desa/ kelurahan)	3.435 (desa/ kelurahan)
3	Jangkauan Infrastruktur Serat Optik <i>Broadband</i> pada Kecamatan	60,84% (dari Total 7.230 Kecamatan)	61% (dari Total 7.230 Kecamatan)	62% (dari Total 7.230 Kecamatan)
4	Penyediaan Kapasitas Satelit ( <i>Leased Capacity Satellite</i> )	27,58 Gbps	25 Gbps	37 Gbps
5	Pembangunan Satelit Multifungsi/Satelit Republik Indonesia (Satria-I)	<i>Financial Close</i> dan Tahapan Konstruksi	70% Konstruksi	Operasional Satria 1: 150 Gbps Satria 2: 300 Gbps
6	Penyediaan Akses Internet	3.739 Lokasi Baru 15.556 Lokasi (Akumulatif)	9.463 Lokasi eksisting	121.721 Lokasi
7	Palapa Ring	SLA 95%, dengan rincian utilisasi Palapa Ring: <ul style="list-style-type: none"><li>48% (Palapa Ring Barat)</li><li>33% (Palapa Ring Tengah)</li><li>30,5% FO dan 73,63% MW (Palapa Ring Timur)</li></ul>	SLA 95%, dengan rincian utilisasi Palapa Ring: <ul style="list-style-type: none"><li>50% (Palapa Ring Barat)</li><li>35% (Palapa Ring Tengah)</li><li>35% (Palapa Ring Timur)</li></ul>	SLA 95%, dengan rincian utilisasi Palapa Ring: <ul style="list-style-type: none"><li>60% (Palapa Ring Barat)</li><li>50% (Palapa Ring Tengah)</li><li>50% (Palapa Ring Timur)</li></ul>
8	Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Layanan <i>Broadband</i>	30 MHz	Penambahan spektrum frekuensi radio sebesar 90 MHz	1.310 MHz (kumulatif)

No	Program Kerja Prioritas	Kondisi saat ini (2021)	Kondisi yang diinginkan (2022)	Target RPJMN/ RENSTRA (2024)
9	Jangkauan Populasi yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital	70,67% Jangkauan Populasi Penyiaran Digital	75% Jangkauan Populasi Penyiaran Digital	85% Jangkauan Populasi Penyiaran Digital
10	Konten Internet Negatif yang Ditangani	882.275 Konten	200.000 Konten	250.000 Konten
11	Penyediaan Pusat Data Nasional	20% progress pembangunan	25% progress pembangunan	2 Unit Pusat Data Nasional
12	Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE)	6 Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (PJT)	9 Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (PJT)	40 Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (PJT)
13	<i>Scale Up</i> UMKM Adopsi Teknologi Digital	7.000 UMKM	7.000 UMKM	33.000 UMKM
14	Startup Digital Aktif yang Terbentuk melalui <i>Digital Technopreneur</i>	30 Startup Digital Aktif	30 Startup Digital Aktif	150 Startup Digital Aktif (kumulatif)
15	Masyarakat yang mendapatkan Literasi Bidang Digital	12.330.670 Orang	5.500.000 orang	12.500.000 orang
16	SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital (DTS)	133.604 Orang	200.000 Orang	65.000 orang
17	Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	77,78%	73%	75%

▲ Tabel 1.1 Gambaran Kondisi Capaian Tahun 2021, Kondisi yang Diinginkan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

## c. Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka Kementerian Kominfo merumuskan kebijakan-kebijakan yaitu:

1. Melakukan percepatan pemerataan infrastruktur digital berupa akses telekomunikasi dan jaringan internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
2. Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur digital oleh operator telekomunikasi di wilayah Non 3T.
3. Melakukan *Farming* dan *Refarming* Spektrum Frekuensi Radio dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan *mobile broadband* (internet kecepatan tinggi) di masa mendatang.
4. Melakukan migrasi siaran TV analog ke digital sesuai yang diamanatkan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Melakukan pengendalian konten negatif.
6. Melakukan penyediaan Pusat Data Nasional Sementara dan membangun Pusat Data Nasional (PDN) bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
7. Memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha nasional dalam berpartisipasi pada ekonomi digital Indonesia.
8. Melakukan literasi digital bagi masyarakat umum dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan ASN.
9. Melakukan penyebarluasan informasi nasional dalam rangka meningkatkan informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah.
10. Berperan aktif dalam forum internasional.

Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam 5 (lima) program Kementerian Kominfo yaitu:

1. Program Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi Pemanfaatan Palapa Ring, Penyediaan Kapasitas Satelit, Pembangunan Satelit SATRIA, Pembangunan BTS/*Last Mile*, Penyediaan Akses Internet dan Digitalisasi Penyiaran.
2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik yang meliputi *Farming* dan *Refarming*, Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio, Pengembangan *World Class Testing Laboratory*.
3. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang meliputi Literasi Digital, Pelatihan SDM bidang Digital, Adopsi Teknologi Digital UMKM, *Digital Technopreneur*, *Business Matchmaking* Startup Digital, Penanganan Konten Digital, Inisiatif Digital Sektor Strategis, Pusat Data Nasional, dan Pengendalian Tata Kelola PSE dan Transaksi PSE.
4. Program Komunikasi Publik yang meliputi Diseminasi Informasi di bidang Polhukam, Perekonomian dan Maritim, dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Program Dukungan Manajemen yang meliputi kegiatan ITU Plenipotentiary untuk pemilihan anggota ITU Council, Digital Economic Working Group (DEWG) G20, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Dukungan Anggaran.

Untuk mempercepat implementasi transformasi digital di Indonesia seperti percepatan penyediaan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital, Kementerian Kominfo melakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan anggaran melalui Pinjaman Luar Negeri, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan peningkatan izin penggunaan sebagian dana PNBK Kementerian Kominfo. Sebagai ilustrasi, berikut disampaikan anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020, 2021, dan 2022.

### Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020-2022

Grafik 1.1 Anggaran Kementerian Kominfo 2020 - 2022



Peningkatan izin penggunaan sebagian dana PNBP juga telah dilakukan Kementerian Kominfo sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK/.02/2021 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian/ Lembaga adapun izin penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran				
		2021		2022	2023	2024
		Semula (% Izin)	Menjadi (% Izin)	(% Izin)	(% Izin)	(% Izin)
<b>1.</b>	<b>Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika</b>					
	a. Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	4%	43%	43%	43%	40%
	b. Biaya Sertifikasi dan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi	31,66%	31,66%	31,66%	31,66%	31,66%
<b>2.</b>	<b>Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika</b>					
	a. Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	14%	45,54%	51,71%	47,40%	38,62%
	b. Biaya Izin Penyelenggaraan Penyiaran	92,33%	92,33%	92,33%	92,33%	92,33%
<b>3.</b>	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>					
	a. Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	82%	82%	82%	82%	82%
	b. Sekolah Tinggi Multi Media	95,17%	95,17%	95,17%	95,17%	95,17%
	c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Komunikasi dan Informatika	96%	95,84%	95,84%	95,84%	95,84%
<b>4.</b>	<b>Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika</b>	60%	60%	60%	60%	60%
<b>5.</b>	<b>BAKTI</b>					
	a. Kontribusi KKPU-USO	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Jasa Perbankan	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga (Palapa Ring)	-	-	100%	100%	100%

Tabel 1. 2 Izin Penggunaan Dana PNBP pada Kementerian Kominfo 2021-2024

Sumber: Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK/.02/2021

## 1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kominfo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Kominfo menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 54 Tahun 2015, Kementerian Kominfo telah menetapkan Peraturan Menteri Kominfo (PM Kominfo) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo, Menteri Kominfo dibantu oleh:

1. 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kominfo, yang terdiri atas:
  - a. Sekretariat Jenderal (SETJEN)
  - b. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (DITJEN SDPPI)
  - c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DITJEN PPI)
  - d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (DITJEN APTIKA)
  - e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (DITJEN IKP)
  - f. Inspektorat Jenderal (ITJEN)
  - g. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BALITBANG SDM)
2. 4 (empat) Staf Ahli Menteri sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kominfo, yang terdiri atas:
  - a. Staf Ahli Bidang Hukum
  - b. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya
  - c. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa
  - d. Staf Ahli Bidang Teknologi
3. 2 (dua) Organisasi Pusat di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kominfo yang terdiri atas:
  - a. Pusat Data dan Sarana Informatika
  - b. Pusat Kelembagaan Internasional
4. 4 (empat) Staf Khusus Menteri yang tidak termasuk dalam bagian struktur organisasi Kementerian Kominfo berdasarkan PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2021, sebagai unsur pendukung bagi Menteri Kominfo yang terdiri atas:

- a. Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Regulasi dan Pendidikan Tinggi Digital
  - b. Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia
  - c. Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Informasi Komunikasi Publik, Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga
  - d. Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Komunikasi Politik dan Isu Strategis
5. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo di daerah, Kementerian Kominfo juga memiliki beberapa unit organisasi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang terdiri atas:

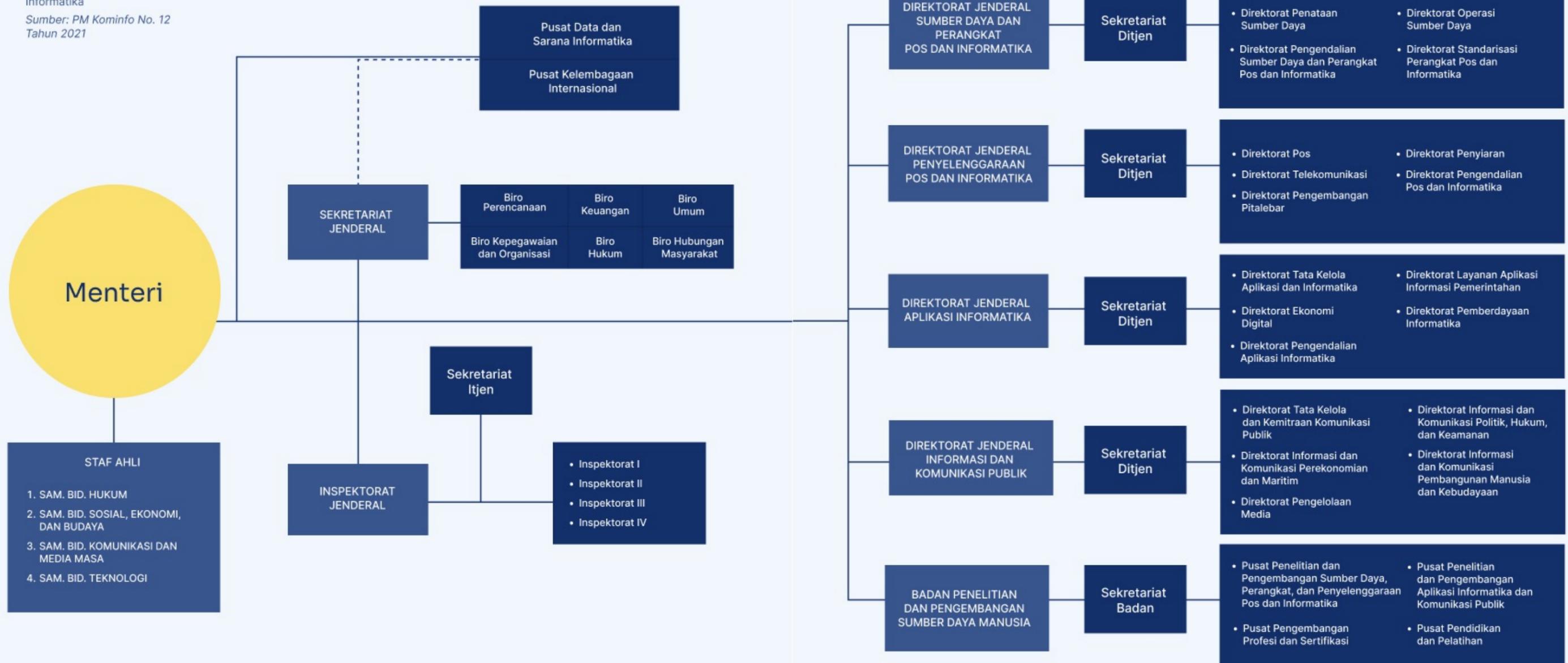
Unit Kerja Eselon I	Unit Organisasi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis
<b>DITJEN SDPPI</b>	1 Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, 13 Balai Monitor (BALMON) Spektrum Frekuensi Radio Kelas I, 14 Balai Monitor (BALMON) Spektrum Frekuensi Radio Kelas II, dan 8 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio.
<b>BALITBANG SDM</b>	2 Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP Kominfo), 6 Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP Kominfo), 1 Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK), dan 1 Sekolah Tinggi Multi Media (STMM).
<b>DITJEN IKP</b>	1 Museum Penerangan dan 1 Monumen Pers Nasional

Selain itu, terdapat 4 (empat) unit organisasi di luar PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan amanat peraturan perundangan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Kominfo, berbentuk Sekretariat dan Badan Layanan Umum (BLU), yaitu:

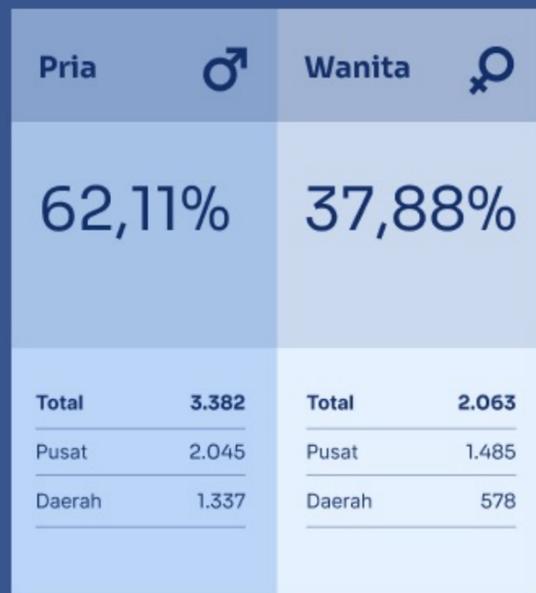
1. Badan Layanan Umum (BLU) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika yang bertugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Informatika.
2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
3. Sekretariat Komisi Informasi Pusat, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang bertugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
4. Sekretariat Dewan Pers, ditetapkan melalui PM Kominfo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers yang bertugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Pers dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sumber: PM Kominfo No. 12 Tahun 2021



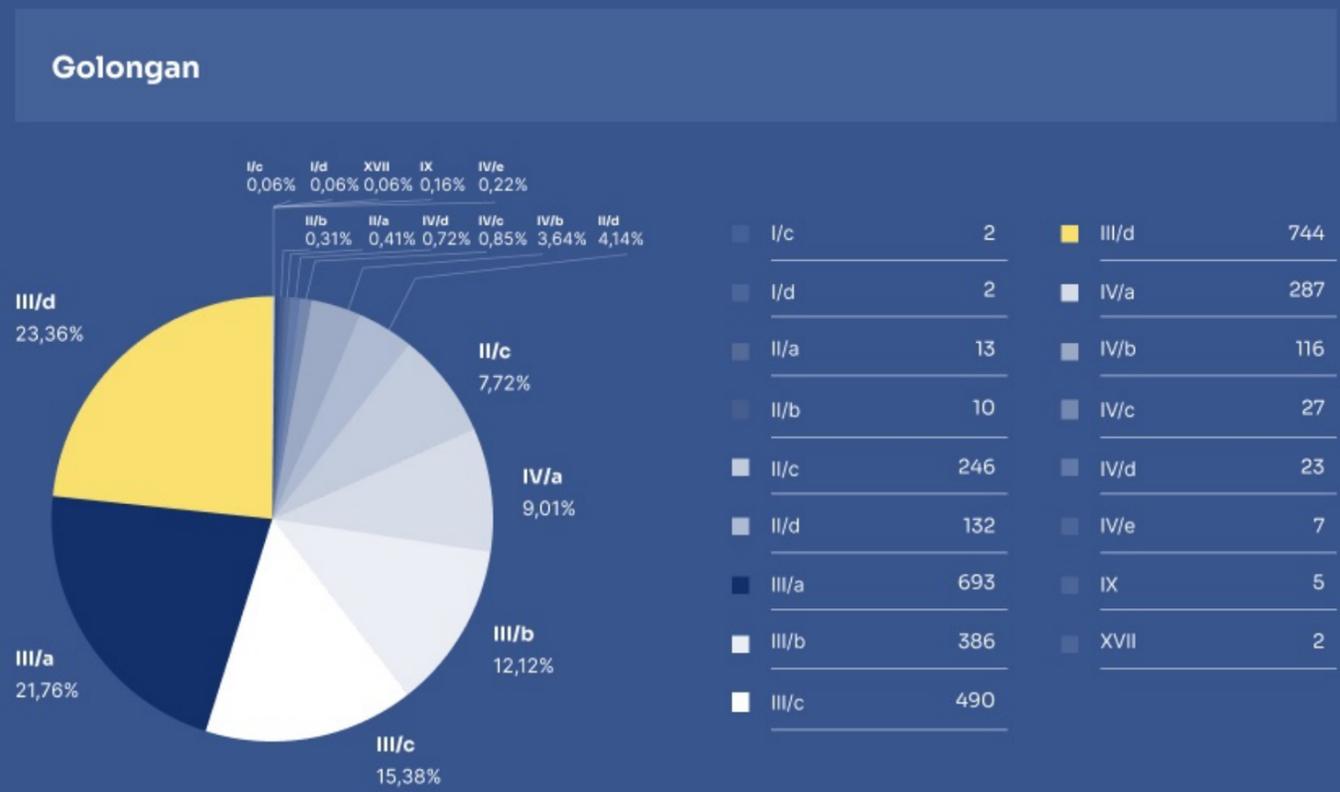
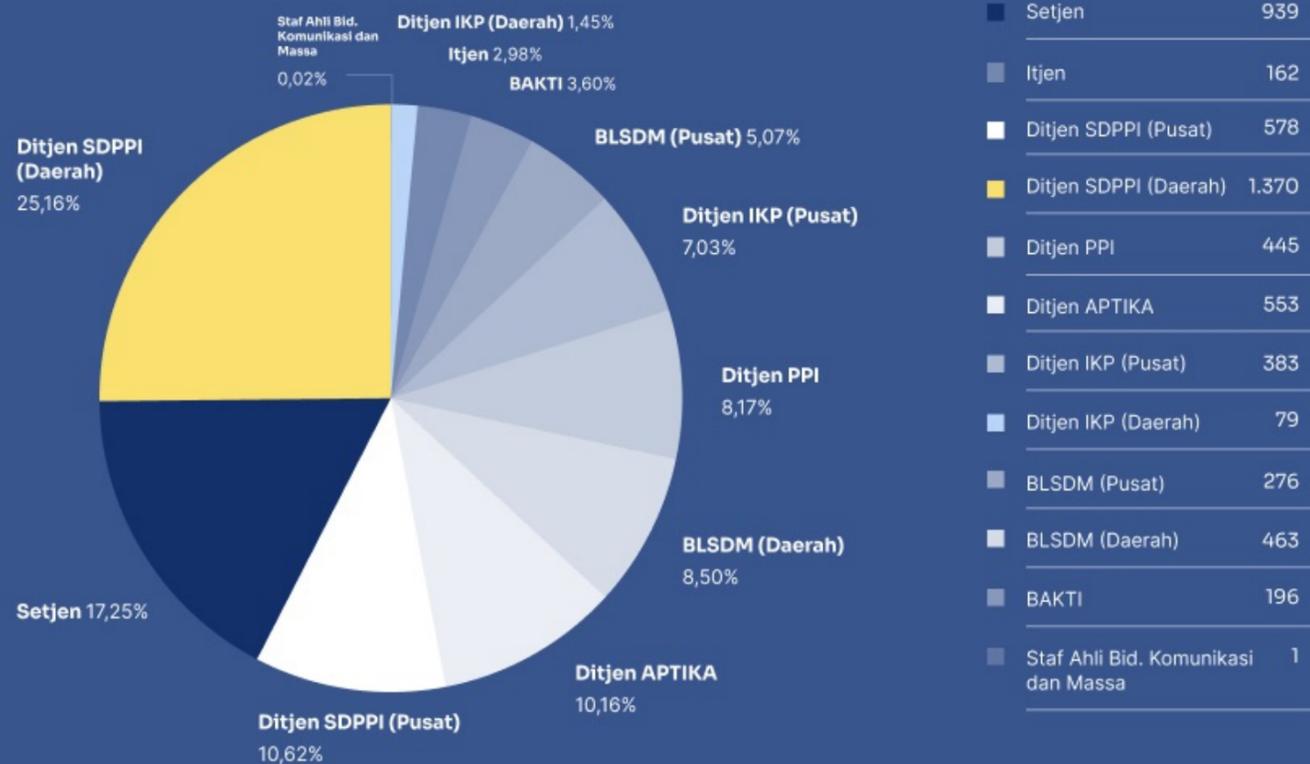
## 1.5 Komposisi Pegawai



▼ Grafik 1.2 Komposisi Pegawai berdasarkan Unit Kerja (per 31 Desember 2022)

▲ Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Kementerian Kominfo Berdasarkan Jenis Kelamin (per 31 Desember 2022)

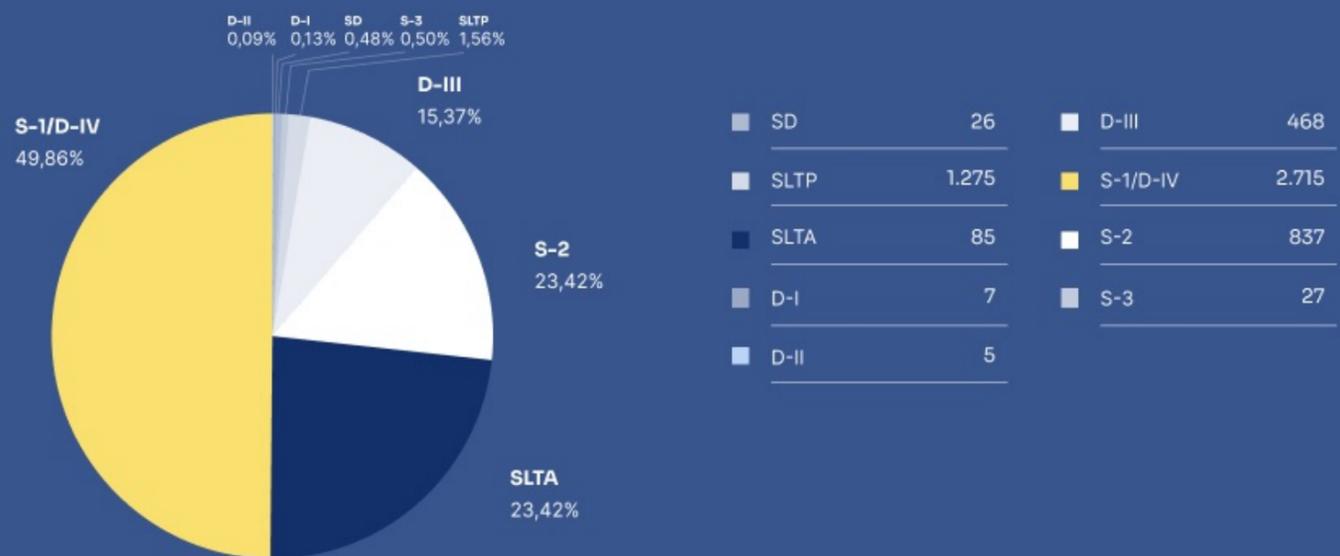
### Unit Kerja



▲ Grafik 1.3 Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang PNS Kementerian Kominfo (per 31 Desember 2022)

▼ Grafik 1.4 Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan (per 31 Desember 2022)

### Tingkat Pendidikan



## 1.6 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

### a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat, dan peran strategis Kementerian Kominfo terkait dukungan percepatan Transformasi Digital. Selain itu, diuraikan juga permasalahan strategis dan kebijakan yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

### 3. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan target kinerja Kementerian sesuai dengan dokumen PK.

### 4. Penghargaan

Pada subbab ini menyampaikan penghargaan-penghargaan yang diterima Kementerian Kominfo selama Tahun 2022.

### b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas nasional, rencana kerja tahun 2022-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

### d. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kementerian Kominfo, upaya perbaikan, inovasi dan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Kominfo untuk meningkatkan kerjanya.

### c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### 1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Kominfo yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja indikator kinerja PK.

#### 2. Kinerja Lainnya

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja di luar Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Kominfo yang mendukung program-program prioritas Kementerian Kominfo sesuai dengan hasil pengukuran kinerja indikator kinerja PK.

### e. Lampiran

Pada bagian ini menyajikan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah ditandatangani Menteri Kominfo, Rincian Target Kinerja Kementerian Kominfo tahun 2022, Pernyataan telah Direviu oleh Inspektorat Jenderal, dan Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko baik di internal maupun dengan pihak eksternal Kementerian Kominfo.



# Perencanaan Kinerja

## Bab II

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

- Keselarasan RPJMN TAHUN 2020—2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024
- Keselarasan RKP Tahun 2022 dengan Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2022
- Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022
- Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2022
- Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2022 78
- *Timeline Refocusing Anggaran*
- Proyek Kementerian Kominfo yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023
- Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023 83
- Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2023

Presiden Joko Widodo mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen formalitas dan betul-betul menjadi panduan.

Selain itu, rancangan perencanaan yang dibuat harus selaras dengan penganggaran, dan juga *ter-delivered* dengan baik oleh Kementerian. Sehingga menjadi rencana pemerintah dalam melangkah ke depan menuju Indonesia maju.

Tahun ketiga pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengusung visi "Terwujudnya Indonesia yang maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong." Lebih lanjut, visi tersebut diuraikan dalam RPJMN 2020—2024 melalui 9 (sembilan) misi, 5 (lima) arahan Presiden serta 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional.



## 2.1 Keselarasan RPJMN Tahun 2020—2024 dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020—2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selama periode 2020—2024, terdapat 5 (lima) fokus prioritas pembangunan yang meliputi:



### a. Pembangunan SDM



### b. Pembangunan Infrastruktur



### c. Penyederhanaan Regulasi



### d. Penyederhanaan Birokrasi



### e. Transformasi Ekonomi

Selanjutnya, kelima hal tersebut akan diimplementasikan dalam 7 Agenda Pembangunan (AP) atau juga dikenal dengan Prioritas Nasional (PN) meliputi:

Gambar 2.1 Visi dan Misi Presiden  
Sumber: Bappenas, 2020

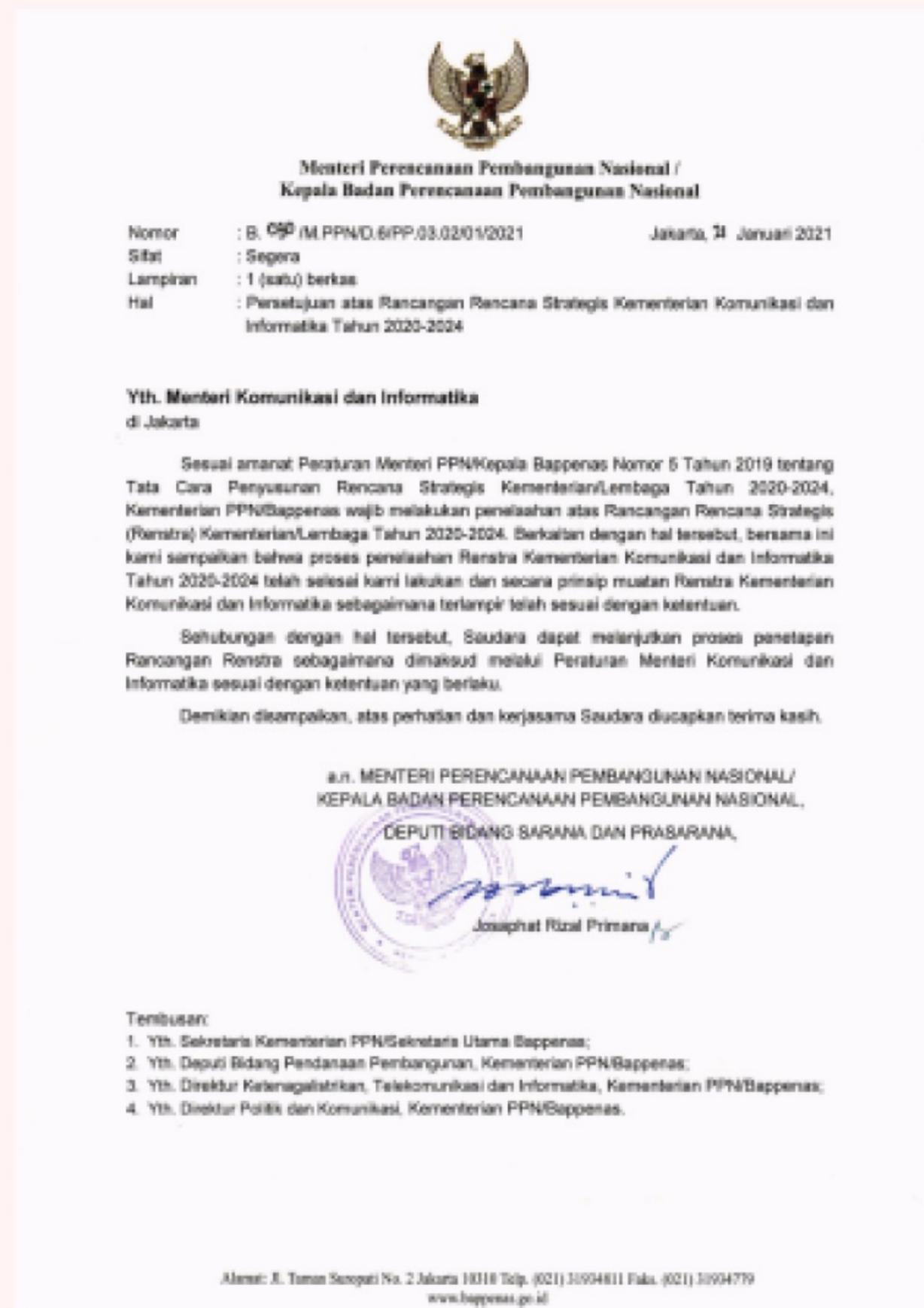


Pasca penetapan RPJMN, seluruh K/L termasuk Kementerian Kominfo diwajibkan untuk menyusun Renstra K/L. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020—2024. Renstra K/L merupakan penjabaran Visi Presiden yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 ini disusun dengan menyelaraskan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK serta pengelolaan dan penyebaran informasi dan komunikasi publik.

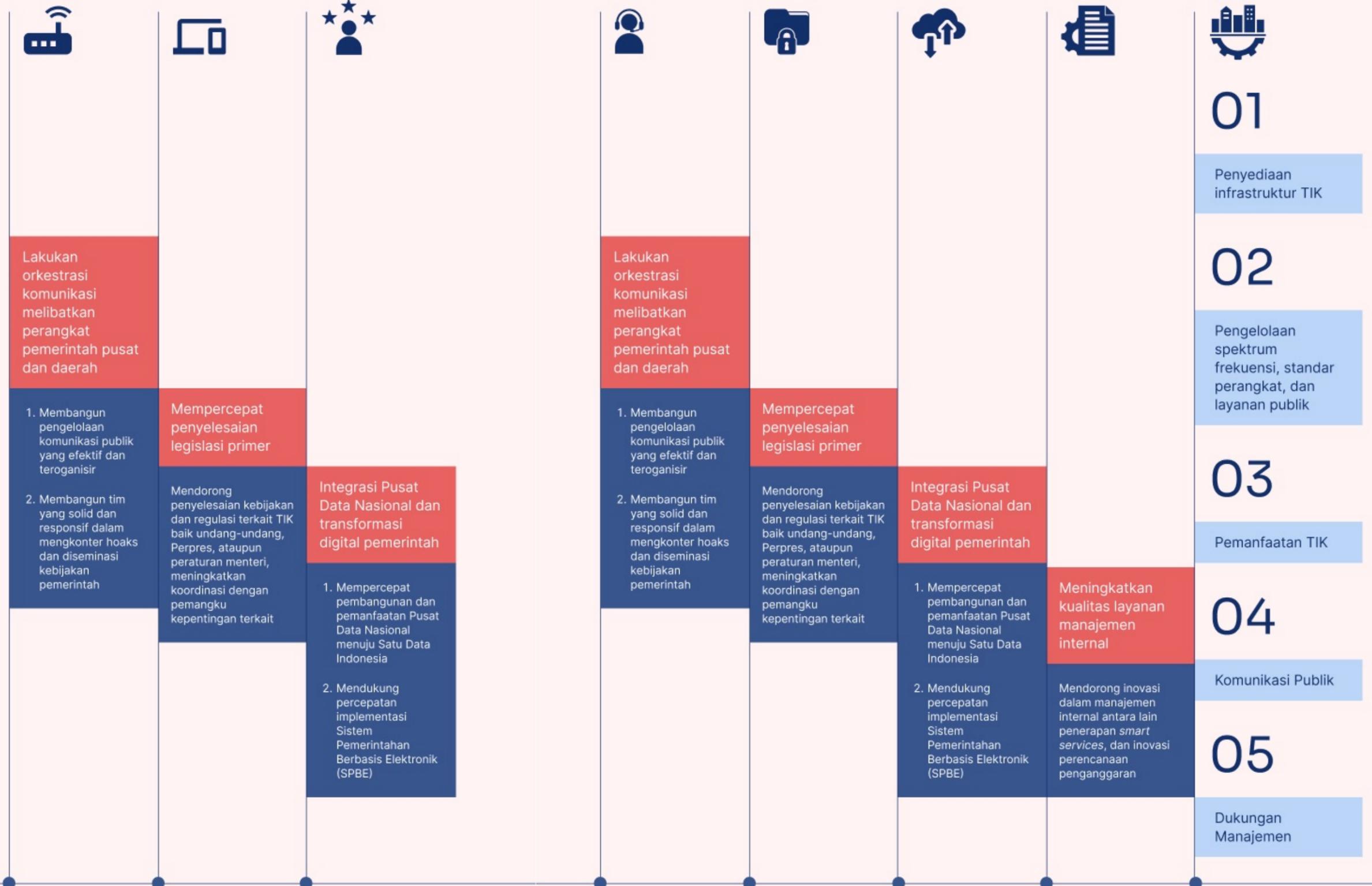
Sesuai amanat Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024, Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024. Berkaitan dengan hal tersebut, proses penelaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020—2024 telah selesai dilakukan pada tahun 2021 dan secara prinsip muatan Renstra Kementerian Kominfo telah sesuai dengan ketentuan.

Gambar 2. 2 Persetujuan Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024



Dalam mendukung pencapaian Tujuh Agenda Pembangunan (AP) atau Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2020—2024, Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024 berfokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Seperti yang dicantumkan di dalam RPJMN, Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional, baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya.

## Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kominfo



Gambar 2. 3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kominfo 2020—2024

Sumber: Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024

Agenda Pembangunan	Strategi dan Arah Kebijakan	UKE I
2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dalam rangka Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat</li> <li>Diseminasi kebijakan pemerintah terkait Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat</li> </ul>	DJIKP
3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dalam rangka mendukung Penurunan Stunting</li> <li>Diseminasi kebijakan pemerintah terkait mendukung Penurunan Stunting</li> </ul>	DJIKP
5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik</li> <li>Mempercepat digitalisasi penyiaran (<i>analog switch off</i>) untuk meraih <i>digital dividend</i></li> <li><i>Farming</i> dan <i>refarming</i> frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas</li> <li>Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi <i>next broadband</i> (5G)</li> <li>Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional</li> <li>Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman</li> <li>Meningkatkan literasi digital masyarakat</li> <li>Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia</li> <li>Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</li> </ul>	DJSDPPI, DJPPI, DJAPTIKA, BAKTI
7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital</li> <li>Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait</li> <li>Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir</li> </ul>	DJIKP, BLSDM, SETJEN

▲ Tabel 2.1 Dukungan Kementerian Kominfo dalam RPJMN yang Dituangkan Dalam Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024

Selama periode 2020-2024, Kementerian Kominfo mendapat tanggung jawab mendukung pencapaian target pada 4 Agenda Pembangunan, khususnya mendukung Program Prioritas Nasional Infrastruktur Perkotaan, Transformasi Digital, serta Konsolidasi Demokrasi. Dukungan tersebut telah dijabarkan ke dalam beberapa sasaran dan diimplementasikan melalui strategi dengan rincian sebagai berikut.

Agenda Pembangunan 2 “**Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**”, dapat dilaksanakan dengan memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah.

Agenda Pembangunan 3 “**Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing**”, Kementerian Kominfo diamanatkan untuk dapat berkontribusi dalam mendukung penurunan stunting melalui peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.

Agenda Pembangunan 5 “**Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**”, dilaksanakan dengan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui (a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; (b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; (c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; (d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan (e) Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

Agenda Pembangunan 7 “**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**”, Kementerian Kominfo akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui (a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan (e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Kementerian Kominfo juga turut serta mendukung pelaksanaan amanat/mandat Presiden Republik Indonesia yang disampaikan baik dalam rapat terbatas maupun sidang kabinet paripurna, antara lain:

a. Pada Sidang Kabinet Paripurna terkait Penanganan Pandemi COVID-19 dan Gejolak Ekonomi Global, Presiden RI memberikan sejumlah arahan sebagai berikut:

- Terkait penanganan pandemi COVID-19, pemerintah perlu memastikan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih terus diterapkan meskipun kasus aktif harian COVID-19 di Tanah Air sudah menurun
- Arahan selanjutnya adalah terkait dukungan seluruh jajaran Kementerian/ Lembaga dalam manajemen arus mudik dan arus balik Lebaran
- Sedangkan arahan ketiga yang berkaitan dengan kewaspadaan terhadap gejolak ekonomi global akibat perang Ukraina dan kebijakan moneter Amerika Serikat, Presiden meminta agar pengelolaan ekonomi makro dan mikro diikuti secara detail, utamanya yang berkaitan dengan pangan dan energi
- Arahan keempat, Presiden mengingatkan pentingnya kepekaan tinggi terkait krisis yang ada di Indonesia, mulai dari musim kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan, hingga penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak di Tanah Air
- Kemudian arahan kelima, Presiden mengingatkan pentingnya percepatan realisasi belanja APBN, APBD, dan BUMN yang berdampak kepada ekonomi rakyat. Terakhir, Presiden meminta para pejabat Kementerian/ Lembaga untuk tetap fokus bekerja pada tugas masing-masing agar agenda-agenda strategis yang menjadi prioritas nasional dapat diselenggarakan dengan baik, termasuk persiapan pemilu dapat terlaksana dengan baik, lancar dan tanpa gangguan

b. Pada Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, Presiden menekankan lima hal berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional di antaranya yaitu:

- Presiden meminta kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD
- Kedua, Presiden meminta para pemimpin Kementerian/Lembaga untuk mewaspadaikan serta mengalkulasi dan mengantisipasi dampak dari inflasi global. Maka dari itu, harus diantisipasi dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor
- Ketiga, untuk mengantisipasi potensi berlanjutnya pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia, Presiden menekankan bahwa APBN harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi. Selain itu, Presiden juga menekankan perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Ia meminta belanja rutinitas yang tidak perlu untuk segera dihilangkan dan digeser ke belanja yang bersifat produktif

- Keempat, Presiden mengungkapkan bahwa terdapat banyak komitmen investasi namun terkadang tidak dikawal dan dimonitor sehingga realisasinya menjadi lambat. Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk fokus mengawal dan menindaklanjuti komitmen investasi
- Arahan kelima terkait komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan (*renewable energy*). Presiden mengajak semua jajarannya untuk memastikan realisasi investasi berjalan dengan baik dalam rangka menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan

## 2.2 Keselarasan RKP Tahun 2022 dengan Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2022

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan RKP juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

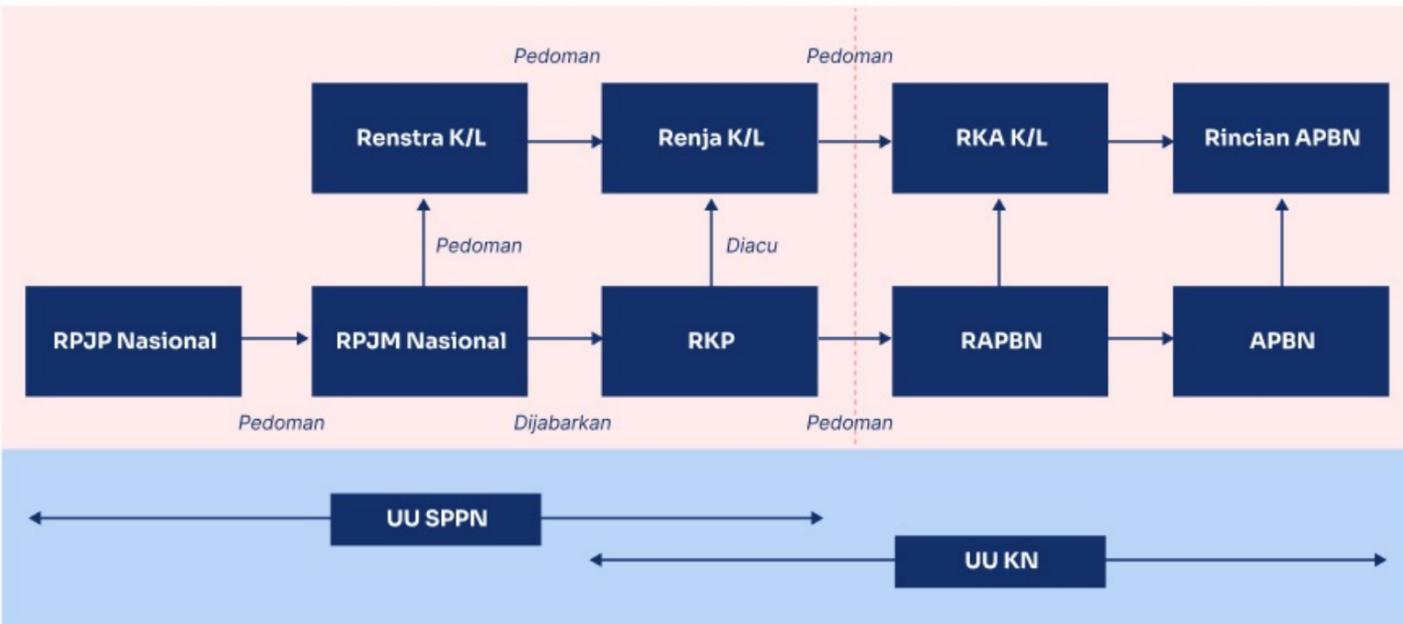
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan. RKP Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Sesuai dengan Pasal 5 Perpres tersebut, RKP Tahun 2022 dimutakhirkan berdasarkan pada UU APBN. Dengan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 APBN, maka dilakukan pemutakhiran RKP Tahun 2022.

Penyusunan RKP Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan pendekatan, penganggaran berbasis *Money Follow Program* serta pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Besarnya skala dan cakupan pembangunan tahunan nasional juga membutuhkan sinergi, integrasi, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Sinergi perencanaan pembangunan pusat dan daerah dilakukan melalui sinkronisasi berbagai rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan, serta melaksanakan integrasi berbagai sumber daya pembangunan, termasuk dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya nasional dalam pembangunan. Dengan demikian, RKP Tahun 2022 yang memuat arah kebijakan nasional tahunan, menjadi acuan bagi K/L, pemerintah daerah, dan para pihak terkait dalam menyusun perencanaan tahunan. Hal ini menjadi upaya bersama dari para pihak agar tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2022 dapat terwujud.

Renja adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kementerian Kominfo disusun dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Kominfo dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja harus didasarkan atas hasil kesepakatan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak (*trilateral meeting*) dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN (Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Penyusunan Rencana Kerja dibagi menjadi 3 tahapan yakni Rencana Kerja Pagu Indikatif, Rencana Kerja Pagu Anggaran, dan Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran.





▲ Gambar 2. 4 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN

Berdasarkan gambar 2.4 di atas, RKP harus merujuk pada RPJMN, dan selaras dengan Renja K/L. Selaras dengan RPJMN artinya RKP menjabarkan apa yang telah tercantum dalam RPJMN melalui pembangunan tahunan. Selaras dengan Renja K/L bahwa dalam penyusunan rancangan RKP harus memperhatikan rancangan Renja K/L.

Dalam kerangka tersebut, serta dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, target yang terdapat dalam RKP pada level nasional dan Renja K/L pada level Kementerian/Lembaga menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN dan dasar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga.

## 2.3 Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024

Rencana Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024, dan menjadi pedoman dalam arah kebijakan Kementerian Kominfo 5 (lima) tahun ke depan khususnya kebijakan bidang TIK. Bidang TIK merupakan bidang yang terus berkembang dan berubah dengan sangat cepat.

Kebijakan dan arah strategi yang ditetapkan dalam mengatur maupun menyelenggarakan

fungsi pemerintahan dalam bidang TIK harus dibuat secara *agile* dan tidak terbatas fleksibilitas tren teknologi.

Selanjutnya, dalam Renstra Kementerian Kominfo telah ditetapkan 3 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis tersebut mencerminkan *outcome* Kementerian Kominfo sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya diimplementasikan oleh seluruh unit eselon I. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kominfo pada Renstra Kementerian Kominfo tahun 2020 - 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

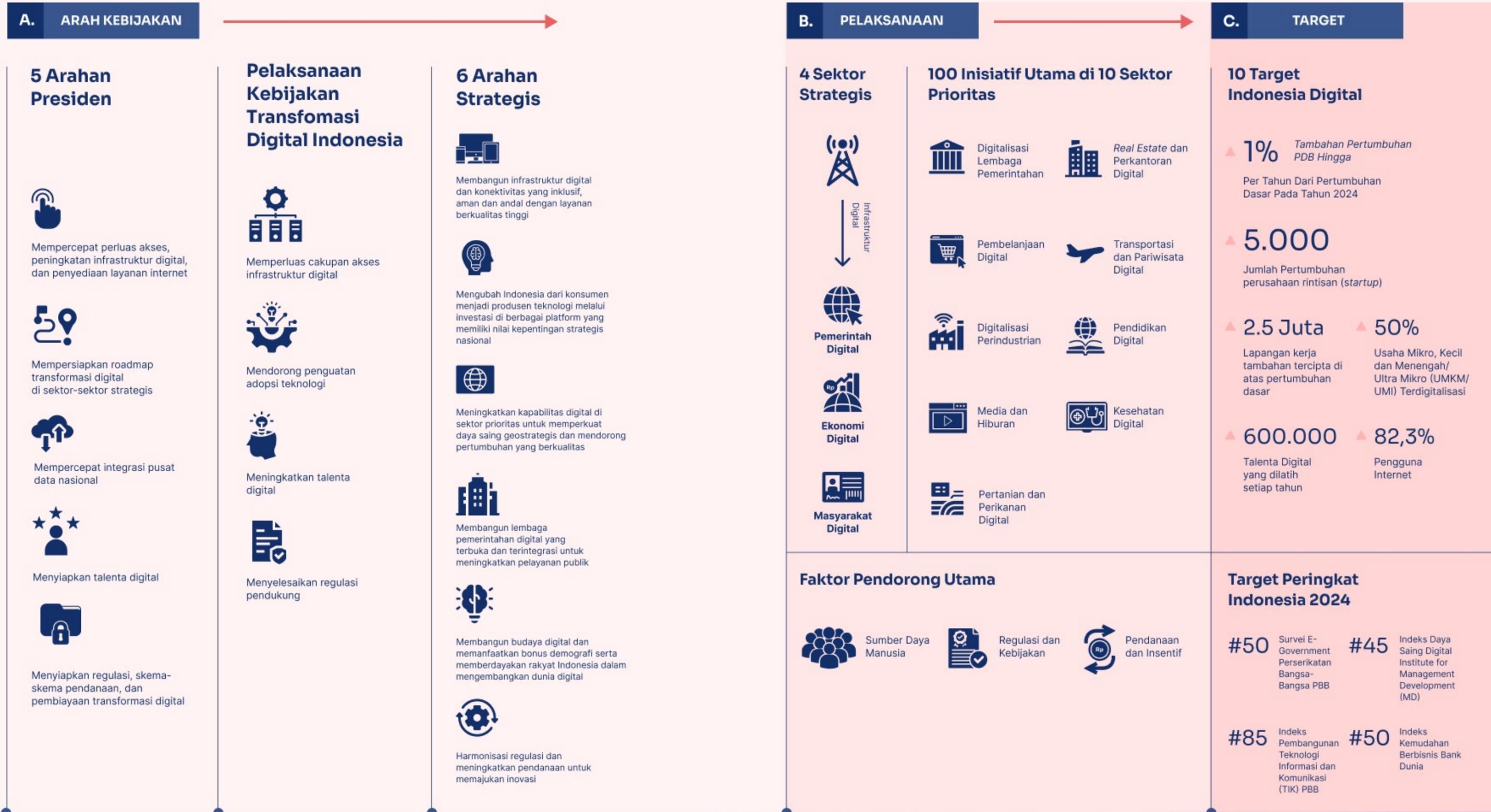
No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau</li> <li>Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital</li> <li>Meningkatnya konektivitas layanan pos</li> <li>Terwujudnya konektivitas <i>Next Generation Broadband Nasional</i></li> <li>Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika</li> </ul>
2	Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis</li> <li>Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital</li> <li>Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah</li> </ul>
3	Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik</li> </ul>

▲ Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Strategis pada Renstra Kementerian Kominfo tahun 2020-2024

# Indonesia Digital 2021 — 2024

Gambar 2. 5 Arah Kebijakan Transformasi Digital Nasional

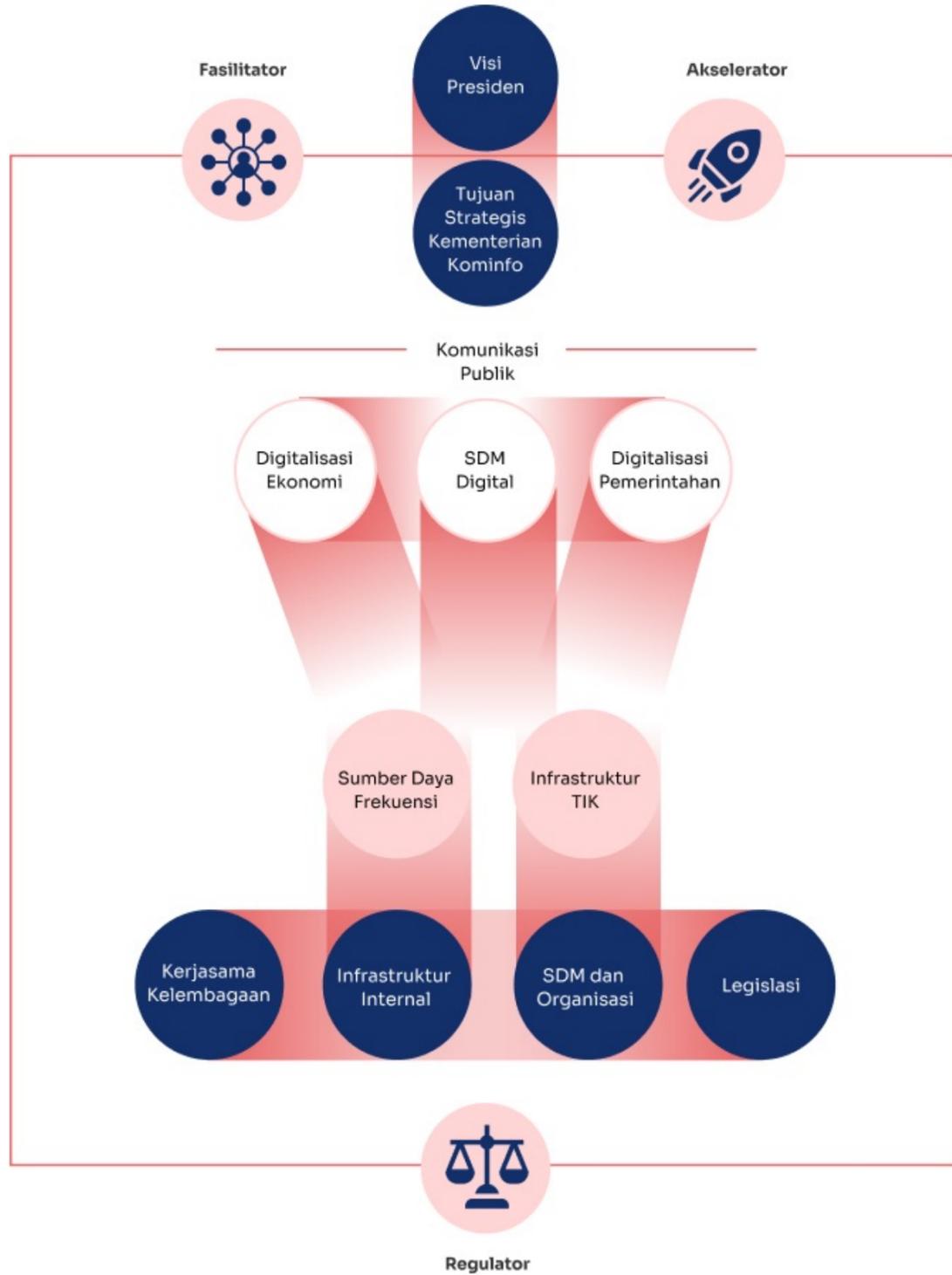
Sumber: Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024



Untuk mewujudkan arahan Presiden terkait percepatan transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo telah menyelaraskan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan serta strategi di dalam Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020–2024.

Gambar 2. 6 Kerangka Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024

Sumber: Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024 secara rinci dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target					
	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>SS.01</b>	<b>Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau</b>					
IKSS.01	Jumlah Desa Mendapatkan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T dan Non-3T (Kumulatif)	3T: 1.682 Desa/ Kelurahan	3T: 5.882 Desa/ Kelurahan Non-3T: 1.423 Desa/ Kelurahan	3T: 9.113 Desa/ Kelurahan Non-3T: 3.435 Desa/ Kelurahan	—	—
IKSS.02	Persentase (%) Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik <i>Broadband</i> (Kumulatif)	36,42	37,15	42,85	50	60
IKSS.03	Persentase (%) Rumah Tangga Terlayani Jaringan Internet Akses Terhadap Total Rumah Tangga (Kumulatif)	14,46	16,25	20,83	25,42	30
IKSS.04	Kapasitas Penyediaan Satelit Multifungsi (SATRIA 1 & 2) (Gbps)	Lelang	<i>Preparatory Work Agreement</i>	Konstruksi	SATRIA 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>Konstruksi Satelit</li> <li>Konstruksi Gateway</li> <li>Penyediaan <i>Ground Segment</i></li> <li>Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi</li> <li><i>Electrical orbit Raising</i> (EOR) dan <i>In Orbit Acceptance Review</i> (IOAR) <i>Satellite</i></li> <li>Uji Laik Operasi</li> <li>Peluncuran Satelit</li> <li><i>System Integration</i></li> <li>Operasional 150 Gbps</li> <li><i>IP Processing Hub</i> tambahan sebesar 140 Gbps</li> </ul>	SATRIA 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasional 150 Gbps</li> <li>Hub 140 Gbps</li> <li>IP Internet 150 Gbps</li> </ul> Hot Backup: Operasional 80 Gbps  SATRIA 2: Operasional 300 Gbps
					Hot Backup: <ul style="list-style-type: none"> <li>Konstruksi Satelit</li> <li>Peluncuran Satelit</li> <li>Operasional 80 Gbps</li> </ul>	

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.05	Persentase (%) Rasio Harga Layanan Jaringan <i>Mobile broadband</i> Terhadap Pendapatan per Kapita (Dilihat Rata-rata Kuota 1GB)	0,45	0,4	0,35	0,3	0,25
IKSS.06	Persentase (%) Rasio Harga Layanan <i>Fixed Broadband</i> Terhadap Pendapatan per Kapita (pada kecepatan Up To 30Mbps)	11	10	9	8	7
<b>SS.02 Meningkatkan Cakupan Wilayah Terlayani Penyiaran Digital</b>						
IKSS.01	Persentase (%) Jangkauan Populasi Penyiaran TV Digital (Kumulatif)	60	65	75	80	85
<b>SS.03 Meningkatkan Konektivitas Layanan Pos</b>						
IKSS.01	Persentase (%) Cakupan Layanan Pos (Kumulatif)	63	65	70	72	74
<b>SS.04 Terwujudnya Konektivitas Next Generation Nasional</b>						
IKSS.01	Jumlah Lokasi yang Terkoneksi 5G pada Tahap Awal Implementasi	—	—	—	11	2
<b>SS.05 Meningkatkan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Kualitas Pengelolaan Layanan Publik Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika</b>						
IKSS.01	Jumlah Penambahan Spktrum Frekuensi Radio (Kumulatif)	30 MHz	120 MHz	1120 MHz	1120 MHz	1310 MHz
IKSS.02	Jumlah Penyediaan Perangkat untuk Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio (Unit)	6	33	33	33	24

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.03	Persentase (%) Penyelesaian Laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagai Lab Rujukan Nasional (Kumulatif)	10	30	50	80	100
IKSS.04	Jumlah Dokumen Standar Teknis sebagai Pendukung Sertifikasi Perangkat Pos dan Informatika	6 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis	7 Standar Teknis
IKSS.05	Jumlah Capaian PNPB Bidang Pos dan Informatika	Rp20.842.460.081.285	Rp23.826.529.552.835	Rp23.660.742.694.785	Rp23.812.848.525.908	Rp24.571.039.152.075
IKSS.06	Indeks Kepuasan Publik Terhadap Layanan Publik Kementerian Kominfo	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5	>3,5
<b>SS.06 Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Sektor Ekonomi dan Bisnis</b>						
IKSS.01	Persentase (%) Tingkat Adopsi Teknologi Digital di Sektor Strategis dan Kawasan Prioritas (Kumulatif); 1. Pertanian 2. Pariwisata 3. Logistik 4. Maritim 5. Pendidikan 6. Kesehatan	0	15	25	50	100
IKSS.02	Jumlah UMKM yang <i>Scale Up</i> dari Usaha Mikro dan Kecil Menjadi Usaha Menengah dengan Adopsi Teknologi Digital (Kumulatif)	—	—	7.000	18.000	33.000
IKSS.03	Jumlah Penambahan Unicorn (Kumulatif)	—	—	1	2	3

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.04 Jumlah Startup Digital Aktif yang Terbentuk (Kumulatif)	20	35	70	110	150
IKSS.05 Persentase (%) Penyelektora Sistem Elektronik yang Patuh Terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	—	95	95	95	95
IKSS.06 Persentase (%) Implementasi UU PDP (Kumulatif)	Draft RUU PDP	30	50	70	90
IKSS.07 Persentase (%) Ketersediaan Riset dan Penelitian Bidang TIK	100	100	100	100	100
<b>SS.07 Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Digital</b>					
IKSS.01 Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK (Kumulatif)	213.143	12.653.750	25.102.500	37.551.250	50.000.000
IKSS.02 Jumlah SDM yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	28.986 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang	72.500 Orang
<b>SS.08 Dukungan Implementasi Digital Pemerintah</b>					
IKSS.01 Jumlah Penyediaan Pusat Data Nasional	—	—	2	—	—
IKSS.02 Persentase (%) Instansi yang Memanfaatkan Aplikasi Generik yang Dikembangkan Secara Multiplatform (Kumulatif)	15	30	40	50	70

Sasaran Strategis (SS) / Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
IKSS.03 Jumlah Kab./Kota di Kawasan Prioritas (5 Kawasan Super Prioritas dan 1 Kawasan IKN) yang Mengimplementasi Smart City (Kumulatif)	—	—	69	69	69
<b>SS.09 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>					
IKSS.01 Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (Kumulatif)	71	72	73	74	75
<b>SS.10 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>					
IKSS.01 Indeks SPBE (Sesuai Penilaian Kementerian PAN & RB Skala 1-5)	3,25	3,0	3,4	3,6	3,8
IKSS.02 Indeks Reformasi Birokrasi	76,5	78	80	82	84
IKSS.03 Nilai Opini Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Menurut Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKSS.04 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kominfo (AKIP)	67	68,5	70,5	72,5	75
IKSS.05 Indeks Kompetensi Pegawai Kementerian Kominfo	—	85	85	90	90

▲ Tabel 2.3 Sasaran Strategis Kementerian Kominfo 2020—2024

Dalam kerangka prioritas pembangunan nasional, Kementerian Kominfo sebagai *leading sector* pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional, menyadari bahwa infrastruktur digital Indonesia perlu dituntaskan lebih cepat, digitalisasi pada sektor ekonomi dan sektor pemerintahan juga perlu disegerakan, dan akselerasi kompetensi SDM talenta digital juga sudah mendesak.

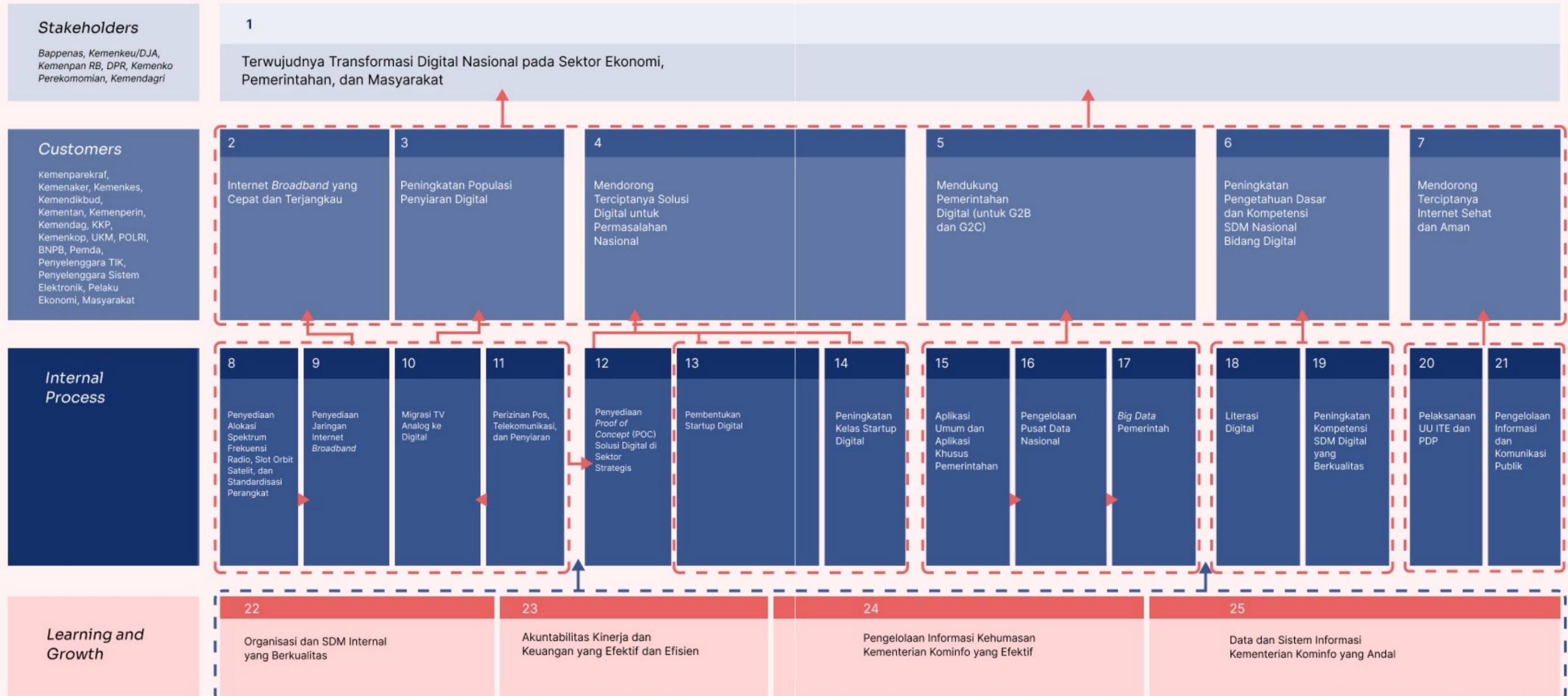
Namun, untuk mewujudkan cita-cita bersama menjadi “Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju!” hilirisasi pada semua sektor perlu dikawal dan dilaksanakan secara simultan. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo tentu tidak bisa berjalan sendiri. Pergerakan harus dilakukan bersama antar seluruh perangkat pemerintahan, lapisan masyarakat, dan pelaku usaha untuk mewujudkan transformasi digital nasional yang sukses.

Dalam menghubungkan tujuan strategis dan sasaran strategis Kementerian Kominfo, dilakukan pemetaan terhadap tujuan strategis sebagai kerangka kerja untuk mengembangkan dan menerapkan strategi berdasarkan empat perspektif yaitu, *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, yang dijabarkan lebih jelas dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2. 7 Peta Strategi Kementerian Kominfo Tahun 2020—2024

## Visi Presiden

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”



## 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu. Tujuan khusus dari Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Target 2022
1	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	1. Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G	11.661 Desa/Kelurahan (Kumulatif)
		2. Persentase (%) Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk Layanan <i>Broadband</i> Sebesar 90 MHz	100%
2	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital	75% (196.565.321 dari 262.087.095 Orang)
3	Meningkatnya Pemahaman, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital	1. Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK	5.500.000 Orang
		2. Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	202.675 Peserta
4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	73%
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80 (skala 1-100)

▲ Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022

## 2.5 Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2022

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merumuskan Prioritas Nasional (PN) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. RKP Tahun 2022 telah menyepakati Prioritas Nasional (PN) yang meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

7. Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Prioritas Nasional (PN) diterjemahkan lebih lanjut dalam Program Prioritas (PP) yang kemudian dirinci dalam Kegiatan Prioritas (KP) serta dijabarkan dalam bentuk Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) yang akan didukung oleh Proyek Pendukung Pro-PN pada setiap Kementerian/Lembaga yang terkait.

Kementerian Kominfo mendukung 4 (empat) Prioritas Nasional yaitu PN 2, PN 3, PN 5 dan PN 7 yang diwujudkan dalam proyek prioritas dan menjadi output pada Renja Tahun 2022. Mengacu pada tugas dan fungsi Kementerian Kominfo, pada tahun 2022 Kementerian Kominfo mendukung 4 (empat) pencapaian prioritas nasional 2022 yang dijabarkan pada gambar berikut ini:

### Dukungan Kementerian Kominfo

#### ○ Prioritas Nasional 2

Prioritas Nasional	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Program Prioritas	Pembangunan Wilayah Papua
Kegiatan Prioritas	Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Proyek Prioritas Nasional	Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM
Output	Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

▲ Gambar 2. 8 Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 2

#### ○ Prioritas Nasional 3

Prioritas Nasional	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Program Prioritas	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Prioritas	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Proyek Prioritas Nasional	Penurunan Stunting
Output	Diseminasi Informasi Mengenai Stunting

▲ Gambar 2. 9 Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 3

## Dukungan Kementerian Kominfo

### ○ Prioritas Nasional 5

▼ Gambar 2. 10 Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 5  
Sumber: Perpres No. 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022

Prioritas Nasional	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar										
Program Prioritas	Infrastruktur Perkotaan	Transformasi Digital									
Kegiatan Prioritas	Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Penuntasan Infrastruktur TIK			Pemanfaatan Infrastruktur TIK					Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	
Proyek Prioritas Nasional	Pengembangan TIK Perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Pitallebar	Masterplan Smart City Pengembangan Infrastruktur Penyiaran	Pengembangan Infrastruktur TIK Pemerintahan	Pemanfaatan TIK Layanan Pemerintah	Pemanfaatan Layanan TIK Masyarakat Dan Usaha	Pengelolaan Informasi Secara Aman Dan Terintegrasi	Pengembangan Literasi Dan Keahlian TIK	Pengembangan Dan Fasilitasi Industri Tik		
Output	Masterplan Smart City	Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Spektrum Frekuensi Radio SMFR Infrastruktur SIMS Layanan Publik Bid. Telekomunikasi Layanan Publik Bid. Pos Penetrasi Fixed BB Akses Internet Tetap Pitallebar OM Pusat Monitoring Tel Kab/kota yang Menerapkan Infrastruktur Pasif Rekomendasi Kebijakan Implementasi 5G Rekomendasi Kebijakan UU Cipta Kerja Bid. Pos Kerja Sama Badan Usaha BTS/Lastmile BTS/Lastmile Papua dan Papua Barat Om BTS/Lastmile Om BTS/Lastmile Papua dan Papua Barat Penyediaan Kapasitas Satelit OM Palapa Ring OM Akses Internet OM Akses Internet Papua dan Papua Barat	Rekomendasi Kebijakan Optimalisasi Spektrum Frekuensi Radio Untuk Digitalisasi Penyiaran Layanan Publik Bid. Penyiaran Pusat Monitoring Pos dan Penyiaran Rekomendasi Pemerintah Regulasi/ Kebijakan Dampak Dari UU Cipta Kerja Beserta Turunannya Lembaga Penyiaran Bertransformasi Ke Penyiaran Digital Dukungan Infrastruktur Sistem Penyiaran TV Digital Dukungan Ekosistem Siaran Layanan TV Digital Digital Broadcasting System (DBS)	Data Center Nasional	Penyelenggaraan Aplikasi Cloud SPBE Penyelenggaraan Dukungan Teknologi Informasi Pada SPPT-TI	Inisiatif Digital Sektor Strategis Adopsi Teknologi Digital UMKM Business Matchmaking Startup Digital Digital Technopreneur	Penanganan dan Penanggulangan Konten Negatif Pengendalian Tata Kelola dan Transaksi PSE	Literasi Digital	Penerimaan Serta Penanganan Piutang dan Akuntabilitas PNBK BHP FREKRAD dan SOR Koordinasi Nasional Identifikasi, Implementasi, dan Pengendalian IMEI Pengembangan Laboratorium BBPPT dan Sarana Pendukung		

## Dukungan Kementerian Kominfo

### ● Prioritas Nasional 7

▼ Gambar 2. 11 Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 7  
 Sumber: Perpres No. 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2022

Prioritas Nasional	Memperkuat Stabilitas Polhuhankam dan Transformasi Pelayanan Publik												
Program Prioritas	Konsolidasi Demokrasi					Penegakan Hukum Nasional							
Kegiatan Prioritas	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik					Penataan Regulasi							
Proyek Prioritas Nasional	Penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pusat dan Daerah	Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik Secara Merata dan Berkeadilan Terutama di Wilayah 3T	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Literasi TIK Masyarakat		Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran	Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	Pembaruan Substansi Hukum			
Output	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Diseminasi Informasi Bidang Polhukam	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat Di Wilayah Kerja BBSDMP (Makassar, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Manado, dan BPPTIK)	Kajian Kesiapan Penerapan Big Data Pemerintah	Survey Indeks Kemerdekaan Pers	Indeks Kualitas Program Siaran Televisi	Kebijakan Transformasi Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi	Rancangan Peraturan Pemerintah Pelindungan Data Pribadi				
	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Diseminasi Informasi Bidang PMK	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBSDMP (Makassar, Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Manado)								Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers	Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio	Pengembangan dan Penerapan <i>Data Protection Officer</i>
	Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah	Diseminasi Informasi Bidang Perekonomian dan Maritim	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK								Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan	Layanan Pengawasan Siaran TV dan Radio	
	Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik	Diseminasi Informasi Melalui Media Kominfo											
	Pelaksanaan Urusan IKP	Diseminasi Informasi di Wilayah 3T Melalui Mitra Strategis	Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika								Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers		
			Digital Talent Scholarship										
			Digital Talent Scholarship di Pusdiklat										
			Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBSDMP (Makassar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Manado)										
			Digital Talent Scholarship di BPPTIK										
			Sertifikasi Berbasis SKKNI Bidang Kominfo										

## 2.6 Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2022

Berdasarkan hasil trilateral meeting pembahasan Renja Tahun 2022 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat 5 (lima) program pada Renja Kementerian Kominfo pada Tahun 2022 yaitu Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),

Program Komunikasi Publik, Program Penataan Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, dan Program Dukungan Manajemen. Adapun rincian Renja Kementerian Kominfo Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>			
<b>Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan <i>Broadband</i> di Wilayah Komersial</b>			
Ditjen PPI	01.01	Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses <i>fixed broadband</i> terhadap rumah tangga	20,83
	01.02	Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik <i>broadband</i>	61
	01.03	Jumlah desa/kelurahan non 3T yang mendapatkan akses jaringan <i>mobile broadband</i> (4G)	3.435
	01.04	Persentase (%) tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Qos, QoE, dan aduan masyarakat	100
	01.05	Rata-rata kecepatan internet <i>mobile broadband</i> di wilayah Indonesia	17,18
	01.06	Rata-rata kecepatan internet <i>fixed broadband</i> di wilayah Indonesia	23,06
<b>Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital</b>			
Ditjen PPI	02.01	Persentase populasi yang terjangkau penyiaran TV digital	75
	02.02	Jumlah regulasi/Kebijakan terkait penyiaran digital dan aturan pelaksanaannya	1
	02.03	Jumlah lembaga penyiaran yang bertransformasi ke penyiaran digital	697

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos</b>			
Ditjen PPI	03.01	Persentase (%) kecamatan yang tercakup layanan pos	70
	03.02	Jumlah rekomendasi kebijakan hasil evaluasi implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya bidang Pos	1
	03.03	Jumlah desain prangko nasional yang disahkan	12
<b>Terwujudnya Pengembangan <i>Mobile High-Speed Broadband</i></b>			
Ditjen PPI	04.01	Jumlah kebijakan/regulasi implementasi dan penyelenggaraan 5G di Indonesia	1
<b>Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan <i>Broadband</i> di Wilayah Non-komersial</b>			
BAKTI	05.01	Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G (kumulatif)	8.226
	05.02	Jumlah lokasi penyediaan akses internet di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, kawasan prioritas, dan lokasi layanan publik (kumulatif)	9.463
	05.03	Persentase (%) pemanfaatan kapasitas Palapa Ring dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) minimal 95%	40
	05.04	Jumlah sewa kapasitas satelit	25
	05.05	Persentase (%) konstruksi kapasitas penyediaan satelit multifungsi (Satria I) (kumulatif)	70
	05.06	Persentase Pengadaan KPBU Palapa Ring Integrasi	100
<b>Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>			
<b>Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK</b>			
BLSDM	01.01	Jumlah peserta pelatihan digital skill a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) b. SKKNI	200.000
	01.02	Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu	90
	01.03	Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif)	2.237

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK</b>			
BLSDM	01.04	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (kumulatif)	1
<b>Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet</b>			
Ditjen APTIKA	02.01	Jumlah regulasi / kebijakan dan Implementasi turunan PP 71 tahun 2019	3
	02.02	Maksimal durasi pemutusan akses/pemblokiran PSE terhadap konten yang melanggar ketentuan perundangan undangan	3
	02.03	Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	95
	02.04	Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun	175.000
	02.05	Persentase (%) penyelesaian regulasi PDP dan peraturan turunannya (kumulatif)	60
	02.06	Persentase (%) pengembangan ekosistem PDP nasional (kumulatif)	40
<b>Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah</b>			
Ditjen APTIKA	03.01	Persentase (%) aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif)	40
Ditjen PPI	03.02	Persentase (%) Kab/Kota yang mengimplementasikan sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan	20
	03.03	Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional	2
Ditjen APTIKA	03.04	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi menyusun <i>masterplan smart city</i> (kumulatif)	50
	03.05	Jumlah Kota/kabupaten pada kawasan pariwisata superprioritas dan kota/kabupaten yang berada di sekitar kawasan IKN yang difasilitasi menyusun <i>masterplan smart city</i>	48
<b>Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital</b>			
Ditjen APTIKA	04.01	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (kumulatif)	5.500.000

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital</b>			
	05.01	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis (kumulatif)	25
	05.02	Persentase Kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk adopsi teknologi digital (kumulatif)	30
Ditjen APTIKA	05.03	Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)	80
	05.04	Persentase startup digital yang berhasil naik kelas	5
	05.05	Jumlah <i>Scale Up</i> UMKM Adopsi Teknologi Digital	7.000
<b>Program Komunikasi Publik</b>			
<b>Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah</b>			
	01.01	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah	73
	01.02	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah	73
Ditjen IKP	01.03	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	65
	01.04	Persentase (%) berita hoaks yang berhasil dikonter	70
	01.05	Persentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) sesuai dengan peraturan yang berlaku	75
Set. IKP	01.06	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	72
<b>Meningkatnya kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik</b>			
Ditjen IKP	02.01	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D yang ditetapkan	3
<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi</b>			
Set. Dewan Pers	03.01	Indeks Kemerdekaan Pers	76

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi</b>			
Set. KPI	03.02	Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	15
Dit. IKP	03.03	Persentase (%) pelayanan informasi dan pelestarian bidang pers dan komunikasi dan informasi	100
<b>Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik</b>			
<b>Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio</b>			
Ditjen SDPPI	01.01	Persentase Rancangan Kebijakan dalam rangka mendukung Penambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk layanan broadband sebesar 90 MHz	100
	01.02	Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi yang mendukung peningkatan konektivitas broadband	2
	01.03	Persentase optimalisasi dan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk public service dan pemerintah	100
<b>Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
Ditjen SDPPI	02.01	Persentase (%) penanganan gangguan spektrum yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan	98
	02.02	Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)	65
	02.03	Persentase (%) layanan monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban serta pelayanan publik spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi	100
<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBPN</b>			
Ditjen PPI	03.01	Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran	3,5
Ditjen SDPPI	03.02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	> 3,5
Ditjen APTIKA	03.03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Bidang Aplikasi Informatika	> 3,5
Ditjen PPI	03.04	Indeks minimum integritas pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran	8,2
Ditjen SDPPI	03.05	Indeks integritas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	>8,2
Ditjen PPI	03.06	Jumlah target PNBPN bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi	1.197.250.405.306
Ditjen SDPPI	03.07	Persentase (%) Capaian target PNBPN bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	100
Ditjen APTIKA	03.08	Persentase (%) Capaian Target PNBPN Bidang Aplikasi Informatika	100

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Meningkatnya pengembangan ekosistem industri perangkat TIK</b>			
Ditjen SDPPI	04.01	Jumlah regulasi dan/atau standardisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi	7
	04.02	Persentase pengembangan laboratorium pusat pengujian perangkat TIK	50
<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
<b>Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien</b>			
SETJEN	01.01	Indeks SPBE (sesuai penilaian MenPAN skala 1-5)	3,4
	01.02	Indeks Reformasi Birokrasi	80
	01.03	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kemkominfo	70,5
	01.04	Nilai Opini Laporan Keuangan di lingkungan Kementerian Kominfo menurut kriteria	WTP
	01.05	Nilai SPIP Kemkominfo	3,25
	01.06	Nilai Kinerja Anggaran Kominfo	87
	01.07	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan	3,74
	01.08	Persentase (%) realisasi rencana penyederhanaan regulasi Kominfo	100
	01.09	Indeks kompetensi pegawai Kemkominfo	85
	SDPPI, PPI, APTIKA, IKP, BLSDM	01.10	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Eselon I
01.11		Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas LK Eselon I Berdasarkan Hasil Pengawasan BPK	1
01.12		Nilai Kinerja Anggaran Eselon I	87
BAKTI	01.25	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan BAKTI	1
ITJEN	01.26	Persentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kemkominfo	1
	01.27	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Kemkominfo	1
	01.28	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Kemkominfo	70
	01.29	Nilai Penguatan Pengawasan di Kemkominfo	30
	01.30	Nilai RB di Itjen	4,94

▲ Tabel 2. 5 Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo 2022

## 2.7 Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2022

# Rp26.671 miliar

Pagu alokasi anggaran tahun 2022 Kementerian Kominfo dialokasikan untuk 5 (lima) program prioritas, yaitu:

1. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp19.103 miliar
2. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp4.539 miliar
3. Program Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp704 miliar
4. Program Komunikasi Publik dengan total kebutuhan sebesar Rp489 miliar
5. Program Dukungan Manajemen dengan total kebutuhan sebesar Rp1.835 miliar

Gambar 2. 12 Alokasi Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2022

<p><b>SETJEN</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp67.089.402.000</p> <p>Belanja Barang Rp444.543.878.000</p> <p>Belanja Modal Rp76.431.185.000</p>	<p><b>ITJEN</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp15.745.784.000</p> <p>Belanja Barang Rp71.078.059.000</p> <p>Belanja Modal Rp2.097.700.000</p>	<p><b>Ditjen SDPPI</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp180.861.206.000</p> <p>Belanja Barang Rp580.706.995.000</p> <p>Belanja Modal Rp491.831.406.000</p>
<p><b>Ditjen PPI</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp45.450.430.000</p> <p>Belanja Barang Rp662.995.559.000</p> <p>Belanja Modal Rp206.110.557.000</p>	<p><b>Ditjen APTIKA</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp36.188.115.000</p> <p>Belanja Barang Rp1.400.741.462.000</p> <p>Belanja Modal Rp2.529.002.602.000</p>	<p><b>Ditjen IKP</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp42.527.909.000</p> <p>Belanja Barang Rp456.476.202.000</p> <p>Belanja Modal Rp8.941.291.000</p>
<p><b>Balitbang SDM</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp81.440.564.000</p> <p>Belanja Barang Rp609.950.804.000</p> <p>Belanja Modal Rp157.921.344.000</p>	<p><b>BAKTI</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp2.108.572.000</p> <p>Belanja Barang Rp8.331.691.536.000</p> <p>Belanja Modal Rp10.069.657.494.000</p>	<p><b>2022</b></p>



## 2.8 Timeline Refocusing Anggaran

▼ Gambar 2.13 Linimasa Refocusing Anggaran Kementerian Kominfo TA 2022

Kementerian Kominfo telah melakukan beberapa kebijakan *refocusing*, realokasi, dan penghematan belanja pada pagu alokasi anggaran Kementerian Kominfo tahun 2022. Berikut linimasa *refocusing* dan realokasi anggaran Kementerian Kominfo di sepanjang tahun 2022:



## 2.9 Proyek Kementerian Kominfo yang mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023



Sumber foto: <https://www.indonesiatech.id>

Kementerian PPN/Bappenas merumuskan Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Selanjutnya dilakukan pembahasan melalui *multilateral meeting* yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L). Penyelenggaraan *multilateral meeting* oleh Kementerian PPN/Bappenas dilakukan secara terpisah dan paralel sesuai bidang Prioritas Nasional yang melibatkan K/L yang berkontribusi dalam Prioritas Nasional (PN). RKP Tahun 2022 dengan tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", menyepakati Prioritas Nasional yang meliputi

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, perubahan iklim, serta,
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Setelah dilakukan pembahasan dan harmonisasi dalam forum *multilateral meeting* yang dilanjutkan dengan *trilateral meeting* penyusunan Renja Kementerian/Lembaga Tahun 2022, disepakati bahwa Kementerian Kominfo pada tahun 2022 memiliki proyek-proyek yang mendukung pencapaian 4 (empat) Prioritas Nasional, yaitu PN (2) K, PN (3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, PN (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dan PN (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

### Dukungan Kementerian Kominfo

#### ○ Prioritas Nasional 2

Prioritas Nasional	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Program Prioritas	Pembangunan Wilayah Papua
Kegiatan Prioritas	Kelembagaan dan Keuangan Daerah
Proyek Prioritas Nasional	Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan Tetap Menghormati HAM
Output	Diseminasi Informasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat

▲ Gambar 2. 14 Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 2

Sumber: Perpres No. 108 Tahun 2022 tentang RKP Tahun 2023

#### ○ Prioritas Nasional 3

Prioritas Nasional	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Program Prioritas	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Prioritas	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Proyek Prioritas Nasional	Penurunan Stunting
Output	Diseminasi Informasi Mengenai Stunting

▲ Gambar 2. 15 Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 3

Sumber: Perpres No. 108 Tahun 2022 tentang RKP Tahun 2023



## Dukungan Kementerian Kominfo

### ○ Prioritas Nasional 7

▼ Gambar 2. 17 Dukungan Kementerian Kominfo terhadap Pencapaian Prioritas Nasional 7

Sumber: Perpres No. 108 Tahun 2022 tentang RKP Tahun 2023

Prioritas Nasional	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik									
Program Prioritas	Konsolidasi Demokrasi					Penegakan Hukum Nasional			Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	
Kegiatan Prioritas	Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik					Penataan Regulasi			Transformasi Pelayanan Publik	Transformasi Manajemen SDM Aparatur
Proyek Prioritas Nasional	Pengembangan TIK Perkotaan	Penyediaan Konten dan Akses Informasi Publik Secara Merata dan Berkeadilan Terutama di Wilayah 3T	Peningkatan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Peningkatan Literasi TIK Masyarakat	Penguatan Peran Lembaga Pers dan Jurnalis	Peningkatan Kualitas Lembaga Penyiaran	Penguatan Tata Kelola Dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	Pembaruan Substansi Hukum	Penguatan Pengawasan Masyarakat Atas Kinerja Pelayanan Publik	Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding
<b>Output</b>	Rekomendasi Hasil Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Diseminasi Informasi Bidang Polhukam	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika	Pelatihan Pengenalan TIK Bagi Masyarakat di Wilayah Kerja BBSDMP (Makassar, Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin, Manado, dan BPPTIK)	Rekomendasi Hasil Survey Indeks Kemerdekaan Pers	Rekomendasi Hasil Peningkatan Lembaga Penyiaran TV	Penguatan Tata Kelola dan Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	Pembaruan Substansi Hukum	Rekomendasi Hasil Survey Indeks PIKP	Bimtek Bidang Komunikasi Publik
	Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Diseminasi Informasi Bidang PMK	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah BBSDMP (Makassar, Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Manado)		Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers	Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Konten Siaran TV dan Radio	Strategi Penanganan Isu Undang Undang Pelindungan Data Pribadi	Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi		
	Pengawasan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah	Diseminasi Informasi Melalui Media Kominfo	Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informatika BPPTIK		Pelatihan Jurnalis dan Fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan	Pengawasan Siaran TV dan Radio		Pengembangan dan Penerapan Data Protection Officer		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP)	Diseminasi Informasi di Wilayah 3T Melalui PIP	Beasiswa S2/S3 Bidang Komunikasi dan Informatika		Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kasus Pers dan Layanan Saksi Ahli Pers					
	Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Publik		Digital Talent Scholarship							
	Diseminasi Informasi Kebijakan dan Program Prioritas Melalui Mitra Strategis		Digital Talent Scholarship di Pusdiklat							
			Digital Talent Scholarship di Wilayah Kerja BBSDMP (Makassar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Manado)							
			Digital Talent Scholarship di BPPTIK							
		Sertifikasi Berbasis SKKNI Bidang Kominfo								

## 2.10 Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo Tahun 2023

Berdasarkan hasil *trilateral meeting* pembahasan Renja Tahun 2023 dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, terdapat 5 (lima) program pada Renja Kementerian Kominfo pada Tahun 2023. Secara rinci 5 (lima) program pada Renja Kementerian Kominfo pada

tahun 2023, yaitu Program Penyediaan Infrastruktur TIK, Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik, Program Pemanfaatan TIK, Program Komunikasi Publik, dan Program Dukungan Manajemen.

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>			
<b>Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan <i>Broadband</i> di Wilayah Komersial</b>			
Ditjen PPI	01.01	Persentase pemetaan Desa/Kelurahan di wilayah non 3T di Indonesia yang akan difasilitasi peningkatan kualitas layanan seluler 4G (total desa berdasarkan konsolidasi data dari sigmon dan signal.kominfo.go.id)	100
	01.02	Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik <i>broadband</i> (Kumulatif)	62
	01.03	Persentase (%) rumah tangga terlayani jaringan internet akses <i>fixed broadband</i> terhadap total rumah tangga	25,42
	01.04	Persentase (%) tindak lanjut hasil pengawasan terhadap QoS, QoE, dan aduan masyarakat	100
	01.05	Rata-rata kecepatan internet <i>mobile broadband</i> di wilayah Indonesia	18,59
	01.06	Rata-rata kecepatan internet <i>fixed broadband</i> di wilayah Indonesia	24,03
<b>Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital</b>			
Ditjen PPI	02.01	Persentase populasi yang terjangkau penyiaran TV digital (Kumulatif)	80
	02.02	Jumlah regulasi/kebijakan terkait penyiaran digital dan aturan pelaksanaannya	3

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pos</b>			
Ditjen PPI	03.01	Persentase (%) kecamatan yang tercakup layanan pos	100
	03.02	Jumlah desain prangko nasional yang disahkan	12
<b>Terwujudnya Pengembangan <i>Mobile High-Speed Broadband</i></b>			
Ditjen PPI	04.01	Jumlah lokasi yang terkoneksi 5G pada tahap awal implementasi	11
<b>Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan <i>Broadband</i> di Wilayah Non-komersial</b>			
BAKTI	05.01	Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler BTS 4G (kumulatif)	7.082
	05.02	Jumlah lokasi penyediaan akses internet <i>broadband</i> termasuk 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di kawasan prioritas (kumulatif)	36.565
	05.03	Persentase (%) pemanfaatan Kapasitas Palapa Ring dengan <i>Service Level Agreement</i> (SLA) minimal 95%	45
	05.04	Jumlah sewa kapasitas satelit ( <i>Leased Capacity</i> )	37
	05.05	Persentase(%) konstruksi kapasitas penyediaan satelit multifungsi (Satria I) 150 Gbps (kumulatif)	100
	05.06	Jumlah dokumen <i>Financial Close</i>	1
	05.07	Persentase (%) Konstruksi <i>Hot Back Up</i> Satelit	20
	05.08	Jumlah solusi ekosistem dalam rangka peningkatan produktivitas masyarakat melalui pemanfaatan infrastruktur dan penguatan ekosistem di WPUTI (kumulatif)	15
<b>Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>			
<b>Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK</b>			
BLSDM	01.01	Jumlah peserta pelatihan digital skill a. SDM umum (termasuk kawasan prioritas) b. SKKNI	50.000
	01.02	Persentase (%) peserta yang lulus program beasiswa S2 dan S3 bidang TIK/Digital yang lulus tepat waktu	90

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Meningkatnya Kompetensi dan Kemampuan SDM Nasional Bidang TIK</b>			
	01.03	Jumlah ASN Nasional yang mendapatkan pelatihan teknis TIK, fungsional dan manajerial (kumulatif)	2.780
BLSDM	01.04	Jumlah anak usia sekolah, perempuan, disabilitas yang mendapat pengenalan TIK (kumulatif)	1.000
	01.05	Persentase (%) Realisasi Target PNPB Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100
<b>Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat dalam Menggunakan Internet</b>			
	02.01	Jumlah regulasi / kebijakan dan Implementasi turunan PP 71 tahun 2019	3
	02.02	Maksimal durasi pemutusan akses/pemblokiran PSE terhadap konten yang melanggar ketentuan perundangan-undangan	3
Ditjen APTIKA	02.03	Persentase (%) Penyelenggara Sistem Elektronik yang patuh terhadap UU ITE dan PP 71 Tahun 2019	95
	02.04	Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun	210.000
	02.05	Persentase (%) penyelesaian regulasi PDP dan peraturan turunannya (kumulatif)	80
	02.06	Persentase (%) pengembangan ekosistem PDP nasional (kumulatif)	70
<b>Terwujudnya Digitalisasi Pemerintahan Pusat dan Daerah</b>			
Ditjen APTIKA	03.01	Persentase (%) aplikasi generik yang dikembangkan secara multiplatform (kumulatif)	50
Ditjen PPI	03.02	Persentase (%) Kab/Kota yang mengimplementasikan sistem informasi kedaruratan dan kebencanaan	25
	03.03	Jumlah penyediaan Pusat Data Nasional	2
Ditjen APTIKA	03.04	Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi menyusun <i>masterplan smart city</i> (kumulatif)	50
	03.05	Jumlah hasil evaluasi implementasi <i>smart city</i> terhadap kota/kab yang terpilih pada periode 2017-2022 (kumulatif)	191

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Ditjen PPI	03.06	Jumlah regulasi/kebijakan terkait Penerapan Jaringan Bergerak Pitalebar untuk Pelindungan Publik dan Penanggulangan Bencana (PPDR)	1
<b>Meningkatnya Tingkat Literasi Masyarakat di Bidang Digital</b>			
Ditjen APTIKA	04.01	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (kumulatif)	5.500.000
<b>Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital</b>			
	05.01	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor strategis (kumulatif)	50
	05.02	Persentase Kawasan Prioritas yang difasilitasi untuk adopsi teknologi digital (kumulatif)	50
	05.03	Jumlah UMKM yang difasilitasi untuk <i>scale up</i> dari usaha kecil menjadi usaha menengah (kumulatif)	4.700
Ditjen APTIKA	05.04		5
	05.05	Jumlah <i>startup</i> bidang gim yang berkembang bisnisnya dilihat dari jumlah <i>download</i> /peningkatan pendapatan/jumlah produksi game/jumlah kerjasama bisnis	15
	05.06	Jumlah startup digital aktif yang terbentuk (kumulatif)	95
<b>Program Komunikasi Publik</b>			
<b>Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah</b>			
	01.01	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah	79
	01.02	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap kualitas konten informasi tentang kebijakan dan program prioritas pemerintah	79
Ditjen IKP	01.03	Persentase (%) tingkat kepuasan masyarakat di wilayah 3T terhadap informasi publik	77
	01.04	Persentase (%) berita hoaks yang berhasil dikonter	70
	01.05	Persentase (%) K/L/D yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) sesuai dengan peraturan yang berlaku	80

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
<b>Meningkatnya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah</b>			
Set. KPI	01.06	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	73
<b>Meningkatnya kualitas tata kelola informasi dan komunikasi publik</b>			
Ditjen IKP	02.01	Jumlah regulasi/kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D yang ditetapkan	5
<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan media komunikasi</b>			
Set. Dewan Pers	03.01	Indeks Kemerdekaan Pers	77
Set. KPI	03.02	Jumlah TV dengan Indeks Kualitas Program Siaran di atas 3	15
Dit. IKP	03.03	Persentase (%) pelayanan informasi dan pelestarian bidang pers dan komunikasi dan informasi	100
<b>Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik</b>			
<b>Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio</b>			
	01.01	Jumlah akumulasi penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan <i>broadband</i>	120
Ditjen SDPPI	01.02	Penyelesaian regulasi terkait spektrum frekuensi yang mendukung peningkatan konektivitas <i>broadband</i>	2
	01.03	Persentase Optimalisasi dan penyediaan spektrum frekuensi radio untuk <i>public service</i> dan pemerintah	100
<b>Pengembangan Infrastruktur Manajemen Spektrum Frekuensi Radio Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
Ditjen SDPPI	02.01	Persentase (%) penanganan gangguan spektrum yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan	99
	02.02	Jumlah penyediaan perangkat untuk pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio (unit)	16
<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan dan Pengelolaan PNBPN</b>			
Ditjen PPI	03.01	Indeks Minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran	3,5
Ditjen SDPPI	03.02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	> 3,5
Ditjen APTIKA	03.03	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Bidang Aplikasi Informatika	> 3,5
Ditjen PPI	03.04	Indeks minimum integritas pelayanan publik bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran	8,2

Unit	Kode	Program/Sasaran Program/Indikator	Target Penyelesaian
Ditjen SDPPI	03.05	Indeks integritas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	>8,2
Ditjen PPI	03.06	Jumlah target PNBPN bidang pos, penyiaran, dan telekomunikasi	1.211.982.278.000
	03.07	Indeks minimum integritas pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	8,2
Ditjen SDPPI	03.08	Indeks minimum Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	3,5
	03.09	Persentase (%) Capaian target PNBPN bidang frekuensi dan perangkat pos dan informatika	100
<b>Meningkatnya pengembangan ekosistem industri perangkat TIK</b>			
Ditjen SDPPI	04.01	Jumlah regulasi dan/atau standardisasi teknologi alat dan perangkat telekomunikasi	7
	04.02	Persentase pengembangan laboratorium pusat pengujian perangkat TIK	80
<b>Program Dukungan Manajemen</b>			
<b>Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien</b>			
	01.01	Indeks Reformasi Birokrasi Kemkominfo Tahun 2023	82
SETJEN	01.02	Nilai Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenkominfo TA 2022	WTP
	01.03	Nilai SPIP Kemkominfo	3,35
	01.04	Nilai Kinerja Anggaran Kominfo	87
SETJEN, SDPPI, PPI, APTIKA, IKP, BLSDM	01.05	Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Dukungan Manajemen Tahun 2023	3,75
	01.06 — 01.10	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Eselon I	82
BAKTI	01.11	Jumlah Layanan pegawai terhadap layanan keuangan BAKTI	12
	01.12	Persentase Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK di Kemkominfo pada Tahun 2023	1
	01.13	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Berjalan di Kemkominfo Tahun 2023	70
ITJEN	01.14	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Pada Tahun Sebelumnya di Kemkominfo pada Tahun 2023	30
	01.15	Nilai Penguatan Pengawasan di Kemkominfo pada Tahun 2023	4,97
	01.16	Nilai RB di Itjen pada Tahun 2023	82

▲ Tabel 2. 6 Rincian Rencana Kerja Kementerian Kominfo 2023

## 2.11 Alokasi Pagu Kementerian Kominfo TA 2023

# Rp19.703 miliar

Pagu alokasi anggaran tahun 2023 Kementerian Kominfo dialokasikan untuk 5 (lima) program prioritas, yaitu:

1. Program Penyediaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi sebesar Rp13.982 miliar
2. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp2.578 miliar
3. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik sebesar Rp1.122 miliar
4. Program Komunikasi Publik dengan total kebutuhan sebesar Rp. 293 miliar
5. Program Dukungan Manajemen dengan total kebutuhan sebesar Rp1.727 miliar

Gambar 2. 18 Pagu Kementerian Kominfo Tahun 2023

<p><b>SETJEN</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp69.202.691.000</p> <p>Belanja Barang Rp418.297.489.000</p> <p>Belanja Modal Rp26.812.467.000</p>	<p><b>ITJEN</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp17.529.202.000</p> <p>Belanja Barang Rp52.154.469.000</p> <p>Belanja Modal Rp1.097.700.000</p>	<p><b>Ditjen SDPPI</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp204.982.678.000</p> <p>Belanja Barang Rp675.802.547.000</p> <p>Belanja Modal Rp859.945.377.000</p>
<p><b>Ditjen PPI</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp47.965.287.000</p> <p>Belanja Barang Rp399.604.036.000</p> <p>Belanja Modal Rp1.113.009.806.000</p>	<p><b>Ditjen APTIKA</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp43.272.778.000</p> <p>Belanja Barang Rp1.446.953.227.000</p> <p>Belanja Modal Rp755.212.709.000</p>	<p><b>Ditjen IKP</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp53.782.320.000</p> <p>Belanja Barang Rp251.249.203.000</p> <p>Belanja Modal Rp11.230.008.000</p>
<p><b>Balitbang SDM</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp78.753.180.000</p> <p>Belanja Barang Rp308.464.658.000</p> <p>Belanja Modal Rp194.865.207.000</p>	<p><b>BAKTI</b></p> <p>Belanja Pegawai Rp2.214.001.000</p> <p>Belanja Barang Rp10.185.347.772.000</p> <p>Belanja Modal Rp2.485.441.625.000</p>	<p><b>2023</b></p>



# Akuntabilitas Kinerja

## Bab III

Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

- Capaian Kinerja Organisasi
- Kinerja Lainnya
- Realisasi Anggaran
- Penghargaan

Tren transformasi digital saat ini terus mengalami akselerasi dalam rangka transisi pemulihan global. Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mulai mereda ini, Kementerian Kominfo terus meningkatkan kinerja dan melaksanakan program-program kerja dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan.

Selain itu, berbagai upaya terus dilakukan Kementerian Kominfo untuk dapat menjadi garda terdepan dalam mempercepat dan mengakselerasi transformasi digital nasional melalui 4 (empat) pilar utama, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital, serta menyiapkan pendekatan holistik dengan mengimplementasikan berbagai inisiatif utama menjadi program-program prioritas Kementerian Kominfo yang dirancang untuk dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Kinerja Kementerian Kominfo selama tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa perspektif yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), pelaksanaan program prioritas, kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang dicerminkan dari inovasi, pencapaian, dan penghargaan yang memberikan manfaat baik kepada internal organisasi maupun kepada masyarakat luas.



## 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Kominfo tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKSS pada masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja tersebut menggambarkan kerja keras Kementerian Kominfo dalam mendorong akselerasi transformasi digital. Secara rinci, capaian kinerja Kementerian Kominfo tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	2020		2021		2022		Capaian 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>SS.1. Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau</b>									
1	Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G	Desa/ Kelurahan	1.606	1.682	5.623 Terdiri atas: BTS 3T: 4.200 BTS Non 3T: 1.423	3.370 Terdiri atas: BTS 3T: 3.029 BTS Non 3T: 341	11.661 Terdiri atas: BTS 3T: 8.226 BTS Non 3T: 3.435	8.196 Terdiri atas: BTS 3T: 5.410 BTS Non 3T: 2.786	70,29
2	Persentase (%) Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk Layanan <i>Broadband</i> Sebesar 90 MHz	Persentase (%)	100% (30 MHz)	100% (30 MHz)	100% (90 MHz)	90% • Persiapan Lelang (Sistem <i>e-Auction</i> ) serta simulasi opsi objek seleksi pada pita 700 MHz • Kajian opsi-opsi pita frekuensi radio lainnya	100% (Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan <i>Broadband</i> sebesar 90 MHz)	100% (Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan <i>Broadband</i> sebesar 90 MHz dalam bentuk RPM Kominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 700 MHz)	100,00
<b>SS.2. Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital</b>									
3	Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital	Persentase (%)	60 (156.685.431 orang dari 261.142.385 orang)	67,91 (177.342.502 orang dari 261.142.385 orang)	70 (182.799.669 orang dari 261.142.385 orang)	70,67 (185.211.708 orang dari 261.142.385 orang)	75 (195.856.788 orang dari 261.142.385 orang)	76,44 (199.624.863 orang dari 261.142.385 orang)	101,92
<b>SS.3. Meningkatnya Pemahaman, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital</b>									
4	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK	Orang	205.000	213.143	12.448.750	12.330.670	5.500.000	5.879.720	106,90

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	2020		2021		2022		Capaian 2022 (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>SS.3. Meningkatnya Pemahaman, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital</b>									
5	Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	Peserta	45.000	58.116	105.772	133.604	202.675	245.224	120,99
<b>SS.4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>									
6	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase (%)	70	75,50	72	77,78	73	79,45	108,84
<b>SS.5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b>									
7	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	76,50	76,28 (Hasil Penilaian Kem.PAN & RB)	78	78,18 (Hasil Penilaian Kem.PAN & RB)	80	79,01 (Hasil Penilaian PMPRB)	98,76

▲ Tabel 3. 1 Capaian IKSS Kementerian Kominfo Tahun 2020—2022  
Data dukung setiap indikator kinerja yang diperjanjikan telah dilampirkan pada link berikut: <https://komin.fo/DataDukungLKj>

Kementerian Kominfo terus mengupayakan agar manfaat digitalisasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dengan mempercepat terwujudnya transformasi digital nasional. Sebagai *Affirmative Policy*, Kementerian Kominfo

hadir untuk memastikan bahwa pembangunan, terutama di sektor informasi dan komunikasi dapat menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Capaian IKSS pada Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau

Pemerintah melalui Kementerian Kominfo mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia dari sektor hulu hingga ke hilir. Seluruh pembangunan infrastruktur digital sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, serta penyediaan layanan internet di Indonesia. Meskipun tidak dapat dilakukan secara serempak karena terkendala wilayah Indonesia yang berupa *archipelago state* atau negara kepulauan yang sangat besar dan luas, pembangunan ini tetap harus dilaksanakan sesuai jadwal. Pembangunan Infrastruktur Digital dilakukan khususnya untuk meningkatkan cakupan layanan *broadband* (pitalebar) Indonesia. Dengan meningkatnya cakupan layanan *broadband* akan memengaruhi dinamika ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena mendorong peningkatan jumlah sektor dan aktivitas ekonomi. Efek langsung pembangunan layanan *broadband* akan mendorong pertumbuhan seperti inovasi, munculnya barang dan jasa baru, proses baru, model bisnis baru, serta meningkatnya daya saing dan fleksibilitas dalam ekonomi. Perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat sangat dipengaruhi keberadaan teknologi pitalebar atau *broadband* sebagaimana tercantum dalam laporan International Telecommunication Union (ITU) pada artikel mengenai pengaruh teknologi pitalebar terhadap perekonomian bahwa tersebar dan termanfaatkannya teknologi *broadband* dipastikan memberi keuntungan langsung baik untuk penetrasi perumahan maupun penetrasi perusahaan. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa perkembangan *broadband* ini memberi dampak peningkatan pendapatan pada masyarakat dan pada bidang usaha sehingga secara keseluruhan dapat menghasilkan kontribusi pada pertumbuhan *Gross Domestic*.

Analisis dampak tersebut juga didukung oleh beberapa riset yang menyatakan antara lain:

1. **Tersebar dan termanfaatkannya teknologi pitalebar atau *broadband* dipastikan memberi keuntungan langsung baik untuk penetrasi perumahan maupun penetrasi perusahaan** (Katz, 2012)
2. **Peningkatan 20% investasi TIK akan meningkatkan pertumbuhan PDB sebesar 1%** (sumber: Global Connectivity Index 2015 by Huawei)
3. **Peningkatan penetrasi *fixed broadband* sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan PDB sebesar 0,08%** (sumber: ITU: The economic contribution of broadband, digitization and ICT regulation, 2018)
4. **Peningkatan penetrasi *mobile broadband* sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan PDB sebesar 0,15%** (sumber: ITU: The economic contribution of broadband, digitization and ICT regulation, 2018)
5. **Peningkatan *digital ecosystem development index* sebesar 1% akan menghasilkan peningkatan PDB per kapita sebesar 0,14% untuk negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)** (sumber: ITU: The economic contribution of broadband, digitization and ICT regulation, 2018)

Menyadari hal tersebut, maka Kementerian Kominfo terus melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam hal ini terkait layanan *broadband*. Sasaran strategis ini menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan Kementerian Kominfo bersama seluruh *stakeholder* untuk menjaga konektivitas nasional, terutama untuk meningkatkan cakupan layanan *broadband*. Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian target IKSS yaitu pembangunan BTS di wilayah 3T dan Non-3T, serta melakukan *farmling* dan *refarming* spektrum frekuensi radio. Di luar IKSS yang dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Kominfo tahun 2022, Kementerian Kominfo juga memiliki beberapa capaian indikator kinerja utama yang mendukung pembangunan infrastruktur digital antara lain melalui penyediaan layanan internet cepat (Wi-Fi) bagi titik layanan publik yang belum memiliki akses internet melalui pembangunan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), dan meningkatkan pemanfaatan Jaringan Serat Optik Palapa Ring yang merupakan jaringan *backbone* telekomunikasi nasional serta melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menyediakan Layanan Telekomunikasi yang berkualitas.



No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022 (%)
			Target	Realisasi	
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>					<b>85,15</b>
1	Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G	Desa/ Kelurahan	11.661 Terdiri dari: BTS 3T: 8.226 BTS Non 3T: 3.435	8.196 Terdiri dari: BTS 3T: 5.410 BTS Non 3T: 2.786	<b>70,29</b>
2	Persentase (%) Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk Layanan <i>Broadband</i> Sebesar 90 MHz	Persentase (%)	100% (Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan <i>Broadband</i> sebesar 90 MHz)	100% (Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan <i>Broadband</i> sebesar 90 MHz dalam bentuk RPM Kominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 700 MHz)	<b>100</b>
<b>Indikator Kinerja Utama Lainnya</b>					<b>114,48</b>
1	Persentase (%) Penyediaan Satelit Multifungsi (Satria-1)	Persentase (%)	70% (Pembangunan Stasiun Bumi dan Instalasi RF Gateway dan progres penyelesaian konstruksi Satelit SATRIA-1)	81,7% <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Pabrikasi Satelit oleh Thales Alenia Space (Perancis)</li> <li>Pengiriman Antena Struktur Gateway telah selesai di 7 lokasi stasiun bumi dari total 11 lokasi</li> <li>Pengiriman RF Gateway telah selesai di 9 lokasi stasiun bumi dari total 11 lokasi</li> <li>Konstruksi Bangunan telah selesai di 11 lokasi Stasiun Bumi</li> </ul>	<b>116,71</b>
2	Jumlah Sewa Kapasitas Satelit	Gbps	25	29,71	<b>118,84</b>
3	Jumlah Lokasi Penyediaan Akses Internet <i>Broadband</i> Termasuk 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Di Kawasan Prioritas yang beroperasi	Lokasi	- <ul style="list-style-type: none"> <li>AI Baru: -</li> <li>AI Eksisting: 15.556 Lokasi</li> <li>Total AI: 15.556 Lokasi</li> </ul>	- <ul style="list-style-type: none"> <li>AI Baru: -</li> <li>AI Eksisting: 15.556 Lokasi</li> <li>Total AI: 15.396 lokasi</li> </ul>	<b>98,97</b>

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022 (%)
			Target	Realisasi	
4	Persentase (%) Pemanfaatan Kapasitas Palapa Ring dengan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> Minimal 95%	Persentase (%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paket Barat: 50%</li> <li>Paket Tengah: 35%</li> <li>Paket Timur: 35% (FO &amp; MW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Paket Barat: 63,3%</li> <li>Paket Tengah: 35,5%</li> <li>Paket Timur: 35,84% (FO &amp; MW)</li> </ul>	<b>110,14</b>
5	Persentase (%) kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik <i>broadband</i>	Persentase (%)	61	61	<b>100</b>
6	Rata-rata kecepatan internet <i>mobile broadband</i> di wilayah Indonesia	Mbps	17,18	25,18	<b>146,57</b>

▲ Tabel 3. 2 Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 99,91 dengan status kinerja merah (belum mencapai target). Penjelasan atas masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

### 1. Penyediaan Layanan *Mobile Broadband 4G*

Penyediaan layanan *Mobile Broadband 4G* melalui pembangunan infrastruktur *Base Transceiver Station (BTS)* merupakan usaha pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo Bersama dengan mitra operator seluler untuk menyediakan Layanan Bergerak Seluler 4G/*Broadband* atau menara jaringan seluler di daerah yang belum terlayani layanan *Mobile Broadband 4G*, serta untuk mengatasi kesenjangan digital khususnya di daerah non-

komersial (non 3T) dan 3T. Belum terlayannya desa/kelurahan di daerah non-komersial (non 3T) dan 3T disebabkan karena rendahnya permintaan pasar terhadap akses telekomunikasi dan tidak adanya aspek bisnis di daerah non-komersial (non 3T) dan 3T yang menyebabkan penyelenggara seluler enggan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi seperti BTS di daerah-daerah tersebut.

Sehingga, hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Kominfo bersama dengan operator seluler untuk menyediakan akses *mobile broadband* 4G melalui pembangunan BTS.

Dengan banyaknya jumlah BTS yang dibangun dan telah dimanfaatkan, semakin banyak pula desa

yang terjangkau oleh sinyal telekomunikasi sehingga semakin banyak pula masyarakat di wilayah non-komersial (non 3T) dan 3T yang dapat menikmati konektivitas telepon seluler dan dapat mengakses informasi dengan lebih mudah.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	1.606 Lokasi • BTS Baru 3T: 353 • BTS Eksisting 3T: 1.253 • Total BTS 3T: 1.606	7.305 Lokasi • BTS Baru 3T: 4.200 • BTS Eksisting 3T: 1.682 • Total BTS 3T: 5.882  • BTS Baru Non3T: 1.423 • BTS Eksisting Non3T: - • Total BTS Non3T: 1.423	11.661 Lokasi • BTS Baru 3T: 2.344 • BTS Eksisting 3T: 5.882 • Total BTS 3T: 8.226  • BTS Baru Non3T: 2.012 • BTS Eksisting Non3T: 1.423 • Total BTS Non3T: 3.435
<b>Realisasi</b>	1.682 Lokasi • BTS Baru 3T: 429 • BTS Eksisting 3T: 1.253 • Total BTS 3T: 1.682	5.052 Lokasi • BTS Baru 3T: 3.029 • BTS Eksisting 3T: 1.682 • Total BTS 3T: 4.711  • BTS Baru Non3T: 341 • BTS Eksisting Non3T: - • Total BTS Non3T: 341	8.196 Lokasi • BTS Baru 3T: 776 • BTS Eksisting 3T: 4.634 • Total BTS 3T: 5.410  • BTS Baru Non3T: 2.445 • BTS Eksisting Non3T: 341 • Total BTS Non3T: 2.786
<b>Capaian</b>	104,73%	69,16%	70,29%

▲ Tabel 3. 3 Capaian Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G telah memenuhi target RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022), namun belum memenuhi

target yang telah ditetapkan, baik pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022 maupun pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	3T • BTS Baru: 3.799 lokasi • BTS existing: 1.253 lokasi • Total BTS: 5.052 lokasi  Non 3T • -	3T • BTS Baru: 3.799 lokasi • BTS existing: 1.253 lokasi • Total BTS: 5.052 lokasi  Non 3T • -	3T • BTS Baru: 3.799 lokasi • BTS existing: 1.253 lokasi • Total BTS: 5.052 lokasi  Non 3T • -	3T • BTS Baru: 3.799 lokasi • BTS existing: 1.253 lokasi • Total BTS: 5.052 lokasi  Non 3T • -	3T • BTS Baru: 3.799 lokasi • BTS existing: 1.253 lokasi • Total BTS: 5.052 lokasi  Non 3T • -
<b>RENSTRA</b>	3T • BTS Baru: 429 lokasi • BTS existing: 1.253 lokasi • Total BTS: 1.682 lokasi  Non 3T • -	3T • BTS Baru: 4.200 lokasi • BTS existing: 1.682 lokasi • Total BTS: 5.882 lokasi  Non 3T • BTS Baru: 1.423	3T • BTS Baru: 3.704 lokasi • BTS existing: 5.882 lokasi • Total BTS: 9.586 lokasi  Non 3T • BTS Baru: 2.012 • BTS existing: 1.423 • Total BTS: 3.435	3T • BTS Baru: - • BTS existing: 9.586 lokasi • Total BTS: 9.586 lokasi  Non 3T • BTS Baru: - • BTS existing: 3.435 • Total BTS: 3.435	3T • BTS Baru: - • BTS existing: 9.586 lokasi • Total BTS: 9.586 lokasi  Non 3T • BTS Baru: - • BTS existing: 3.435 • Total BTS: 3.435
<b>PK</b>	3T • BTS Baru: 353 lokasi • BTS existing: 1.253 lokasi • Total BTS: 1.682 lokasi  Non 3T • -	3T • BTS Baru: 4.200 lokasi • BTS existing: 1.682 lokasi • Total BTS: 5.882 lokasi  Non 3T • BTS Baru: 1.423	3T • BTS Baru: 2.344 lokasi • BTS existing: 5.882 lokasi • Total BTS: 8.226 lokasi  Non 3T • BTS Baru: 3.094 • BTS existing: 341 • Total BTS: 3.435	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 4 Target Penyediaan Layanan Mobile Broadband 4G pada RPJMN, RENSTRA dan PK

Jika dilihat pada tabel di atas, terdapat perbedaan antara target yang tercantum pada dokumen RPJMN/RENSTRA dengan PK khususnya untuk pembangunan BTS di wilayah 3T. Hal tersebut dikarenakan terdapat direktif langsung dari Pimpinan untuk menyesuaikan

target pada tahun berjalan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran serta kemampuan unit kerja dalam menyelesaikan program tersebut. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian target pada dokumen PK tahun berjalan.

Kementerian Kominfo terus berupaya untuk meningkatkan layanan akses *mobile broadband* 4G di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2022, Kementerian Kominfo menargetkan untuk dapat memperluas cakupan layanan *broadband* melalui program Pembangunan Infrastruktur BTS untuk menyediakan layanan akses Mobile Broadband 4G di 2.344 desa/kelurahan pada lokasi baru di wilayah 3T. Selain itu, penyediaan layanan akses Mobile Broadband 4G untuk wilayah non-3T juga ditargetkan dapat tersedia di 3.054 desa/kelurahan pada lokasi baru melalui komitmen operator seluler.

Sampai dengan akhir tahun 2022 telah tersedia layanan akses Mobile Broadband 4G di 776 desa/

kelurahan lokasi baru wilayah 3T dan 2.445 desa/kelurahan lokasi baru wilayah Non-3T. Sehingga secara akumulasi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, Kementerian Kominfo bersama dengan operator seluler telah menyediakan layanan akses Mobile Broadband 4G di 5.410 desa/kelurahan di wilayah 3T dan 2.786 desa/kelurahan di wilayah Non-3T. Sehingga, total akumulasi penyediaan akses Mobile Broadband 4G melalui pembangunan BTS di wilayah non komersial (non 3T) dan 3T adalah sebanyak 8.196 desa/kelurahan.

Secara rinci, capaian penyediaan akses *mobile broadband* 4G di wilayah 3T sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:



▲ Grafik 3.1 Penyediaan Akses *Mobile Broadband* 4G di Wilayah 3T

Sedangkan rincian perkembangan capaian penyediaan akses Mobile Broadband 4G di wilayah non komersial (non 3T) pada tahun 2021 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:

Operator Seluler	Tahun 2021		Tahun 2022		Capaian Total
	Target	Capaian	Target	Capaian	
Telkomsel	115	115	1.386	826	941
IOH	120	120	903	898	1.018
XL	88	88	773	687	775
Smartfren	18	18	34	34	52
<b>Total</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>3.096</b>	<b>2.445</b>	<b>2.786</b>

▲ Tabel 3.5 Penyediaan Akses *Mobile Broadband* 4G di Wilayah Non 3T

Dengan melihat data tersebut, total capaian Kementerian Kominfo pada tahun 2022 terkait penyediaan layanan Mobile Broadband 4G, baik di wilayah 3T maupun non 3T baru mencapai 70,29% dari target 11.661 desa/kelurahan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil studi Evaluasi Dampak Program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Tahun 2022, menyatakan bahwa penyediaan layanan Mobile Broadband 4G berdampak terhadap peningkatan aktivitas ekonomi untuk desa/kelurahan, di mana aktivitas ekonomi desa/kelurahan yang tersedia layanan Mobile Broadband 4G tumbuh lebih tinggi rata-rata 1,75% dibandingkan dengan desa belum tersedia layanan Mobile Broadband 4G. Hasil evaluasi yang positif dari penyediaan layanan Mobile Broadband 4G karena dilakukan secara masif (adanya *network effect*) sehingga dampak menjadi lebih signifikan. Hasil studi juga menunjukkan bahwa Program Penyediaan layanan Mobile Broadband 4G yang dilakukan Kementerian Kominfo baik di wilayah 3T maupun Non 3T efektif dalam meningkatkan aktivitas ekonomi, di mana efektivitas dari program juga

sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keberadaan infrastruktur lain, ada atau tidaknya jaringan dan akses internet pada daerah atau desa lain, serta kualitas sumber daya manusia (*human-capital*). Dampak dari penyediaan layanan Mobile Broadband 4G akan mempunyai nilai efektivitas lebih tinggi jika disediakan di desa dengan infrastruktur non-digital yang telah baik, namun belum mempunyai infrastruktur digital yang memadai, ditandai dengan belum memiliki layanan Mobile Broadband 4G. Nilai dampak dari layanan Mobile Broadband 4G akan meningkat dengan terhubungnya desa-desa dengan daerah lainnya. Hal ini penting untuk meningkatkan konektivitas, mengingat layanan tersebut tidak hanya digunakan masyarakat di desa sendiri, namun juga untuk berkomunikasi dengan desa lainnya. Terakhir, pengguna layanan Mobile Broadband 4G (user) dengan kemampuan digital yang lebih baik juga diekspektasikan untuk dapat mendorong efektivitas dari program tersebut (Studi Evaluasi Dampak Program Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPEM FEB UI, 2022).

Penyebab tidak tercapainya target penyediaan layanan Mobile Broadband 4G tahun 2022 dikarenakan terdapat beberapa faktor, antara lain:

1. *Community issue* dengan pemilik lahan, di mana pemilik lahan meminta status tanah sewa.
2. Isu keamanan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat.
3. Kondisi akses dan keterbatasan transportasi ke lokasi, terutama di wilayah Papua dan Papua Barat.
4. Keterbatasan tenaga kerja terampil untuk pekerjaan *Civil Mechanical Electrical (CME)*, terutama *tower erection* di daerah. Khususnya di Papua dan Papua Barat.
5. Terdapat beberapa wilayah yang ternyata sudah terjangkau oleh sinyal 4G dari BTS reguler operator seluler.
6. Terdapat desa yang memiliki koordinat nominal *site* tidak tepat sehingga ketika dilakukan survei menunjukkan lokasi berbeda.
7. Keterbatasan ketersediaan *global chip shortage* untuk perangkat komunikasi, terutama untuk perangkat *microwave*.
8. Terdapat beberapa wilayah target pembangunan desa/kelurahan tahun 2022 yang berada di kawasan cagar alam sehingga mengalami kesulitan untuk mendapatkan izin dari pihak otoritas terkait.
9. Terdapat sejumlah desa/kelurahan yang tidak sesuai dengan titik koordinat lokasi administrasi dan terjadi pemekaran di wilayah desa/kelurahan tersebut.
10. Adanya ketidaksesuaian data dengan laporan Dinas Kominfo pada beberapa daerah terkait perbedaan jumlah desa/kelurahan yang belum terlayani akses mobile broadband 4G. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tolok ukur kriteria desa/kelurahan yang belum terlayani akses *mobile broadband 4G*.
11. Banyak desa/kelurahan yang hanya dilayani listrik PLN kurang dari 10 jam sehingga menjadi pertimbangan operator seluler untuk tidak melaksanakan komitmen membangun BTS 4G di daerah tersebut.

Kementerian Kominfo melaksanakan beberapa alternatif solusi terkait penyediaan layanan Mobile Broadband 4G, yaitu:

1. Menerapkan *micro-management* kepada kemitraan penyedia infrastruktur layanan *Mobile Broadband 4G*.
2. Berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan secara intensif.
3. Menggunakan moda transportasi lain yang lebih cepat dalam pengiriman material, misalnya dengan menyewa *vessel* atau mencari alternatif penyewaan pesawat.
4. Menggunakan terobosan skema pinjam lahan dengan berkolaborasi bersama pemerintah daerah. Dalam skema pinjam lahan, pemerintah daerah menyiapkan lahan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sedangkan pemerintah pusat diberi fasilitas pembebasan IMB untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.
5. Melakukan review dan sinkronisasi data antara Kementerian Kominfo dengan operator seluler dalam menyusun *timeline* rencana penyediaan layanan Mobile Broadband 4G.
6. Memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dalam hal ini Diskominfo dan operator seluler.
7. Bekerjasama dengan *stakeholder* untuk mendorong pembangunan infrastruktur pendukung seperti layanan listrik, pembangunan infrastruktur jalan, dan fasilitas kesehatan, serta pendidikan.



Sebaran BTS On Air

Wilayah 3T dan Non 3T Tahun 2015—2022



▲ Gambar 3.1 Sebaran BTS On Air di Wilayah 3T dan Non 3T Tahun 2015—2022

Infrastruktur telekomunikasi merupakan *sine quo non* (syarat mutlak) untuk meningkatkan pertumbuhan. Namun, pemerataan pembangunan, tidak dapat dengan mudah dituntaskan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang sedikit, pendapatan per kapita yang rendah, daya beli, dan lingkungan geografis yang terlalu sulit adalah faktor yang menghambat tercapainya skala bisnis tertentu, sehingga beberapa lokasi pemukiman tidak menarik untuk dibangun

oleh swasta. Pada kondisi *comercially not viable*, Pemerintah harus menunjukkan afirmasi dan hadir untuk menghubungkan titik-titik yang terjauh, tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil, serta lokasi non komersial dalam menghubungkan infrastruktur digital di Indonesia. Secara garis besar, manfaat tersedianya layanan Mobile Broadband 4G di wilayah non komersial (non 3T) dan 3T, adalah:

1. Terwujudnya infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang konektivitas antar wilayah terutama wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah non komersial sesuai amanat Nawacita.
2. Membangun kedaulatan bangsa dan kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan negara.
3. Memudahkan masyarakat perbatasan, pedalaman, dan daerah non komersial dalam mendapatkan informasi.
4. Dengan hadirnya akses telekomunikasi, masyarakat di wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah non komersial tidak lagi merasa terisolasi.
5. Kementerian Kominfo akan secara optimal memanfaatkan infrastruktur Mobile Broadband 4G eksisting dengan memberikan layanan lengkap yang meliputi layanan telekomunikasi dan layanan internet kepada masyarakat Indonesia yang berada di wilayah non komersial, perbatasan, perintis, dan 3T.

## 2. Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk Layanan *Broadband*

Pengelolaan sumber daya spektrum frekuensi radio menjadi penunjang kebutuhan koneksi internet yang terus tumbuh di Indonesia. Merujuk pada kajian yang dilakukan bersama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2018 menyampaikan bahwa kebutuhan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* sampai dengan tahun 2024 di Indonesia yaitu sebanyak 1.882 MHz. Kebutuhan tersebut merupakan upaya untuk mengimbangi kebutuhan pertumbuhan *traffic* data internet dan untuk menyongsong era 5G.

Pemerintah menetapkan target total *bandwidth* spektrum frekuensi radio sebesar 2.047 MHz yang pencapaiannya bertahap sampai dengan tahun 2024, lebih banyak dibandingkan dengan kajian kebutuhan spektrum frekuensi radio yang dilakukan bersama dengan ITB. Perolehan spektrum frekuensi radio hingga tahun 2021 adalah sebesar 767 MHz, sehingga target penambahan spektrum frekuensi radio untuk *mobile broadband* periode 2020—2024 adalah sebesar 1.310 MHz.



Foto: Donny Christian - Balmon SFR Kelas II Merauke - Bekerja dengan Senyum dan Tawa dari Tanah Papua

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	30 MHz	90 MHz	100% (Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan <i>Broadband</i> sebesar 90 MHz)
<b>Realisasi</b>	30 MHz	90% <ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Lelang (Sistem <i>e-Auction</i>) serta simulasi opsi objek seleksi pada pita 700 MHz</li> <li>Kajian opsi-opsi pita frekuensi radio lainnya</li> </ul>	100% (Rancangan Kebijakan Dalam Rangka Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk layanan <i>Broadband</i> sebesar 90 MHz dalam bentuk RPM Kominfo tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio 700 MHz)
<b>Capaian</b>	100%	90%	100%

▲ Tabel 3. 6 Capaian Progres Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Persentase (%) Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk Layanan *Broadband* sebesar 90 MHz telah memenuhi target yang telah ditetapkan

pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022, namun belum memenuhi target pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022) dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	30 MHz	50 MHz	1.050 MHz	1.120 MHz	1.310 MHz
<b>RENSTRA</b>	30 MHz	90 MHz	1.000 MHz	-	190 MHz
<b>PK</b>	30 MHz	90 MHz	100%	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 7 Target Penambahan Spektrum Frekuensi Radio pada RPJMN, RENSTRA, dan PK

Jika dilihat pada tabel pada halaman sebelumnya, terdapat perbedaan antara target yang tercantum antara dokumen RPJMN/ RENSTRA dengan PK untuk target penambahan spektrum frekuensi radio. Hal tersebut karena dalam penyelesaian program penambahan spektrum frekuensi radio terdapat beberapa hal-hal yang diluar kendali Ditjen SDPPI selaku pemangku program dalam pencapaiannya, sehingga berdasarkan direktif pimpinan fokus penyelesaian program tersebut adalah mempersiapkan rancangan kebijakan dalam rangka mendukung penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *mobile broadband* sebesar 90 MHz. Perubahan tersebut juga telah disepakati dalam Berita Acara (BA) *Trilateral Meeting* Pemutakhiran Renja pada tanggal 26 Desember 2022.

Sepanjang tahun 2022, telah dilakukan beberapa upaya untuk mempersiapkan Rancangan Kebijakan dalam rangka mendukung penambahan spektrum frekuensi radio untuk layanan *mobile broadband* sebesar 90 MHz. Rancangan kebijakan tersebut telah disiapkan dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz. RPM dimaksud disiapkan sebagai dasar penetapan kebijakan bahwa pita frekuensi radio 700 MHz dapat digunakan untuk jaringan bergerak seluler berbasis teknologi International Mobile Telecommunication (IMT). RPM tersebut juga disiapkan berdasarkan asumsi bahwa proses seleksi *Digital Dividend* pita frekuensi 700 MHz dilakukan setelah ASO dapat dituntaskan secara nasional.

Substansi yang diatur dalam RPM tersebut diusulkan mencakup 4 hal sebagai berikut:

1. Rentang pita frekuensi radio 700 MHz mengikuti standar 3GPP Band 28 (4G) / 3GPP Band n28 (5G) moda FDD pada rentang 703 – 748 MHz *uplink* berpasangan dengan 758 – 803 MHz *downlink*.

2. Pita frekuensi radio 700 MHz sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas ditetapkan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dengan wilayah layanan nasional yang dalam pemanfaatannya melekat kebijakan netral teknologi berbasis standar IMT. Dalam RPM ini diasumsikan kondisi pita *Digital Dividend* 700 telah kosong dari pendudukan TV Analog.
3. Penetapan hak penggunaan spektrum frekuensi radio 700 MHz diberikan melalui seleksi dengan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) nasional. Berdasarkan tanggapan pernyataan minat yang diterima dari operator seluler, disimpulkan bahwa kondisi terhadap pita *Digital Dividend* 700 MHz ini adalah jumlah ketersediaan pita frekuensi radio kurang dari jumlah permintaan.
4. Pemenang seleksi pita *Digital Dividend* 700 MHz dapat diberikan kewajiban tambahan (seperti contoh: kewajiban pembangunan/*roll out obligation*). Dengan memperhatikan masih banyaknya area yang belum terlayani sinyal 4G secara memadai, maka pita *Digital Dividend* 700 MHz dapat dipaketkan hak penggunaannya dengan kewajiban pembangunan guna akselerasi pemerataan sinyal 4G. Kewajiban pembangunan tersebut menjadi kewajiban tambahan bagi pemenang seleksi selain pembayaran PNB BHP spektrum frekuensi radio. Kewajiban pembangunan tersebut rencananya akan ditetapkan di dalam Dokumen Seleksi merujuk pada kebijakan yang terlebih dahulu ditetapkan oleh Menteri (umumnya dalam bentuk Keputusan Menteri).

Pada tahun 2022 dilakukan merger antara PT. Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dan PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) yang berdampak dikembalikannya 1 (satu) blok (2x5 MHz) pada pita 2,1 GHz. Selanjutnya dilaksanakan seleksi pita frekuensi 2.1 GHz pada blok dimaksud yang memberikan tambahan PNB sebesar Rp1.210.112.000.000. Pasca seleksi, *refarming* pita 2.1 GHz dilakukan untuk memperoleh pita frekuensi yang *contiguous* bagi setiap operator seluler pada pita tersebut. Proses *refarming* ini dilaksanakan dalam total waktu 67 hari yang melibatkan 3 operator seluler di bawah koordinasi Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen SDPPI dan seluruh UPT Monitor SFR seluruh Indonesia.

Kendala yang dihadapi dalam mempersiapkan rancangan kebijakan terkait penambahan spektrum frekuensi radio adalah proses seleksi *Digital Dividend* dari pita 700 MHz sangat bergantung pada penyelesaian ASO sehingga diperlukan beberapa penyesuaian terhadap rencana pemanfaatan *Digital Dividend* pita 700 MHz. Dengan demikian, Kementerian Kominfo telah menyiapkan beberapa solusi untuk menindaklanjuti kendala tersebut, yaitu dengan melaksanakan beberapa kajian dalam rangka menyiapkan konsep penataan pita frekuensi 700 MHz beserta pemanfaatannya. Konsep penataan dan pemanfaatan *Digital Dividend* pita 700 MHz yang telah disiapkan juga telah diperkuat dengan adanya hasil kajian dari sudut pandang akademisi, dalam hal ini adalah ITB melalui dokumen *Roadmap* Frekuensi 5G untuk tahun 2021 – 2024.

Penyiapan rancangan kebijakan terkait penambahan spektrum frekuensi radio beserta seleksi *digital dividend* pita frekuensi merupakan proses *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio dalam rangka menghasilkan layanan telekomunikasi Indonesia yang optimal. Tata kelola spektrum frekuensi radio akan terus diperbaiki agar tepat peruntukannya, baik untuk penggunaan telekomunikasi, atau untuk satelit, maupun untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga penggunaan spektrum frekuensi radio bisa efisien serta selaras, khususnya untuk mencukupi kebutuhan spektrum frekuensi radio baik untuk jaringan 4G sebagai tulang punggung komunikasi saat ini, maupun untuk penggelaran 5G yang diperkirakan berkembang masif dalam beberapa waktu mendatang. Selain itu, *farming* dan *refarming* spektrum frekuensi radio berguna untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan seluler, sekaligus menyambut kehadiran teknologi baru yang membutuhkan pita frekuensi lebih besar.

# Pencapaian Sasaran Strategis 1 juga didukung oleh Indikator Kinerja Utama Lainnya

## Sub-1 Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1

Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan beragam kondisi topografi seperti pegunungan dan lembah serta laut yang luas merupakan tantangan tersendiri dalam penyediaan jaringan terestrial. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan teknologi satelit sebagai solusi telekomunikasi dalam usaha bersama untuk memperkecil kesenjangan akses broadband *internet to bridge digital divide*. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo menginisiasi Proyek Satelit Multifungsi (SMF) yang merupakan Kerjasama Proyek KPBU untuk Penyediaan Satelit Multifungsi Pemerintah yang diberi nama Satelit Republik Indonesia (SATRIA), yang kemudian disebut Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1.

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), di mana salah satu arah transformasi digital adalah penuntasan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, serta Arahan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah menetapkan Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung konektivitas digital dan sekaligus menjadi fondasi transformasi digital untuk kemajuan bangsa.

Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1 merupakan Proyek Kerjasama untuk Penyediaan Satelit Multifungsi Pemerintah yang dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan pola pengembalian investasi melalui Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment/AP*). Perakitan satelit SATRIA-1 dilakukan atas kerja sama Kementerian Kominfo dengan Thales Alenia Space, perusahaan manufaktur satelit yang berbasis di Perancis. Sedangkan untuk produksi roketnya sebagai peluncur satelit berada di Amerika Serikat bekerjasama dengan Space Exploration Technologies Corporation atau SPACEX, perusahaan transportasi luar angkasa swasta Amerika Serikat. Proyek Satelit SATRIA-1 dibangun melalui skema perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBBU. Proyek ini membutuhkan investasi senilai US\$545 juta. Struktur pembiayaan satelit terdiri dari porsi ekuitas (22 persen) US\$114 juta dan porsi pinjaman (78 persen) US\$431 juta. Porsi pinjaman berasal dari sindikasi Bank Kredit Ekspor Prancis (BPI France) dan dukungan antara lain HSBC Continental Europe, Banco Santander, dan The Korea Development Bank.

Telekomunikasi dan informatika Indonesia saat ini mendayagunakan 9 (sembilan) satelit telekomunikasi, setara dengan 50 Gbps, di mana 55% di antaranya digunakan oleh Kementerian Kominfo. Adapun sembilan satelit komersial yang kini beroperasi itu terdiri dari lima satelit nasional dan empat satelit asing, dengan total seluruh kapasitas transmisi sebesar 50 Gbps.

SATRIA-1 akan menjadi satelit multifungsi terbesar di Asia berkapasitas 150 gigabyte per second (Gbps) itu memiliki kemampuan tiga kali lebih besar dari total sembilan satelit yang digunakan Indonesia saat ini dengan menggunakan teknologi *Very High Throughput Satellite*. Indonesia akan menjadi negara keempat yang memiliki satelit dengan teknologi ini setelah Luksemburg, Kanada, dan Amerika Serikat. Satelit Multifungsi SATRIA-1 akan menjangkau seluruh wilayah di

Indonesia dengan total keterjangkauan 116 *spotbeam* yang terakses internet. Kementerian Kominfo juga menyiapkan 11 stasiun bumi atau *gateway*.

Berdasarkan hasil kajian Boston Consulting Group (BCG) tahun 2017 terdapat lebih kurang 150.000 lokasi yang membutuhkan layanan internet cepat. Kebutuhan di lokasi-lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan untuk pendidikan = 93.900 lokasi
2. Kebutuhan untuk pemerintah daerah = 47.900 lokasi
3. Kebutuhan untuk pertahanan dan keamanan = 3.900 lokasi
4. Kebutuhan untuk kesehatan = 3.700 lokasi



Gambar 3. 2 Rencana Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1

Nantinya, satelit SATRIA-1 yang akan diluncurkan pada orbit PSN 146 E di atas wilayah Indonesia, akan memenuhi kebutuhan jaringan internet di daerah 3T dan ±150.000 titik dari total 501.112 titik layanan publik.

Adapun titik layanan publik di berbagai sektor itu yang akan mendapatkan akses dari jaringan satelit ini antara lain sarana pendidikan, pemerintah daerah, administrasi pertahanan dan keamanan, dan fasilitas Kesehatan. Pembagian ±150.000 titik layanan publik itu, dialokasikan masing-masing 93.900 titik untuk sekolah dan pesantren dalam upaya mendukung pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan ujian berbasis komputer.

Lalu ada 3.700 titik untuk puskesmas dan rumah sakit, serta layanan kesehatan lainnya untuk menyokong kebutuhan *database* kesehatan yang terintegrasi dan terpusat. Di sektor keamanan, terdapat 3.900 titik untuk layanan keamanan masyarakat di markas Polisi dan TNI khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga dapat mendukung kebutuhan keamanan yang dapat diandalkan yang selama ini sulit dijangkau dengan kabel optik. Selain itu, 47.900 titik untuk layanan kantor desa/kelurahan, kecamatan, dan pemerintah daerah lainnya, agar dapat mengoptimalkan pelayanan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE/*e-government*) secara efisien dan efektif, serta 600 titik layanan publik lainnya.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	-	19% ( <i>Financial Close</i> dan Tahapan Konstruksi)	70% (Pembangunan Stasiun Bumi dan Instalasi <i>RF Gateway</i> dan progres penyelesaian Konstruksi Satelit SATRIA-1)
<b>Realisasi</b>	-	50% <ul style="list-style-type: none"> <li>telah dilakukan penandatanganan <i>financial close</i></li> <li>dimulainya Konstruksi SATRIA</li> <li>proses pembangunan stasiun bumi di 11 lokasi</li> </ul>	81,7% <ul style="list-style-type: none"> <li>Proses Pabrikasi Satelit oleh Thales Alenia Space (Perancis)</li> <li>Pengiriman <i>Antenna</i> Struktur <i>Gateway</i> telah selesai di 7 lokasi stasiun bumi dari total 11 lokasi</li> <li>Pengiriman <i>RF Gateway</i> telah selesai di 9 lokasi stasiun bumi dari total 11 lokasi</li> <li>Konstruksi Bangunan telah selesai di 11 lokasi Stasiun Bumi</li> </ul>
<b>Capaian</b>	-	263,16%	116,71%

▲ Tabel 3. 8 Capaian Progres Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Persentase (%) Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1 telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

Kementerian Kominfo Tahun 2022, Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022), dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	Konstruksi	Konstruksi	Konstruksi	150 Gbps	150 Gbps
<b>RENSTRA</b>	Lelang	<i>Prepatory Work Agreement</i>	Konstruksi	SATRIA 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasional 150 Gbps</li> <li>Hub 70 Gbps</li> <li>IP internet 75 Gbps</li> </ul>	SATRIA 1: <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasional 150 Gbps</li> <li>Hub 140 Gbps</li> <li>IP internet 150 Gbps</li> </ul> SATRIA 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>Operasional 300 Gbps</li> </ul>
<b>PK</b>	-	19%	70%	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 9 Target Penyediaan Satelit Multifungsi SATRIA-1 pada RPJMN, RENSTRA, dan PK

Sampai dengan bulan Desember 2022, progres pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 telah melalui tahap konstruksi yang meliputi *Factory Acceptance Test (FAT)*, Pabrikasi Satelit/Perakitan *Solar Arrays*, *Antenna*, dan *Wing Flight Module*. Dari sisi konstruksi Stasiun Bumi (*ground segment*), 11 lokasi Stasiun Bumi telah dibangun yaitu di wilayah Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika, dan Jayapura.

Selain itu, telah dilakukan juga instalasi *Radio Frequency (RF) Gateway* di 9 lokasi stasiun bumi yaitu di Cikarang, Banjarmasin, Tarakan, Ambon, Manokwari, Timika, Jayapura, Kupang dan Pontianak. Satelit Multifungsi SATRIA-1 direncanakan dapat diluncurkan pada Triwulan II tahun 2023 dan beroperasi pada Triwulan IV tahun 2023.



▲ Gambar 3. 3 Linimasa Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1

Dalam prosesnya, salah satu tantangan yang dihadapi dalam menjalankan proyek ini adalah penggunaan teknologi *High Throughput Satellite* (HTS) pada SATRIA-1 yang merupakan teknologi baru, rumit, dan kompleks, sehingga memungkinkan munculnya masalah dalam pembangunan maupun operasional dalam pelaksanaan Proyek Satelit Multifungsi SATRIA-1. Dalam rangka memitigasi hal tersebut, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan *Hot Backup Satellite* sebagai satelit cadangan apabila SATRIA-1 mengalami kendala dalam peluncuran. *Hot Backup Satellite* (HBS) dengan kapasitas 80 Gbps juga menggunakan teknologi HTS dengan frekuensi Ka-Band dengan menggandeng pabrikan satelit yaitu Boeing, dan diluncurkan menggunakan rocket launcher Space-X yaitu Falcon 9. Saat ini, progres pembangunan HBS telah mencapai 81,7% yaitu meliputi telah terlaksana *Factory Acceptance Test* (FAT) untuk *IP Processing Hub*, telah terlaksana *Bus Module Test* untuk Pabrikasi Spacecraft, serta telah terlaksana *The 2nd Stage Engine Assignment* untuk Pabrikasi *Spacecraft Launch*.

Pembangunan Satelit Multifungsi ini sejalan dengan cita-cita Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses infrastruktur informasi di seluruh wilayah pelosok tanah air seperti dimandatkan badan dunia International Telecommunication Union (ITU) dengan konsep *Universal Service Obligation* (USO). Satelit Multifungsi dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai sektor di antaranya sektor ekonomi digital hingga masyarakat digital. Melalui peningkatan *online link* dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM *Transactional Center*, proses *e-Office*, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan sehingga dapat secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional. Sedangkan pada sektor masyarakat digital, penyediaan infrastruktur ini merupakan prasyarat awal yang krusial untuk mewujudkan percepatan transformasi digital Indonesia. Dengan berbasis pada *human-centred approach*, penyelenggaraan infrastruktur dapat memberikan manfaat besar sekaligus membuka peluang-peluang digital bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## Sub-2 Penyediaan Kapasitas Satelit (Leased Capacity Satellite)

Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi (*Leased Capacity Satellite*) merupakan upaya Kementerian Kominfo untuk menyediakan kapasitas satelit lebih awal sembari menunggu konstruksi Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) direncanakan akan mulai beroperasi di tahun 2023. Kementerian Kominfo melakukan Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi (*Leased Capacity Satellite*) sebagai solusi untuk mempercepat penggelaran akses broadband dan internet ke seluruh Indonesia terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). *Leased Capacity Satellite* adalah penyediaan kapasitas satelit, di mana Kementerian Kominfo menyewa kapasitas satelit dalam jumlah besar, sehingga mendapatkan harga

*wholesale*. Dengan demikian pemerintah akan mendapatkan efisiensi biaya lebih besar jika dibandingkan dengan pembelian menggunakan metode *e-purchasing* yang ada.

Melalui penyediaan *Leased Capacity Satellite*, Kementerian Kominfo terus mendukung percepatan transformasi digital terhadap lokasi-lokasi layanan publik dan tidak menutup kemungkinan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas layanan transmisi untuk program BTS/*Lastmile* dan program-program lainnya.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	21 Gbps	30 Gbps	25 Gbps
<b>Realisasi</b>	21 Gbps	27,58 Gbps	29,71 Gbps
<b>Capaian</b>	100%	91,93%	118,84%

▲ Tabel 3. 10 Capaian Penyediaan Sewa Kapasitas Satelit

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Persentase (%) Penyediaan Sewa Kapasitas Satelit telah memenuhi target yang telah

ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022, namun belum memenuhi target pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	-	-	-	-	-
<b>RENSTRA</b>	21 Gbps	37 Gbps	37 Gbps	37 Gbps	37 Gbps
<b>PK</b>	21 Gbps	30 Gbps	25 Gbps	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 11 Target Penyediaan Kapasitas Satelit pada RPJMN, RENSTRA, dan PK

Pada tahun 2022, Kementerian Kominfo menargetkan 25 Gbps dan hingga akhir tahun 2022, Kementerian Kominfo telah menyediakan kapasitas satelit sebesar 29,71 Gbps atau telah mencapai 118,84% dari target yang dijanjikan.

Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi (*Leased Capacity Satellite*) dimanfaatkan guna mendukung layanan transmisi untuk lokasi-lokasi baru Akses Internet di wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T serta perbatasan.

### Sub-3 Akses Internet

Pelaksanaan dan penyelenggaraan Akses Internet merupakan wujud salah satu amanat dari Nawacita: Sembilan Program Perubahan untuk Indonesia ketiga, yaitu terbangunnya infrastruktur yang menunjang konektivitas antar wilayah secara terintegrasi. Kementerian Kominfo hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan penyediaan layanan akses internet.

Adapun yang menjadi fokus lokasi penyediaan akses internet adalah titik layanan fasilitas publik, antara lain Sekolah, Balai Latihan Kerja (BLK), Puskesmas, Lokasi Pariwisata, Balai Desa dan Kantor Pemerintahan serta Markas Komando (TNI/POLRI) yang berada pada daerah 3T, perintisan, perbatasan, daerah yang tidak layak secara ekonomi, dan daerah lainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika.

Dalam mengimplementasikan program akses internet ini, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi sebagai mitra penyedia layanan akses internet dan partisipasi secara *bottom-up* dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah (Pengusul)

terhadap lokasi-lokasi yang akan diusulkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika. Pihak pengusul mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyediakan lokasi dan perangkat pendukung berupa *Personal Computer* (PC) dan perangkat pendukung lainnya untuk penyediaan akses internet
2. Menyediakan catu daya yang memadai untuk penyediaan akses internet
3. Menyediakan sumber daya manusia untuk bertugas sebagai *Person In Charge* (PIC) operator perangkat dan/atau akses internet
4. Memberikan laporan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Kementerian Kominfo atas pemanfaatan akses internet oleh pengguna dan masyarakat di sekitar lokasi

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3. 12, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Penyediaan Akses Internet telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022,

namun belum memenuhi target pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022) dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI Baru: 1.466 Lokasi</li> <li>AI Eksisting: 6.934 Lokasi</li> <li>Total AI: 8.400 Lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI Baru: 4.574 Lokasi</li> <li>AI Eksisting: 11.817 Lokasi</li> <li>Total AI: 16.391 Lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI Baru: -</li> <li>AI Eksisting: 15.556 Lokasi</li> <li>Total AI: 15.556 Lokasi</li> </ul>
<b>Realisasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI Baru: 4.883 Lokasi</li> <li>AI Eksisting: 6.934 Lokasi</li> <li>Total AI: 11.817 Lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI Baru: 3.739 Lokasi</li> <li>AI Existing: 11.817 Lokasi</li> <li>Total AI: 15.556 Lokasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AI Baru: -</li> <li>AI Eksisting: 15.556 Lokasi</li> <li>Total AI: 15.396 Lokasi (terdapat terminasi di 566 lokasi)</li> </ul>
<b>Capaian</b>	140,68%	94,91%	98,97%

▲ Tabel 3. 12 Capaian Penyediaan Akses Internet

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	12.000 Lokasi	27.000 Lokasi	42.000 Lokasi	61.000 Lokasi	91.000 Lokasi
<b>RENSTRA</b>	11.817 Lokasi	19.721 Lokasi	41.721 Lokasi	81.721 Lokasi	121.721 Lokasi
<b>PK</b>	8.400 Lokasi	4.574 Lokasi	9.463 Lokasi	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 13 Target Penyediaan Akses Internet pada RPJMN, RENSTRA, dan PK

Sampai dengan tahun 2022, telah tersedia sebanyak 15.396 titik lokasi akses internet, dengan rincian 11.817 lokasi telah tersedia sejak tahun 2020. Kemudian, sebanyak 3.739 lokasi baru telah dibangun sepanjang tahun 2021, namun terdapat terminasi layanan akses internet di 566 lokasi pada tahun 2022. Dengan demikian, kategori titik pelayanan publik yang telah tersedia Akses Internet adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pemerintahan: 4.699 lokasi
2. Lokasi Wisata: 100 lokasi
3. Pelayanan Kesehatan: 2.874 lokasi
4. Pelayanan Usaha: 97 lokasi
5. Pendidikan: 6.277 lokasi
6. Pertahanan & Keamanan: 244 lokasi
7. Pusat Kegiatan Masyarakat: 467 lokasi
8. Tempat Ibadah: 593 lokasi
9. Transportasi Publik: 45 lokasi

Berdasarkan hasil studi Evaluasi Dampak Program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Tahun 2022, menyatakan bahwa Penyediaan Akses Internet yang diberikan pada sektor pendidikan di antaranya terhadap sekolah level menengah atas (SMA) menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap peningkatan rata-rata nilai Ujian Nasional (UN). Pada SMA jurusan IPA, apabila suatu SMA memiliki akses internet, maka rata-rata nilai UN untuk ketiga mata pelajaran uji meningkat sebesar 9,77% jika dibandingkan dengan SMA yang tidak memiliki akses internet sama sekali. Sementara pada SMA jurusan IPS, apabila suatu SMA memiliki akses internet, maka rata-rata nilai UN meningkat sebesar 9,66% jika dibandingkan dengan SMA yang tidak memiliki akses internet sama sekali. Hal ini dikarenakan pada tingkat SMA, materi pembelajaran semakin rumit dan luas sehingga akses internet di sekolah sangat bermanfaat bagi kegiatan belajar mengajar.

Sementara untuk sektor kesehatan, apabila di suatu puskesmas memiliki akses internet, maka jumlah dokter pada puskesmas tersebut dapat meningkat karena dokter akan lebih mudah dalam melakukan beberapa aktivitas terkait pekerjaannya. Hal ini dapat meningkatkan kualitas dokter di puskesmas tersebut. Dengan adanya dokter yang semakin banyak dan semakin berkualitas akibat *exposure* dengan internet, maka dapat mengakibatkan jumlah kasus KLB dan kasus gizi buruk menurun. Selain itu, penyediaan akses internet dapat menurunkan jumlah kasus gizi buruk diakibatkan oleh penggunaan internet dalam program kesehatan yang dilakukan oleh posyandu.

Hal tersebut dikarenakan penyediaan akses internet dapat dimanfaatkan oleh petugas puskesmas untuk sosialisasi program kesehatan.

Pada tahun 2022, Penyediaan Akses Internet mengalami beberapa kendala di antaranya ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga Kementerian Kominfo hanya berfokus pada pelaksanaan operasional pada titik-titik lokasi akses internet yang sudah terbangun pada tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat beberapa titik layanan publik yang mengajukan terminasi layanan akses internet dikarenakan beberapa titik layanan publik tersebut telah memiliki layanan akses internet secara mandiri.

Hadirnya layanan akses internet di fasilitas publik memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti membuka akses informasi, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pada Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), adanya layanan akses internet memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke lokasi (*telemedicine*) terutama mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum usai dan mengharuskan masyarakat untuk senantiasa tetap di rumah dan menjaga jarak. Selain itu, ketersediaan layanan akses internet di sarana pendidikan sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang terpaksa dilakukan semenjak pandemi. Kemudian, layanan akses internet di kantor pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Sedangkan untuk sektor ekonomi, cukup besar dampaknya bagi pelaku usaha dalam mendapatkan informasi harga suatu produk melalui berbagai aplikasi berbasis *mobile*, selain itu juga dapat membantu dalam perluasan jaringan penjualan sehingga meningkatkan produktivitas.





	2020	2021	2022
<b>Target</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 35%</li> <li>• Paket Tengah: 20%</li> <li>• Paket Timur: 20% (FO &amp; MW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 40%</li> <li>• Paket Tengah: 30%</li> <li>• Paket Timur: 30% (FO &amp; MW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 50%</li> <li>• Paket Tengah: 35%</li> <li>• Paket Timur: 35% (FO &amp; MW)</li> </ul>
<b>Realisasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 36,7%</li> <li>• Paket Tengah: 20,17%</li> <li>• Paket Timur: 16% (FO) &amp; 47,3% (MW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 48 %</li> <li>• Paket Tengah: 33%</li> <li>• Paket Timur: 30,5% (FO) &amp; 73,63% (MW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 63,3%</li> <li>• Paket Tengah: 35,5%</li> <li>• Paket Timur: 35,84% (FO &amp; MW)</li> </ul>
<b>Capaian</b>	97,16%	111,50%	110,14%

▲ Tabel 3. 14 Capaian Utilisasi Palapa Ring

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Persentase (%) Capaian Utilisasi Palapa Ring telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo

Tahun 2022, Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022), dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 35%</li> <li>• Paket Tengah: 10%</li> <li>• Paket Timur: 5% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 40%</li> <li>• Paket Tengah: 15%</li> <li>• Paket Timur: 10% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 45%</li> <li>• Paket Tengah: 20%</li> <li>• Paket Timur: 15% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 50%</li> <li>• Paket Tengah: 30%</li> <li>• Paket Timur: 20% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 60%</li> <li>• Paket Tengah: 40%</li> <li>• Paket Timur: 25% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>
<b>RENSTRA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 35%</li> <li>• Paket Tengah: 20%</li> <li>• Paket Timur: 20% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 40%</li> <li>• Paket Tengah: 30%</li> <li>• Paket Timur: 30% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 45%</li> <li>• Paket Tengah: 40%</li> <li>• Paket Timur: 40% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 50%</li> <li>• Paket Tengah: 50%</li> <li>• Paket Timur: 50% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 60%</li> <li>• Paket Tengah: 50%</li> <li>• Paket Timur: 50% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>PK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 35%</li> <li>• Paket Tengah: 20%</li> <li>• Paket Timur: 20% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 40%</li> <li>• Paket Tengah: 30%</li> <li>• Paket Timur: 30% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paket Barat: 50%</li> <li>• Paket Tengah: 35%</li> <li>• Paket Timur: 35% (FO &amp; MW)</li> <li>• SLA: 95%</li> </ul>	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 15 Target Utilisasi Palapa Ring pada RPJMN, RENSTRA, dan PK

Pada tahun 2022, Kementerian Kominfo menargetkan *Service Level Agreement* (SLA) Palapa Ring sebesar 95% dengan utilisasi Palapa Ring Paket Barat 50% (*Fiber Optic*), Palapa Ring Paket Tengah 35% (*Fiber Optic*), dan Palapa Ring Paket Timur: 35% (*Fiber Optic* dan *Microwave*). Hingga akhir tahun 2022, berikut capaian utilisasi dan SLA jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring:

1. Palapa Ring Barat (menghubungkan 5 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 300 Gbps) terpakai sebesar 190 Gbps (63,3%) dengan SLA 100%
2. Palapa Ring Tengah (menghubungkan 17 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 600 Gbps) terpakai sebesar 213 Gbps (35,5%) dengan SLA 100%
3. Palapa Ring Timur (menghubungkan 35 Ibu Kota kab/kota dengan jaringan *Fiber Optic* dengan kapasitas 800 Gbps dan *Microwave link* dengan kapasitas 5.500 Mbps) *Fiber Optic* yang terpakai 284 Gbps (35,5%) dan *Microwave link* sebesar 4.700 Mbps (85,5%) dengan SLA 100%

Dalam rangka upaya meningkatkan penggunaan Palapa Ring dan pemerataan layanan yang dihasilkan dari jaringan Palapa Ring yang telah terbangun, Kementerian Kominfo akan melaksanakan pembangunan Proyek KPBU Palapa Ring Integrasi. Proyek ini merupakan kelanjutan dari Proyek Palapa Ring (eksisting) yang telah beroperasi sejak 2019, sebagai upaya bersama untuk memenuhi

kebutuhan akses cepat, serta meningkatkan ketahanan dan keutuhan jaringan tulang punggung serat optik nasional. Palapa Ring Integrasi juga akan memberikan kontribusi pada penetrasi internet baik *fixed broadband* maupun *mobile broadband*, terutama di wilayah yang belum terlayani karena adanya kondisi daerah yang tidak hanya sulit secara geografi dan topografi, namun juga mengalami dinamika di sektor ekonomi maupun sosial yang dinamis.

Proyek Palapa Ring Integrasi saat ini tengah memasuki fase penyiapan, setelah studi kelayakan yang berlangsung sejak tahun 2020. Pada tahun 2023 mendatang, akan dilaksanakan proses lelang proyek KPBU tersebut dan konstruksi akan berlangsung setelah penyelesaian proses *financial closing*. Jaringan Palapa Ring Integrasi akan mencakup 78 kabupaten di 14 provinsi. Secara teknis panjang jaringan total 11.610 km yang terdiri dari kabel darat sepanjang 8.601 km, kabel laut sepanjang 3.009 km dan *radio link* sebanyak 46 hops. Jaringan Palapa Ring Integrasi ditargetkan beroperasi pada tahun 2025

Kehadiran Palapa Ring di seluruh wilayah Tanah Air menyediakan layanan internet cepat dengan harga yang murah. Sehingga Palapa Ring diharapkan dapat menjadi solusi dalam pemerataan layanan internet yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Selain itu, di sektor ekonomi, adanya layanan internet cepat melalui Palapa Ring diharapkan dapat mendukung ekonomi digital di Indonesia, misalnya dengan membuka peluang bisnis bagi para pelaku UMKM.

### Sub-5 Jangkauan Infrastruktur Serat Optik *Broadband* pada Kecamatan

Pengguna jaringan *fixed broadband* (jaringan tetap pita lebar telekomunikasi) di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ ASEAN*). Minimnya pengguna jaringan pita lebar di dalam negeri dikarenakan beberapa kondisi di antaranya yaitu terbatasnya layanan dan mahalnya biaya langganan terutama untuk daerah pedesaan dan daerah pelosok.

Berdasarkan data International Telecommunication Union (ITU), jumlah pelanggan jaringan berkecepatan tinggi *fixed broadband* di Indonesia sebanyak 10,71 juta jiwa pada 2020. Angka tersebut hanya 3,92% per 100 penduduk. Artinya, dari 100 penduduk baru 4 yang memakai jaringan pita lebar di tanah air. Pengguna jaringan pita lebar Indonesia tertinggal dibandingkan dengan di Kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam maupun Thailand.

Dalam rangka meningkatkan cakupan layanan *Fixed Broadband* berbasis serat optik yang belum merata Kementerian Kominfo terus

mengupayakan percepatan fasilitasi fiberisasi untuk menjangkau setiap Kecamatan di Indonesia dengan melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait seperti Kemendagri, KemenPUPR, KLHK, dan BUMN (PT.KAI, Jasa Marga, dan lain-lain). Koordinasi dimaksudkan untuk membantu penyelenggara jaringan untuk melaksanakan pembangunan. Melalui program fiberisasi kecamatan diharapkan wilayah kecamatan di seluruh Indonesia dapat dipetakan ketersediaan jaringan akses tetap pitalebar dan strategi untuk menjangkau kecamatan yang belum terjangkau layanan akses tetap pitalebar.

Hingga tahun 2024 ditargetkan 60% kecamatan terjangkau layanan akses tetap pitalebar. Suatu kecamatan digolongkan terjangkau layanan akses tetap pitalebar, apabila dalam wilayah kecamatan tersebut terdapat minimal satu perangkat penghubung kabel distribusi jaringan optik yang disebut *Optical Distribution Point (ODP)*.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Persentase (%) Jangkauan Infrastruktur Serat Optik *Broadband* pada Kecamatan telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022, Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022), dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

Sampai dengan akhir tahun 2022, kecamatan yang terdapat ODP telah mencapai 61% atau sebanyak 4.412 kecamatan dari total 7.230 kecamatan di Indonesia. Capaian ini sudah melebihi target jangkauan layanan akses tetap pitalebar berdasarkan Renstra Kementerian Kominfo 2020-2024 sebesar 60%. Adapun rincian ketersediaan ODP pada Kecamatan di Indonesia dari tahun 2019 s.d. 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	N/A	37,15%	61%
<b>Realisasi</b>	57,58% (4.163 dari 7.230 Kecamatan)	60,84% (4.398 dari 7.230 Kecamatan)	61% (4.412 dari 7.230 Kecamatan)
<b>Capaian</b>	-	163,77%	100%

▲ Tabel 3. 16 Jangkauan Infrastruktur Serat Optik *Broadband* pada Kecamatan

### Tren Ketersediaan ODP

Pada Kecamatan di Indonesia

Grafik 3. 2 Tren Ketersediaan ODP pada Kecamatan di Indonesia



## Sub-6 Pengukuran QoS/QoE Penyelenggara Telekomunikasi

Kementerian Kominfo melakukan kegiatan monitoring kualitas layanan telekomunikasi dengan melakukan pengukuran QoS (layanan suara dan data/internet seluler) terhadap operator seluler guna memastikan layanan prima telekomunikasi. Pengukuran QoS dilakukan pada 514 Kabupaten/Kota.

Hasil pengukuran yang dapat ditampilkan di antaranya, layanan voice dan SMS, kecepatan unggah dan unduh, serta kualitas suara dan video pada layanan *Over the Top* (OTT). Hasil pengukuran kualitas layanan yang dilakukan kemudian dikoordinasikan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk dilakukan optimasi atau perbaikan jaringan telekomunikasi di lokasi-lokasi yang hasilnya kurang baik. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi jaringan telekomunikasi.

Hasil pengukuran QoS dan QoE hingga akhir tahun 2022, *coverage* layanan 4G telah menjangkau 95,64% untuk wilayah pemukiman atau 49,74% untuk seluruh luas wilayah dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan rata-rata kecepatan internet seluler 4G, yakni 14,91 Mbps untuk mengunggah dan 35,46 Mbps saat mengunduh.

Dalam meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi yang diterima masyarakat, Kementerian Kominfo juga membangun Pusat Monitoring Telekomunikasi Layanan telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya, yang meliputi *Dashboard Mobile* Infrastruktur Telekomunikasi dan Pengukur *Coverage* layanan 2G, 3G, 4G untuk seluruh operator seluler, dan Pengadaan Perangkat Pengukuran Kualitas Layanan (*Quality of Service/QoS*) Telekomunikasi *Support* 5G, serta Pengembangan Aplikasi *Signal Monitoring* (SIGMON).

## Capaian IKSS pada Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital

Migrasi siaran televisi analog ke digital atau yang lebih dikenal dengan *Analog Switch Off* (ASO) adalah suatu keharusan, keniscayaan, dan merupakan bagian perkembangan dari perkembangan teknologi yang ada, serta sebagai salah satu wujud dari transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran. Sejumlah negara telah mematikan TV analog melalui International Telecommunication Union (ITU) dalam konferensi ITU 2006, telah memutuskan bahwa 119 negara ITU Region-1 menuntaskan ASO paling lambat 2015. Demikian pula pada konferensi ITU 2007 dan 2012, pita spektrum frekuensi radio UHF (700 MHz) semula untuk televisi terestrial ditetapkan menjadi layanan *mobile broadband*. Sedangkan di tingkat regional terdapat Deklarasi ASEAN untuk menuntaskan ASO di 2020.

Setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani oleh Presiden dan disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi pertanda keseriusan pemerintah dalam mengelola sektor industri penyiaran di Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mempertegas posisi Indonesia dalam menyambut era penyiaran digital. Amanah untuk segera melakukan digitalisasi penyiaran termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 60A dengan bunyi: "penyelenggaraan penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital". Pasal tersebut menjadi landasan yuridis untuk berlakunya migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (PP Postelsiar), pada Pasal 72 angka 8 menyatakan bahwa migrasi penyiaran terestrial teknologi analog ke digital atau dikenal dengan *Analog Switch Off* (ASO) harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak diundangkan. Dengan begitu, maka migrasi TV analog ke digital itu paling lambat terjadi pada 2 November 2022.

Fokus utama yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya digitalisasi penyiaran atau pelaksanaan ASO adalah proses perpindahan dari analog ke digital. Banyak aspek yang terlibat dalam pelaksanaan ASO mulai dari kebijakan *simulcast* dan switch off hingga regulasi sebagai aturan apabila terjadi pelanggaran selama fase migrasi ini. Pemberlakuan ASO harus menjamin keadilan dan baik bagi semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran ini, yaitu dengan menjadikan masyarakat sebagai pembuat konten penyiaran digital tidak hanya menjadi penikmat siaran digital saja.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian target IKSS yaitu Jangkauan Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital. Di luar IKSS yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Menteri Kominfo tahun 2022, Kementerian Kominfo juga memiliki beberapa capaian indikator kinerja utama yang mendukung peningkatan jangkauan layanan penyiaran digital antara lain melalui penyelesaian dukungan infrastruktur penyiaran digital dan pelaksanaan distribusi bantuan *Set Top Box* (STB) bagi rumah tangga miskin.

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022 (%)
			Target	Realisasi	
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>					<b>101,92</b>
3	Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital	Persentase (%)	75	76,44 (199.624.863 orang dari 261.142.385 orang)	<b>101,92</b>
<b>Indikator Kinerja Utama Lainnya</b>					<b>110,39</b>
1	Jumlah dukungan infrastruktur penyiaran digital	Lokasi	15	15	<b>100</b>
2	Jumlah rumah tangga miskin yang mendapatkan layanan penyiaran digital melalui pemberian bantuan <i>Set Top Box</i> (STB)	Rumah tangga miskin	1.000.000	1.207.776	<b>120,78</b>

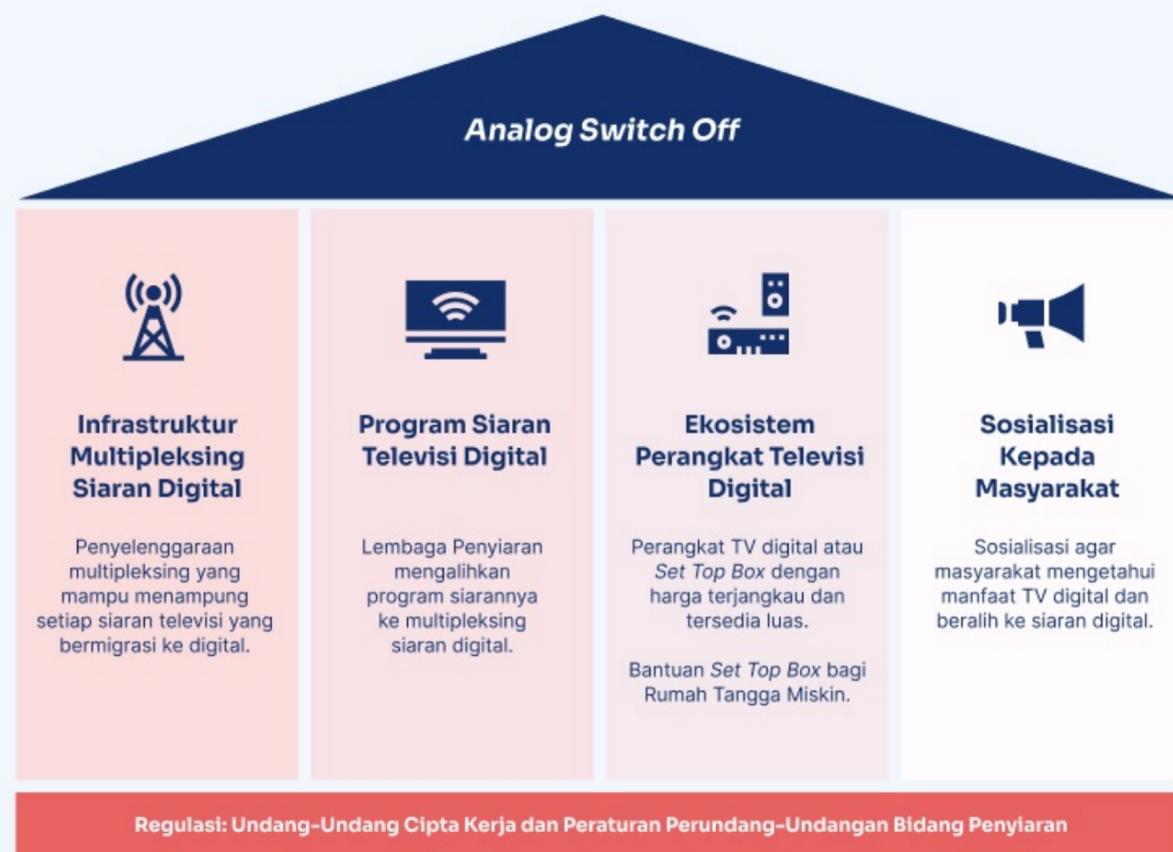
▲ Tabel 3. 17 Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 106,16 dengan status kinerja biru (melebihi target). Penjelasan atas masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

### 3. Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital

Untuk meningkatkan jangkauan populasi penyiaran digital, sepanjang tahun 2022 Kementerian Kominfo bersama dengan seluruh Lembaga Penyiaran akan memastikan proses transisi ke siaran digital berjalan baik.

Untuk itu, Kementerian Kominfo telah menyiapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan secara bersamaan melalui empat pilar utama.



▲ Gambar 3. 5 4 Pilar Persiapan Pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO)

Pilar pertama, menyiapkan infrastruktur multipleksing yang merupakan infrastuktur utama dalam penyiaran digital. Kedua, dengan siapnya infrastuktur multipleksing maka setiap Lembaga Penyiaran harus mulai melakukan peralihan ke siaran digital dan dapat diawali dengan siaran *simulcast*, yaitu siaran digital tanpa mengakhiri siaran analog. Hal ini tentunya untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan dan manfaat dari siaran digital yang kualitasnya bersih, jernih dan canggih. Ketiga, untuk dapat menerima siaran digital maka dibutuhkan perangkat televisi digital atau menggunakan *Set-Top-Box* (STB) sebagai alat bantu bagi rumah tangga yang masih menggunakan

televisi analog. Terakhir, pilar keempat yaitu sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat dan cara untuk menonton siaran televisi digital agar masyarakat terdorong untuk segera beralih ke siaran digital. Sosialisasi dimaksud juga untuk meningkatkan pemahaman dan untuk mengantisipasi mispersepsi yang mungkin terjadi di masyarakat. Kebijakan migrasi siaran televisi analog menjadi siaran digital atau *Analog Switch Off* (ASO) merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital nasional, yang merupakan bentuk komitmen migrasi siaran digital.

Hingga saat ini, dari total 112 wilayah layanan yang terdampak migrasi Siaran Analog ke Digital, terdapat 103 wilayah layanan (318 kab/kota) telah memiliki infrastruktur dan bersiaran secara digital. Sehingga, sisa 9 wilayah layanan (23 kab/kota) yang belum memiliki kecukupan infrastruktur dan sedang dilakukan pembangunan, yaitu Jambi-5, Riau-5, Sulawesi Tengah-6, Maluku Utara-3, Maluku-6, Papua-11, Sulawesi Utara-2, Sulawesi Tengah-3, Papua-7. Kemudian untuk proses migrasi siaran TV analog ke digital, dari keseluruhan lembaga

penyiaran sebanyak 695 Lembaga, status penyiaran saat ini adalah sebagai berikut:

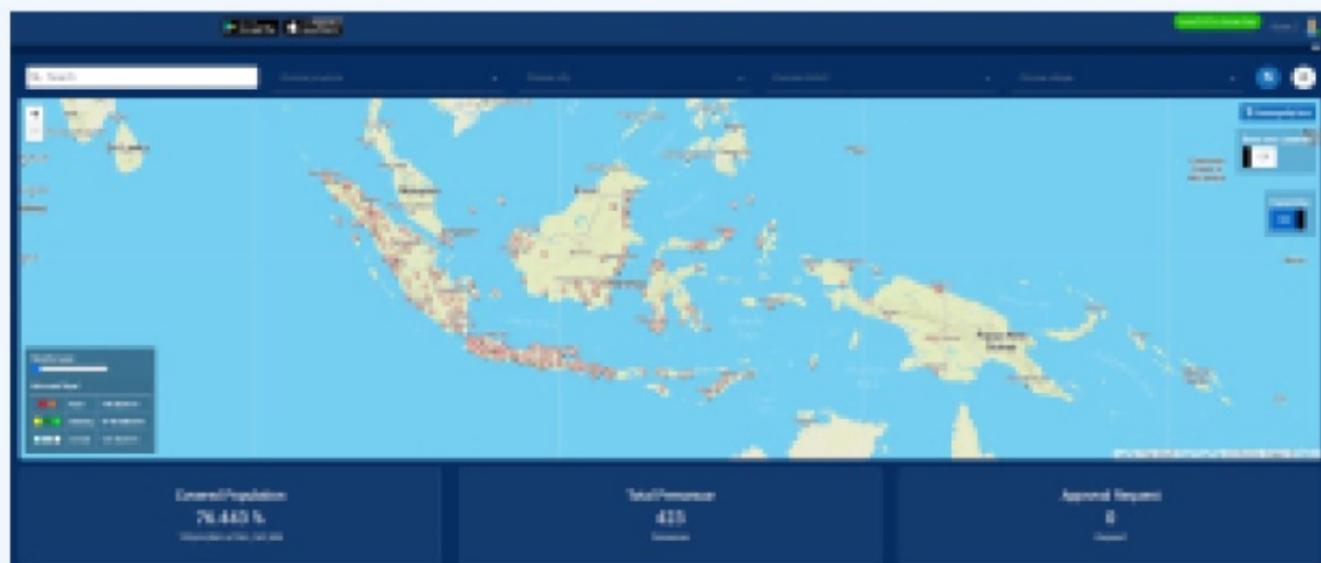
1. 429 Lembaga Penyiaran telah bersiaran secara *simulcast* (siaran analog dan digital bersamaan)
2. 162 Lembaga Penyiaran telah bersiaran seluruhnya secara digital
3. 104 Lembaga Penyiaran berencana akan bermigrasi ke siaran digital tanpa melalui *simulcast*

Lembaga Penyiaran	Jumlah yang harus bermigrasi dari analog ke digital	Jumlah yang telah bersiaran <i>simulcast</i>	Jumlah yang telah bersiaran seluruhnya secara digital	Jumlah yang masih hanya bersiaran analog	Persentase yang sudah bermigrasi ke digital
Lembaga Penyiaran Publik	1	0	1	0	100%
Lembaga Penyiaran Publik Lokal	16	4	4	8	50%
Lembaga Penyiaran Komunitas	15	0	6	9	40%
Lembaga Penyiaran Swasta	663	425	151	87	87%
<b>Total</b>	<b>695</b>	<b>429</b>	<b>162</b>	<b>104</b>	<b>85%</b>

▲ Tabel 3. 18 Progres Migrasi Siaran TV Analog ke Digital berdasarkan Jenis Lembaga Penyiaran

Kementerian Kominfo terus mengupayakan agar jangkauan populasi siaran digital di Indonesia semakin luas. Pada tahun 2022, Kementerian Kominfo menetapkan target sebesar 75% penduduk Indonesia terjangkau oleh penyiaran digital. Hingga akhir tahun 2022, penyiaran digital telah menjangkau

sebesar 76,44% penduduk Indonesia atau sebanyak 199.624.863 penduduk. Hasil ini diperoleh dari tampilan *dashboard* simulasi pemancar televisi digital yang on air dari total 423 pemancar lembaga penyiaran digital.



▲ Gambar 3. 6 Dashboard Simulasi Pemancar Televisi Digital

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	70%	72%	75%
<b>Realisasi</b>	75,50%	77,78%	76,44%
<b>Capaian</b>	<b>107,86%</b>	<b>108,03%</b>	<b>101,92%</b>

▲ Tabel 3. 19 Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital telah memenuhi target yang telah ditetapkan

pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022, Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022), dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	53%	60%	70%	75%	80%
<b>RENSTRA</b>	60%	65%	75%	80%	85%
<b>PK</b>	70%	72%	75%	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 20 Target Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital pada RPJMN, RENSTRA, dan PK

Pelaksanaan *Analog Switch Off (ASO)* telah dimulai pada 2 November 2022 yang diawali dengan memancarnya siaran TV Digital oleh seluruh Lembaga Penyiaran di Jabodetabek dan secara simultan bertahap dilaksanakan di daerah-daerah lainnya. Pelaksanaan ASO dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan membentuk posko-posko termasuk pengukuran di lapangan oleh seluruh UPT Balai/Loka Monitor SFR sesuai jadwal yang telah ditentukan terhadap penghentian pancaran TV Analog. Perkembangan pelaksanaan ASO saat ini adalah sebagai berikut:

1. Dari total 696 Lembaga Penyiaran secara nasional, sebanyak 580 Lembaga Penyiaran telah bermigrasi ke siaran digital yang terdiri dari 77 Lembaga Penyiaran telah bersiaran secara digital dan 503 Lembaga Penyiaran bersiaran secara *simulcast* (siaran analog dan digital bersamaan).
2. Khusus di Jabodetabek, seluruh 25 lembaga penyiaran telah menghentikan siaran analog.

3. Dari total 225 wilayah layanan siaran (514 kab/kota) di Indonesia, 112 wilayah layanan (341 kab/kota) telah memiliki IPP (Izin Spektrum Radio) dan Siaran TVRI yang kemudian target ASO.
4. Saat ini ASO telah dilakukan di 137 wilayah layanan (265 kab/kota) yang terdiri dari 24 wilayah layanan yang sudah ASO dari 112 wilayah layanan target ASO ditambah dengan 113 wilayah layanan yang terlayani siaran tv kabel dan parabola (sudah siaran digital).
5. Sehingga, pelaksanaan ASO masih tersisa untuk 88 wilayah layanan (249 kab/kota) yang akan dilakukan pada tahun 2023 secara bertahap sesuai kesiapan wilayah.



▲ Gambar 3. 7 Wilayah Siaran Sudah ASO

Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2021 membandingkan proses migrasi televisi digital yang dilakukan pada periode tahun 2010 s/d 2018 di beberapa negara seperti Australia, Kanada, AS, Inggris, serta beberapa negara di benua Afrika seperti Afrika Selatan, Uganda, Kenya, dan Tanzania.

Studi tersebut memaparkan hal-hal yang terkait dengan migrasi dari siaran televisi analog ke televisi digital dan hubungannya dengan jangkauan (*coverage*) layanan televisi digital sebagai berikut:

1. Biaya yang dibutuhkan untuk migrasi
2. *Awareness* konsumen / pengguna layanan siaran televisi digital
3. Keberadaan layanan berlangganan berbayar
4. Keberadaan layanan interaktif khusus

 *ITU Regional Radiocommunication Conference* di tahun 2006, 119 negara ITU Region-1 (Eropa, Afrika, Asia Tengah dan Timur Tengah) membuat keputusan bersama untuk menuntaskan *Analog Switch Off (ASO)* paling lambat tahun 2015.

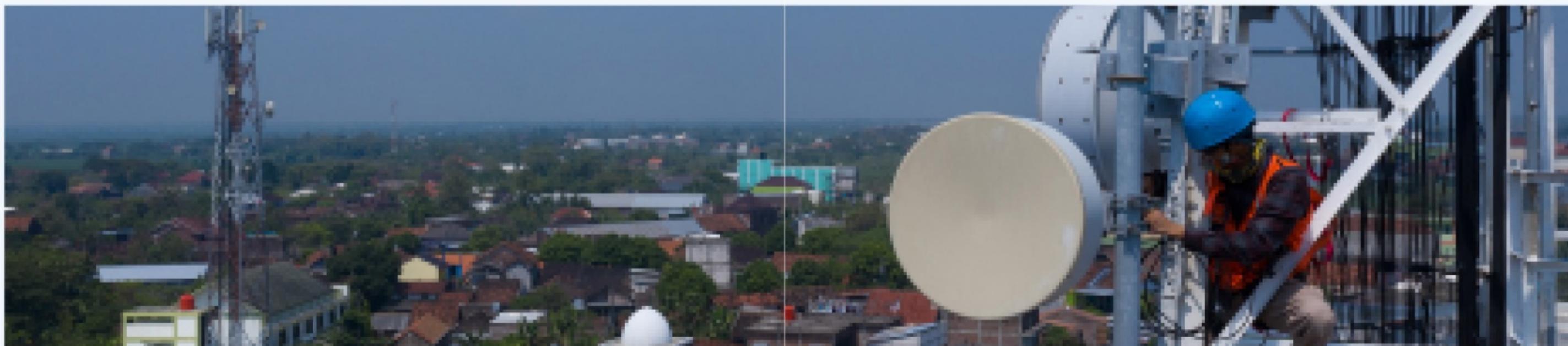
 *ITU World Radiocommunication Conferences* di tahun 2007 dan 2012 telah menyepakati penataan pita spektrum frekuensi radio UHF (700 MHz dan 800 MHz) yang semula digunakan untuk layanan televisi terrestrial dialokasikan untuk layanan telekomunikasi seluler

 ITU menyelenggarakan simposium di tahun 2015 untuk merayakan capaian sejak kesepakatan tahun 2006

 Negara-negara Asia Tenggara memiliki kesepakatan umum di forum ASEAN untuk menyelesaikan ASO di tahun 2020.

Negara	ASO
Belanda	2006
Inggris, Finlandia, Swedia, Norwegia	2007
Jerman, Swiss	2008
USA	2009
Jepang	2011
Korea Selatan	2012
Brunei <i>perbatasan negara</i>	2017
Singapura <i>perbatasan negara</i>	2019
Malaysia <i>perbatasan negara</i>	2019
Vietnam	2020
Thailand	2020
Myanmar	2020
Indonesia	Nov, 2022

▲ Gambar 3. 8 Pelaksanaan Digitalisasi Penyiaran Televisi Terrestrial di Dunia



Biaya migrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perangkat untuk konsumen, perangkat yang digunakan oleh pihak penyiar, serta biaya untuk penempatan sumber daya manusia pada pihak penyiar. Biaya migrasi ini, di sisi konsumen, tentu akan langsung mempengaruhi kemampuan akses konsumen terhadap layanan siaran televisi digital. Sebaliknya, di sisi penyiar, pengaruhnya terasa langsung pada kapasitas siaran yang dibuat oleh pihak penyiar. Tentu semuanya itu menjadi kendala bagi perluasan cakupan siaran televisi digital.

Dalam proses pelaksanaan ASO nasional, terdapat sejumlah kendala antara lain:

### 1. Pembangunan Infrastruktur TV Digital

Penyelenggara multiplexing (mux) mengungkapkan pembangunan infrastruktur TV digital ini menelan biaya besar yang harus mengeluarkan total capex triliunan rupiah secara total industri dalam membangun jaringan penyiaran digital di seluruh Indonesia. Di saat bersamaan, mereka diterpa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pendapatan perusahaan berkurang secara signifikan.

### 2. Masyarakat Belum Siap Pindah

Pelaksanaan ASO mulanya dilaksanakan melalui lima tahapan di mana tahap pertama akan dimulai pada tanggal 17 Agustus 2021. Namun, dikarenakan adanya kondisi pandemi pelaksanaan ASO dipersingkat menjadi tiga tahap di mana tahap pertama dimulai pada 30 April 2022, kemudian dilanjutkan fase kedua dan ketiga pada akhir Agustus dan awal November 2022. Perubahan kebijakan untuk menunda migrasi TV analog ke digital disebabkan karena pemerintah dan seluruh elemen masyarakat masih berfokus pada penanganan pandemi COVID-19 di tahun 2021 di mana hal tersebut memengaruhi kesiapan teknis para pemangku kepentingan untuk melakukan migrasi ke siaran TV digital. Penyelenggara mux menyebutkan

kesiapan masyarakat secara keseluruhan (dari semua lapisan) untuk menerima siaran TV digital masih relatif rendah, baru sekitar 16% dari masyarakat yang sudah memiliki TV digital atau STB.

### 3. Periode pelaksanaan ASO yang relatif singkat

Pelaksanaan suntik mati TV analog yakni dua tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diberlakukan sehingga batas akhir penghentian siaran TV analog ke TV digital secara total jatuh pada tanggal 2 November 2022. Stasiun TV mengungkapkan implementasi ASO di Indonesia lebih cepat dibandingkan negara-negara lain, misalnya Australia yang butuh waktu 3,5 tahun.

Beberapa solusi yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder dengan maksud mengendalikan harga STB yang beredar di pasaran sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat dalam mempersiapkan STB dalam proses migrasi ke TV digital.

Data Pemantauan Harga Set Top Box tahun 2022		
No	Merk	Rupiah
1	POLYTRON PDV 700T2	219.000
2	POLYTRON PDV 600T2	239.000
3	POLYTRON PDV 620T2	239.000
4	JAKARI ADS-525	214.500
5	EVERCOSS STB PRO	222.000
6	EVERCOSS STB MAX	222.000
7	EVERCOSS STB MINI	230.000
8	EVERCOSS STB 1	230.000
9	ZYREX ZBOX-1	215.000
10	CBM 91T	210.000
11	TANAKA DVB T2 NEW	205.000

Data Pemantauan Harga Set Top Box tahun 2022		
No	Merk	Rupiah
12	TANAKA T2 SNIPER	214.999
13	TANAKA TANAKA T2	203.500
14	VENUS CABAI RAWIT	205.000
15	MATRIX RECEIVER GARUDA	220.000
16	MATRIX SET TOP BOX DVB-T2	230.000
17	MATRIX SET TOP BOX APPLE	225.000
18	INTI SET TOP BOX DVB-T2	200.000
19	INTI SET TOP BOX DVB-T2	200.000
20	KUBIK KUBIK ARCA	210.000
21	MODIBOX PD 101	215.000
22	NEXTRON TR 1000	230.000
23	NEXTRON VICSON 2000	230.000
24	SUPER HD 168 YELLOW	215.000
25	ALDO SET TOP BOX AB03	210.000
26	ADVAN SET TOP BOX	210.000
27	NOISE DIAMOND	180.000
28	LUBY DIGITANT DVB-T2-02	210.000
29	LUBY DIGITANT DVB-T2-01	210.000
30	IOTO SET TOP BOX DVB-T2	220.000
31	ADVAN SET TOP BOX STB ST01	250.000
32	VISIO HS1685	225.000
33	NEXT TV SET TO BOX TV DIGITAL	220.000
34	AYRA	225.000
35	LYFE MOTION SET TOP BOX	195.000
36	VENUS CABAI RAWIT	240.000
37	SANEX SN-STB1801	249.000
38	MYVO STAR-02	250.000
39	MYVO STAR-01	225.000
40	INFICO ITB-202	210.000
41	PIOLINE DVB-T2	250.000
42	WELHOME CROWN	250.000

Data Pemantauan Harga Set Top Box tahun 2022		
No	Merk	Rupiah
43	FINITO FNS-B04T2	200.000
44	CBM 81TH	225.000
45	VITARA VTR-218T2	225.000
46	SHARP STB-DD001	300.000
47	Super HD 168 GOL CBM	200.000
48	BSTB-2201	225.000
49	VARWIN T1	250.000
50	ADVAN DVB-10KK	250.000
51	UNICOM APOLLO	220.000
52	ALDO STB 03	200.000
53	ICBM 91TH	200.000
54	WINASAT HD-88 N	195.000
55	TENNOX HD-9000	240.000
56	FREEBOX H-1	200.000
57	CBM DTP2162	190.000
58	EVINIX H-1	275.000
59	NEXTRON TR 1000	259.000
60	JAKARI ADS-2230	269.000
61	MITSUYAMA MS-DVB01	255.000
62	SOGO ROYAL	210.000
63	GOTAMA GTA-04KT2	225.000

▲ Tabel 3. 21 Data Pemantauan Harga Set Top Box tahun 2022

Selain itu, Kementerian Kominfo juga melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang pelaksanaan ASO kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terkait urgensi pelaksanaan ASO serta mendukung peningkatan cakupan layanan siaran digital.

Berikut adalah rekapitulasi kegiatan sosialisasi oleh Kementerian Kominfo yang telah dilakukan dari tahun 2021 hingga tahun 2022.

#### Kegiatan Sosialisasi : 705 Kegiatan

Sosialisasi melalui kanal-kanal konvensional televisi, radio, dan cetak maupun media baru seperti media sosial, Youtube, Instagram, dll. Dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kegiatan	2021	2022
Dialog Interaktif Radio	-	13 sesi
Dialog Interaktif Televisi	11 sesi	12 sesi
Pertunra	15 sesi	15 sesi
Webinar	16 sesi	40 spot
Media Cetak	64 spot	2 spot
Media Online	180 spot	-
Kuis	3 sesi	4 sesi
Fellowship Article	-	302 artikel
Seremoni Bantuan STB	-	18 sesi
Tatap Muka	-	10 sesi

#### Kegiatan Advertorial & Branding : 532 Kegiatan

Advertorial & branding di berbagai media, berikut rincian branding yang telah dilakukan tim komunikasi publik ASO:

Jenis Kegiatan	2021	2022
Infobiz, advertorial online, artikel, news room, dll	-	355 slot
Running text	-	70 slot
Super impose, template grafis	-	4 slot
Advertorial cetak & prime articles	-	15 sesi
Media luar ruang (Billboard, Videotron)	33 titik	55 titik

Digitalisasi penyiaran atau migrasi ke TV digital ini akan menghadirkan siaran televisi yang bersih, jernih, dan canggih bagi masyarakat Indonesia, selain itu ASO bertujuan untuk antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
2. Efisiensi Infrastruktur Industri Penyiaran
3. Peningkatan kualitas siaran
4. Mempertahankan *diversity of ownership*
5. Menumbuhkan industri konten (*Diversity of Content*)
6. *Digital Dividend (broadband, kebencanaan/Public Protection and Disaster Relief)*

## Pencapaian Sasaran Strategis 2 juga didukung oleh Indikator Kinerja Utama Lainnya

### Sub-1 Dukungan Infrastruktur Penyiaran Digital

Kementerian Kominfo berkomitmen untuk terus mempercepat digitalisasi penyiaran di Indonesia, di antaranya dengan membangun infrastruktur TV digital atau *upgrade system headend* dan revitalisasi pemancar. Dengan adanya kegiatan *upgrade sistem headend*, TVRI dapat menjadi pionir dalam sistem penyiaran digital di Indonesia. Maka dari itu, langkah tersebut diharapkan dapat mendorong Lembaga Penyiaran Swasta untuk segera bermigrasi juga dari sistem penyiaran analog menuju sistem penyiaran digital, dengan pelaksanaan migrasi ini negara juga akan diuntungkan dengan adanya frekuensi digital dividen yang dapat dilelangkan sehingga menjadi sumber pendapatan baru bagi negara.

Kementerian Kominfo telah melakukan serangkaian usaha untuk meningkatkan stasiun-stasiun transmisi TVRI antara lain dengan memperbaiki infrastruktur penyiaran TV digital milik TVRI, meningkatkan stasiun pemancar TVRI dari pemancar VHF atau pemancar Analog ke pemancar Digital. *Upgrade Sistem Headend Perangkat Pemancar LPP TVRI Hasil Pengadaan ITTS-II dan Non ITTS-II* telah dilaksanakan di 34 lokasi di tahun 2020, dan 10 lokasi di tahun 2021. Pada tahun 2022, Kementerian Kominfo telah melaksanakan revitalisasi pemancar LPP TVRI pada 15 Lokasi.





▼ Gambar 3. 9 Lokasi Dukungan Infrastruktur Penyiaran Digital

■ 2020

- 1 Sinabang, Kabupaten Simeulue, Aceh
- 2 Gn. Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara
- 3 Padang Sidempuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara
- 4 Natuna, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau
- 5 Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau
- 6 Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
- 7 Gn. Muntai, Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung
- 8 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi
- 9 Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi
- 10 Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Bengkulu
- 11 Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung
- 12 Cikurai, Kabupaten Garut, Jawa Barat
- 13 Gn. Tela, Kota Bogor, Jawa Barat
- 14 Gn. Walad, Kota Sukabumi, Jawa Barat
- 15 Baribis, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
- 16 Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah
- 17 Gn. Depok, Kabupaten Purwokerto/Banyumas, Jawa

- 18 Semanggi, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
- 19 Gn. Doek, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur
- 20 Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
- 21 Sampit, Kabupaten Ketawaringin Timur, Kalimantan Tengah
- 22 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan
- 23 Bima, Kabupaten Bima, NTB
- 24 Seganteng, Kabupaten Lombok Barat, NTB
- 25 Labuhan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT
- 26 Maumere Kabupaten Sikka NTT
- 27 Boroko Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara
- 28 Donggala Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah
- 29 Toboli Kabupaten Parigi Sulawesi Tengah
- 30 Paguyaman Kabupaten Boalemo Gorontalo
- 31 Masohi Kota Masohi Maluku

■ 2021

- 1 Dumai, Riau
- 2 Tembilahan, Riau
- 3 Simarjarunjung, Sumatra Utara
- 4 Pandaisikek, Sumatera Barat
- 5 Singkawang, Kalimantan Barat
- 6 Balikpapan, Kalimantan Timur
- 7 Pagar Alam, Sumatera Selatan
- 8 Sumedang, Jawa Barat
- 9 Cirebon, Jawa Barat
- 10 Kediri, Jawa Timur
- 32 Morotai Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara
- 33 Merauke Kabupaten Merauke Papua
- 34 Sorong Kabupaten Sorong Papua Barat

■ 2022

- 1 Painan, Sumatera Barat
- 2 Gunung Tajam, Belitung
- 3 Prabumulih, Sumatera Selatan
- 4 Sekayu, Sumatera Selatan
- 5 Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
- 6 Sampodo, Sulawesi Selatan
- 7 Ruteng, NTT
- 8 Ende, NTT
- 9 Taeh Bukit, Sumatera Barat
- 10 Biak, Papua
- 11 Rokan Hilir, Riau
- 12 Sinjai, Sulawesi Selatan
- 13 Bone, Sulawesi Selatan
- 14 Mimika, Papua
- 15 Nabire, Papua Tengah

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	34 lokasi	10 lokasi	15 lokasi
<b>Realisasi</b>	34 lokasi	10 lokasi	15 lokasi
<b>Capaian</b>	100%	100%	100%

▲ Tabel 3. 22 Capaian Dukungan Infrastruktur Penyiaran Digital

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Jumlah Dukungan Infrastruktur Penyiaran Digital telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

Kementerian Kominfo Tahun 2022, Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022), dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	44 lokasi satuan transmisi	50 lokasi satuan transmisi	60 lokasi satuan transmisi	74 lokasi satuan transmisi	55 lokasi satuan transmisi
<b>RENSTRA</b>	34 lokasi	34 lokasi	57 lokasi	109 lokasi	110 lokasi
<b>PK</b>	34 lokasi	10 lokasi	15 lokasi	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 23 Target Dukungan Infrastruktur Penyiaran Digital pada PK, RENSTRA, dan RPJMN

Dengan adanya dukungan infrastruktur pemancar TV Digital kerjasama antara LPP TVRI dan Kementerian Kominfo dapat mendorong LPP TVRI menjadi lembaga penyelenggara multipleksing yang diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBPN kepada negara melalui mekanisme sewa slot oleh Lembaga Penyiaran di luar LPP TVRI baik itu lokal maupun nasional. Selain dari pada itu, dengan adanya pembangunan ini akan mendorong upaya pemerintah dalam melaksanakan *Analog Switch Off (ASO)* yang akan diikuti oleh Lembaga Penyiaran Swasta

sehingga dapat memberikan kontribusi PNBPN berupa *digital dividend* (frekuensi yang ditinggalkan oleh LPP TVRI dan LPS yang dapat dilelang dan digunakan untuk sector telekomunikasi). Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dapat lebih optimal, hal lain juga bahwa dengan kerjasama pemanfaatan infrastruktur ini akan tercipta sinergi antara Pemerintah di daerah dan LPP TVRI dalam memberikan dan menyebarkan informasi.

## Sub-2 Distribusi Set Top Box (STB) bagi Rumah Tangga Miskin

Dalam rangka mendukung dan mempercepat proses ASO juga telah dilakukan proses distribusi *Set Top Box (STB)* bagi rumah tangga miskin, yang mana pada tahun 2022 Kementerian Kominfo berkomitmen untuk melaksanakan distribusi STB kepada 1.000.000 Rumah Tangga Miskin.

Hingga akhir tahun 2022, distribusi STB yang dapat dicapai adalah sebanyak 1.207.776 Rumah Tangga Miskin.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	-	-	1.000.000 Rumah Tangga Miskin
<b>Realisasi</b>	-	-	1.207.776 Rumah Tangga Miskin
<b>Capaian</b>	-	-	120,78%

▲ Tabel 3. 24 Capaian Distribusi STB bagi Rumah Tangga Miskin

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Jumlah Dukungan Infrastruktur Penyiaran Digital telah memenuhi target yang telah

ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022, Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022), dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	-	-	-	-	-
<b>RENSTRA</b>	-	-	-	-	-
<b>PK</b>	-	-	1.000.000 Rumah Tangga Miskin	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 25 Target Distribusi STB bagi Rumah Tangga Miskin pada PK, RENSTRA, dan RPJMN

Dalam implementasi menuju ASO, terdapat beberapa tantangan antara lain kesiapan data penerima dan distribusi perangkat penerima siaran TV digital berupa *Set-Top-Box* (STB) bagi rumah tangga miskin, lembaga penyiaran TV Analog yang masih dalam pertimbangan bisnis menentukan partner multipleksing, serta masih perlu dilakukan survei kesiapan penerima siaran TV digital di masyarakat. Menindaklanjuti tantangan tersebut, Kementerian Kominfo melakukan beberapa upaya, agar masyarakat bisa menerima siaran televisi digital, perlu terlebih dahulu dipastikan bahwa perangkat televisi yang dimiliki telah dilengkapi dengan perangkat penerimaan siaran televisi *Digital Video Broadcasting Terrestrial Second Generation* (DVB-T2).

Apabila perangkat televisi belum dapat menerima siaran televisi digital, maka diperlukan alat bantu *Set-Top-Box* (STB) pada perangkat televisi analognya. Kemudian, Kementerian Kominfo telah melakukan sertifikasi atas perangkat STB dan TV digital yang diperdagangkan di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Telekomunikasi sebagai rujukan pembelian STB. Sertifikasi ini dilakukan agar STB yang dibeli dapat berfungsi dengan baik sesuai spesifikasi siaran digital dari lembaga penyiaran, dan aman digunakan serta mendapat layanan purna jual dari produsen. Selain itu, pada pelaksanaan ASO berlangsung, Kementerian Kominfo menyiapkan posko cepat tanggap ASO sebagai antisipasi dari dampak ASO di masyarakat.

▼ Gambar 3. 10 Bantuan Penyediaan Alat Bantu Siaran *Set Top Box* untuk Rumah Tangga Miskin



Sumber foto: <https://infopublik.id>

### Siapa yang Bisa Dapat STB Gratis?

Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengungkapkan pemerintah akan membantu penyediaan alat bantu siaran *Set Top Box*.



**5,6 Juta**  
Penerima STB gratis

**112**  
Wilayah Layanan  
Siaran Pelaksanaan  
ASO

#### Kriteria Penerima STB Gratis

-  Rumah Tangga Miskin yang terdaftar dalam data P3KE (kecuali untuk DKI menggunakan Data Carik)
-  Memiliki pesawat TV analog dan menikmati siaran TV melalui teresterial
-  Lokasi rumah tangga berada di lokasi siaran TV digital
-  Bersedia menerima dan memanfaatkan bantuan STB
-  Dalam satu rumah tangga miskin menerima 1 bantuan STB

 Penyediaan alat bantu siaran *Set Top Box* Gratis berasal dari Bantuan Pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan Dari Lembaga Penyelenggara Multipleksing

Masyarakat miskin yang berhak tetapi belum menerima STB gratis, bisa mengecek dan membuat pengajuan melalui:

1. Halaman web: [cekbantuanstb.kominfo.go.id](http://cekbantuanstb.kominfo.go.id)
2. Bila ada kendala, bisa menghubungi *Call Center* 159



## Capaian IKSS pada Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pemahaman, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital

Sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo, penyiapan SDM talenta digital merupakan poin keempat arahan Presiden terkait percepatan transformasi digital nasional. Persoalan SDM talenta digital menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan percepatan transformasi digital nasional, hal yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu bagaimana menyiapkan pengembangan SDM talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai dan berkelanjutan. Sehubungan dengan pengembangan SDM talenta digital, Kementerian Kominfo memiliki berbagai program dan kegiatan dalam mendukung penyiapan SDM dan talenta digital hingga tahun 2024 mendatang. Salah satu program tersebut adalah literasi digital, Presiden Joko Widodo menilai bahwa literasi digital yang baik akan mendorong pemanfaatan teknologi digital ke arah yang positif, meningkatkan produktivitas, mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ), mendorong kegiatan sosial, filantropi, penggalangan donasi untuk kemanusiaan, meningkatkan gerakan kepedulian, solidaritas dan gotong royong.

Sampai tahun 2024 Kementerian Kominfo akan melakukan kegiatan literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi dengan menargetkan 50 juta masyarakat. Dalam menjalankan program literasi digital, GNLD Siberkreasi akan bermitra dengan seluruh *stakeholder* dari berbagai macam organisasi dan komunitas literasi digital.

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan digital dalam pemanfaatan teknologi digital, Kementerian Kominfo juga melakukan penyiapan SDM dan talenta digital melalui program Digital Talent Scholarship (DTS), Pengenalan TIK, dan Pelatihan ASN. Peningkatan Literasi, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital ini nantinya diperlukan untuk mendukung transformasi digital, mengingat Indonesia masih membutuhkan talenta digital sehingga membutuhkan sebuah persiapan yang matang dan serius untuk dilakukan.

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022 (%)
			Target	Realisasi	
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>					<b>113,95</b>
4	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK	Orang	5.500.000	5.879.720	<b>106,90</b>
5	Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	Peserta	202.675	245.224	<b>120,99</b>

▲ Tabel 3. 26 Meningkatnya Pemahaman, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 113,95 dengan status kinerja biru (melebihi target). Penjelasan atas masing-masing capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

### 4. Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang Digital

Literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Saat ini setiap orang yang terkoneksi dengan internet, dituntut memiliki kecakapan digital. Cakap digital artinya selain bisa mengoperasikan *gadget*, juga mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif, terhindar dari konten negatif, terjaga keamanannya, serta dapat berkreasi dan berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Hal tersebut diperlukan karena belakangan ini penggunaan media digital menjadi kebutuhan dalam setiap aktivitas yang menuntut penerimaan informasi yang begitu cepat, melalui internet yang menyediakan akses informasi yang cepat dan senantiasa diperbaharui setiap saat, di mana setiap individu bebas memasukkan informasi di dunia maya tanpa batasan, sehingga akses terhadap sumber daya informasi digital sangat melimpah. Menurut UNESCO (2018), kemampuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan melalui kemudahan akses pada pelayanan sosial digital oleh pemerintah.

Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital.

Kehadiran media digital tidak selalu berdampak positif terhadap semua lapisan masyarakat. Beberapa tantangan media digital menjadi masalah tantangan serius, seperti penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, dan aktivitas digital yang merugikan lainnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa masyarakat masih belum memahami norma dan aturan yang berlaku di Internet yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, pembinaan dan sosialisasi terhadap norma dan aturan tersebut perlu digencarkan agar dalam memanfaatkan teknologi, masyarakat tidak menyalahi norma dan aturan yang berlaku.

#### UU ITE

Jeratan Hukum *Social Media*



#### PASAL 30

##### Akses Ilegal

Maksimal 6 Tahun penjara  
Denda Rp 600 juta  
Pasal 46 UU ITE



#### PASAL 30

##### Pencurian Data Elektronik

Maksimal 7 Tahun penjara  
Denda Rp 700 juta  
Pasal 46 UU ITE



#### PASAL 30

##### Peretas Sistem Data Elektronik

Maksimal 8 Tahun penjara  
Denda Rp 800 juta  
Pasal 45B UU ITE



#### PASAL 27

##### Kesusilaan | Perjudian | Penghinaan | Pemerasan

Maksimal 6 Tahun penjara  
Denda Rp 1 Milyar  
Pasal 45 UU ITE



#### PASAL 28

##### Berita Bohong | Ujaran Kebencian

Maksimal 6 Tahun penjara  
Denda Rp 1 Milyar  
Pasal 45A UU ITE



#### PASAL 29

##### Pengancaman

Maksimal 4 Tahun penjara  
Denda Rp 750 juta  
Pasal 45B UU ITE

Saat ini, ruang digital menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas. Meski demikian, tantangan yang dihadapi dalam menyikapi perkembangan teknologi adalah ruang digital yang kerap disalahgunakan. Salah satu penyebab fenomena tersebut karena rendahnya kemampuan literasi digital, maka untuk menciptakan ruang digital yang aman, beretika, dan produktif, maka dirancanglah literasi digital sebagai langkah fundamental dalam rangka mendukung akselerasi transformasi digital dan mendorong peningkatan kapasitas dan pengetahuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar masyarakat dapat memahami dasar penggunaan teknologi informasi untuk menyiapkan wawasan bagi masyarakat luas agar

tidak tertinggal dengan perkembangan TIK dan juga memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan teknologi baru. Hal tersebut, dilakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi, dalam pelaksanaan program GNLD tersebut Kementerian Kominfo bekerja sama dengan lembaga dan komunitas pegiat literasi, dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan dasar dalam literasi digital, mulai dari kemampuan mengoperasikan dan mengakses teknologi digital, penekanan pentingnya keamanan personal, menjaga diri dari konten-konten negatif, hingga berkreasi menciptakan konten-konten positif.

Berdasarkan Laporan Survei Status Literasi Digital Indonesia, pelaksanaan program Literasi Digital Nasional didasarkan pada modul dan kurikulum yang mencakup 4 (empat) pilar literasi digital, yaitu *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	205.000 orang	12.448.750 orang	5.500.000 orang
<b>Realisasi</b>	213.143 orang	12.330.670 orang	5.879.720 orang
<b>Capaian</b>	103,97%	99,05%	106,90%

▲ Tabel 3. 27 Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian

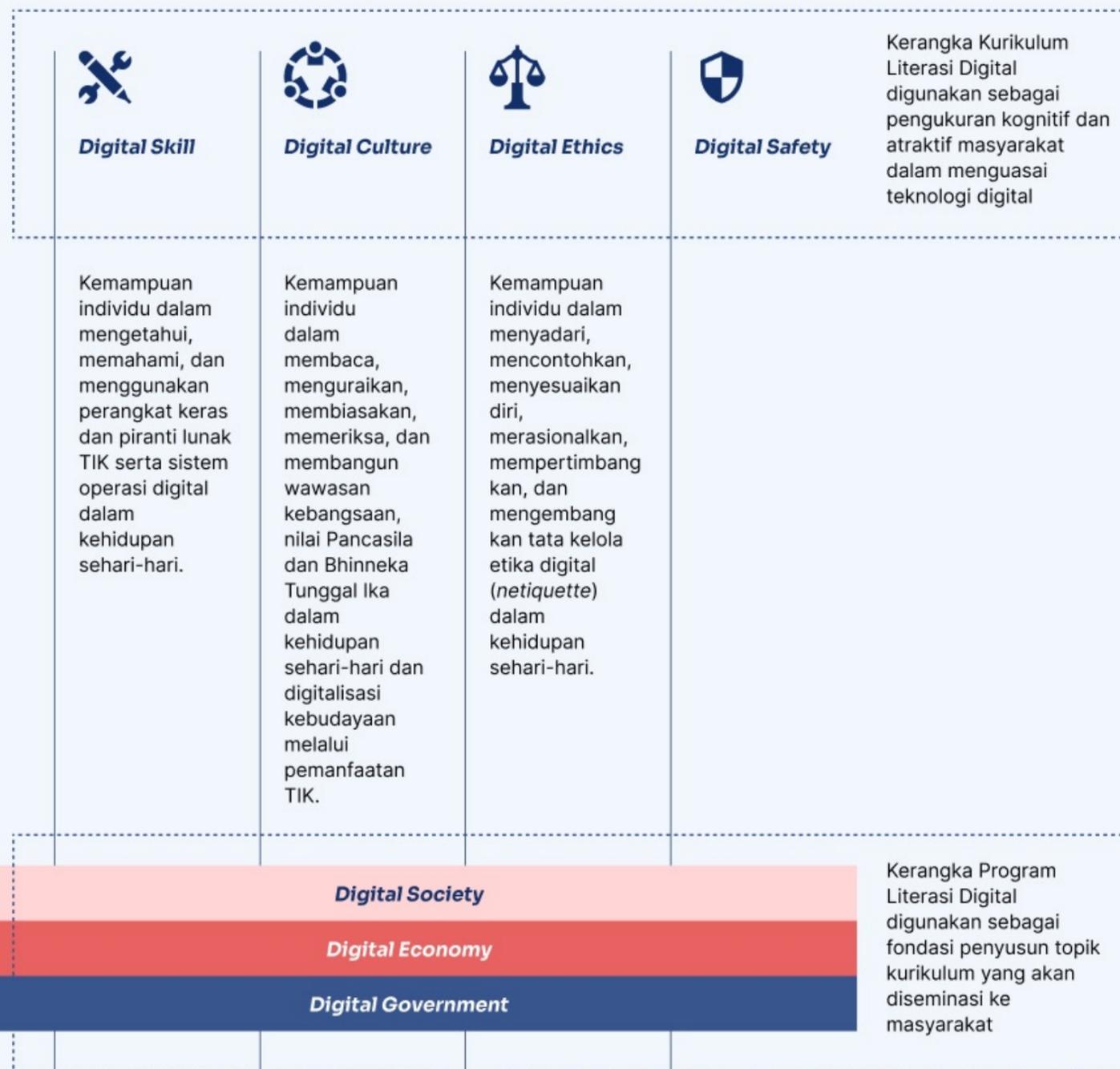
Kominfo Tahun 2022, namun belum memenuhi target pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022) dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	10.000.000 peserta	20.000.000 peserta	30.000.000 peserta	40.000.000 peserta	50.000.000 peserta
<b>RENSTRA</b>	213.143 orang	12.653.750 orang	25.102.500 orang	37.551.250 orang	50.000.000 orang
<b>PK</b>	205.000 orang	12.448.750 orang	5.500.000 orang	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 28 Target Literasi Digital pada RPJMN, RENSTRA, dan PK

### Kerangka Kurikulum dan Program Literasi Digital

Gambar 3. 11 Kerangka Kurikulum dan Program Literasi Digital





Pada tahun 2022, pelaksanaan program Literasi Digital telah diikuti sebanyak 5.879.720 orang dari target 5.500.000 orang yang telah ditetapkan atau 106,90%. Capaian tersebut diperoleh atas usaha bersama seluruh pegiat literasi digital di Indonesia, melalui berbagai variasi kegiatan.

Dalam pelaksanaan Program Literasi Digital, dilaksanakan 3 (tiga) tahapan proses Literasi Digital untuk dapat merealisasikan target yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan berbagai mitra dari Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kominfo, Komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Swasta, Akademisi, Masyarakat Sipil dan Media, baik secara Swakelola, Kontraktual maupun gabungan antara Swakelola dan Kontraktual, yaitu:

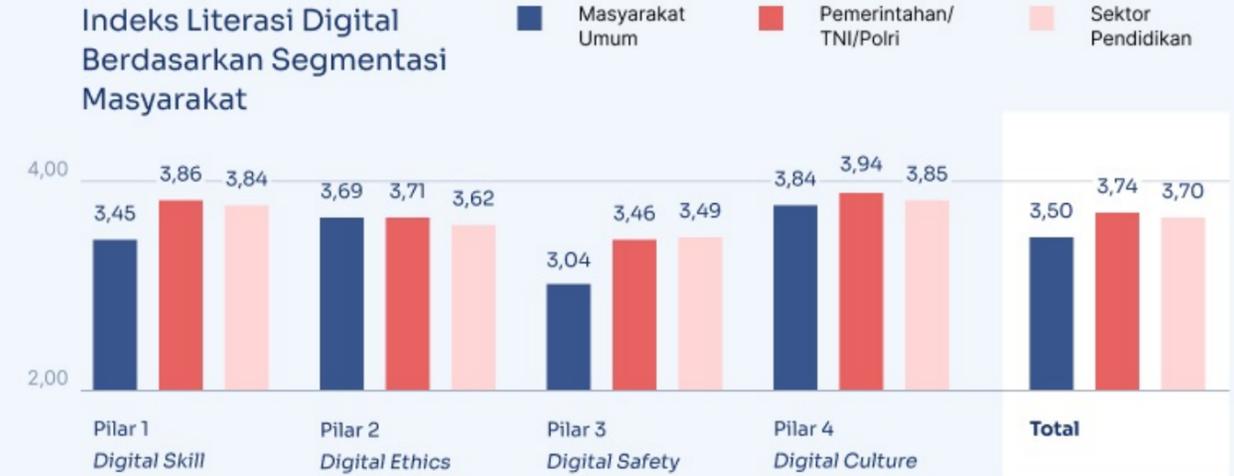
- 1. Platform**  
Web dan aplikasi digital yang terintegrasi sebagai “sekolah” untuk mendalami literasi digital.
- 2. Framework**  
Acuan pengembangan konten literasi digital bagi partner program.
- 3. Activation**  
Rangkaian kegiatan secara *offline* dan *online* untuk memicu penggunaan teknologi digital.

Melalui program Literasi Digital ini, membawa dampak yang cukup signifikan dalam membangun pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam bidang TIK. Hal ini dibuktikan oleh pengukuran indeks Literasi Digital Indonesia yang meningkat. Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 berada pada level “sedang” dengan skor 3,54.

Pengukuran dengan Kerangka Indeks Literasi Digital tahun 2022 ini menggunakan empat pilar, yaitu Kecakapan Digital (*digital skill*), Etika Digital (*digital ethics*), Keamanan Digital

(*digital safety*), dan Budaya Digital (*digital culture*). Berikut merupakan hasil survei berdasarkan Laporan Survei Status Literasi Digital Indonesia Tahun 2022:

### Indeks Literasi Digital Berdasarkan Segmentasi Masyarakat



Grafik 3. 3 Indeks Literasi Digital berdasarkan Segmentasi Masyarakat

Dilihat dari Indeks Literasi Digital berdasarkan segmentasi masyarakat menunjukkan bahwa laki-laki, kelompok pekerja di sektor

pemerintah/TNI/Polri, berpendidikan tinggi, dan tinggal di wilayah urban memiliki indeks lebih tinggi dibanding kelompok lainnya.

### Indeks Literasi Digital Berdasarkan Segmentasi Wilayah



Grafik 3. 4 Indeks Literasi Digital berdasarkan Wilayah

Jika dilihat Indeks Literasi Digital Berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa secara umum Indonesia Barat unggul dibandingkan wilayah lainnya. Adapun Indonesia Tengah merupakan daerah yang paling rendah dibandingkan

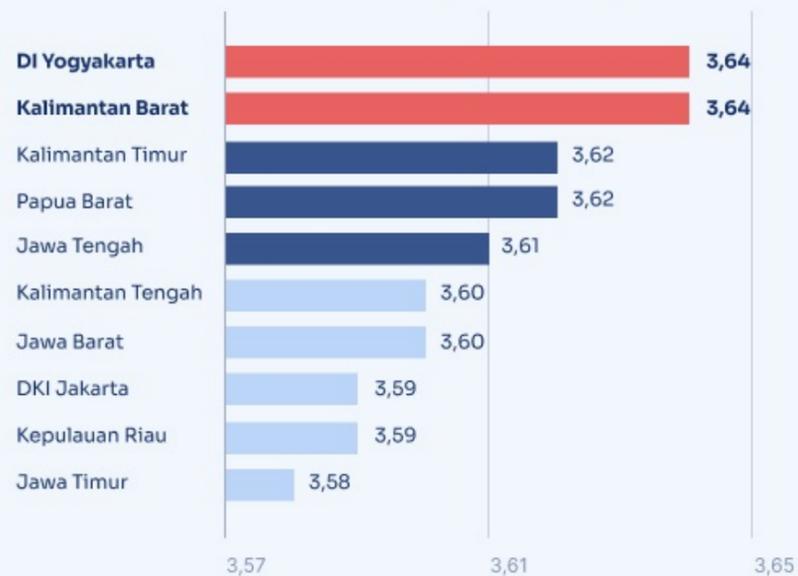
dengan wilayah lainnya. Indonesia Barat unggul pada *Digital Ethics* dan *Digital Culture*, sedangkan Indonesia Timur unggul pada *Digital Skill* dan *Digital Safety*.

### Indeks Literasi Digital dalam Peta



Gambar 3. 12 Indeks Literasi Digital Provinsi D.I. Yogyakarta

### 10 Daerah di Indonesia dengan Skor Literasi Digital Tertinggi



Grafik 3. 5 10 Daerah dengan Indeks Literasi Digital Tertinggi

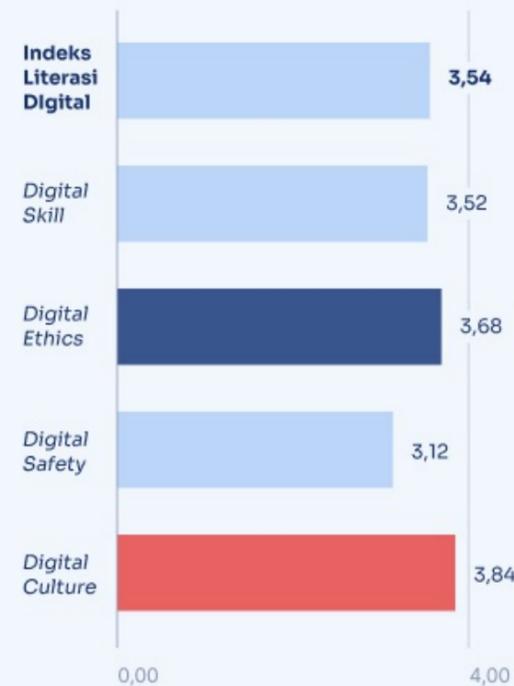
**3,54**

**Indeks Literasi Digital Indonesia 2022**

Indeks Literasi Digital Indonesia 2022 meningkat. Berada pada level "sedang" dengan skor 3,54. Naik 0,05 poin dibanding 2021 yang berada di level 3,49

Dari 34 Provinsi di Indonesia, DI Yogyakarta masih menjadi provinsi dengan Indeks Literasi Digital tertinggi selama tiga tahun berturut-turut, dengan skor indeks tahun ini sebesar 3,64.

### Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Pilar

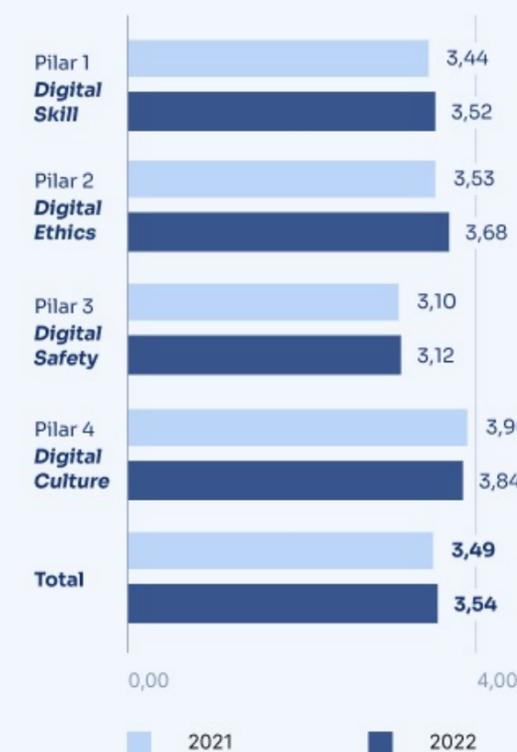


Grafik 3. 6 Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Pilar

Setelah dilakukan transformasi, Indeks Literasi Digital tahun 2022 berada pada angka 3,54. Nilai Pilar *Digital Skill* 3,52, Pilar *Digital Ethics* 3,68, Pilar *Digital Safety* 3,12, dan Pilar *Digital Culture* 3,84. Meskipun perbandingan ini tidak sempurna, namun terlihat bahwa Indeks Literasi Digital tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan Indeks Literasi Digital tahun 2021. Pilar *Digital Ethics* mengalami peningkatan paling tinggi, yaitu menjadi 3,68 dari sebelumnya dengan nilai 3,53.

Masyarakat yang telah memperoleh Literasi Digital, memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi atau menggunakan gawai, sehingga dapat dikatakan telah menjadi warga net (*netizen*) yang bijak dan cerdas, serta menghasilkan ruang digital yang aman dan nyaman.

### Perbandingan Indeks-indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2021-2022



Grafik 3. 7 Perbandingan Indeks-Indeks Literasi Digital Nasional Tahun 2021 - 2022

Dengan demikian, hal tersebut dapat mendorong masyarakat untuk semakin berhati-hati dalam menerima arus informasi dan tidak mudah termakan hoaks.

Literasi Digital merupakan bagian dari percepatan transformasi digital nasional khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital, sehingga membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Dengan melek digital, setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatannya dari internet dan membanjiri ruang digital dengan konten yang bermanfaat sekaligus membentengi diri dari konten negatif yang merusak keutuhan bangsa.

## 5. SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital

Presiden Joko Widodo memberikan arahan dan mendorong pengembangan sumber daya manusia digital atau talenta digital, kebutuhan tersebut bertujuan sebagai dasar untuk membangun ekonomi digital nasional. Di samping itu, menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing juga perlu dilakukan dalam rangka menghadapi bonus demografi pada tahun 2045. Kementerian Kominfo berupaya membangun ruang digital dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia digital untuk memastikan generasi masa depan Indonesia bisa mengambil peran dalam transformasi digital global.

Saat ini, Indonesia masih mengalami permasalahan ketenagakerjaan terutama dalam hal kesenjangan keahlian (*skills gap*) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), di mana kebutuhan tenaga kerja ahli dalam bidang TIK masih belum tercukupi. McKinsey menyebut akan ada 23 juta pekerjaan yang tergantikan oleh adanya otomatisasi. Namun di saat bersamaan, terdapat pula 46 juta pekerjaan baru yang muncul. Laporan World Bank tahun 2016 mencatat bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja semi-terampil dan terampil sebesar 9 juta orang pada tahun 2015—2030. Artinya, ada pekerjaan rumah untuk menghasilkan setidaknya 600.000 orang tenaga kerja tersebut per tahun.

Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi yang cukup besar dan merupakan keempat terbesar di dunia, dalam laporan United Nations World Population Prospects

tahun 2012, disebutkan bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2030—2040 di mana penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun akan mendominasi populasi dengan total 64%. Namun sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir justru usia 15-24 tahun adalah yang paling rentan menjadi pengangguran.

Menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) pada bulan Februari 2018, jumlah tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 5,83% di tahun 2022. Jumlah pengangguran dari Diploma sebesar 6,15%, dari lulusan SMA/Sederajat mencapai 9,16%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tenaga kerja lulusan SMK, SMA, D3, D4 maupun S1 yang belum terserap di dunia kerja.

Minimnya tenaga kerja teknis di bidang digital yang siap kerja, padahal di sisi lain permintaan dari industri cukup besar, menjadi isu yang harus kita pecahkan bersama. Untuk mengatasi isu tersebut, Kementerian Kominfo, sebagai *leading sector* komunikasi dan informatika, mengalami *shifting* peran lebih menjadi fasilitator dan akselerator. Salah satu peran fasilitator yang dijalankan, yakni pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi bidang digital dengan mencanangkan program Digital Talent Scholarship (DTS), Digital Leadership Academy (DLA) dan Pelatihan ASN. Kementerian Kominfo sebagai instansi pembina sektor diharapkan mampu merumuskan strategi untuk menyelesaikan permasalahan *skills gap* tersebut. Program tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai universitas dan *stakeholder* terkait.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	45.000 peserta	105.772 peserta	202.675 peserta
<b>Realisasi</b>	58.116 peserta	133.604 peserta	245.224 peserta
<b>Capaian</b>	<b>129,15%</b>	<b>126,31%</b>	<b>120,99%</b>

▲ Tabel 3. 29 Capaian SDM mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja SDM Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital telah memenuhi target yang telah ditetapkan, baik pada Perjanjian Kinerja

Kementerian Kominfo Tahun 2022, maupun pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022) dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	50.000 peserta	50.000 peserta	50.000 peserta	50.000 peserta	50.000 peserta
<b>RENSTRA</b>	28.986 orang	72.500 orang	72.500 orang	72.500 orang	72.500 orang
<b>PK</b>	60.000 peserta	105.772 peserta	202.675 peserta	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 30 Target SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang TIK pada RPJMN, RENSTRA, dan PK

Jika dilihat pada tabel di atas, terdapat perbedaan antara target yang tercantum antara dokumen RPJMN/RENSTRA dengan PK untuk target SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang TIK. Hal tersebut terjadi karena terdapat arahan langsung dari Menteri untuk ditambahkan target SDM yang mendapatkan peningkatan kompetensi bidang TIK menjadi 200.000 peserta. Sehingga, untuk tahun 2022 target indikator tersebut menjadi 202.675 yang terdiri dari program DTS sebanyak 200.000 peserta dan pelatihan teknis TIK, Fungsional dan Manajerial untuk ASN sebanyak 2.675 peserta. Perubahan tersebut juga telah disepakati dalam Berita Acara (BA) *Trilateral Meeting* Pemutakhiran Renja pada tanggal 13 September 2021.

Kementerian Kominfo melalui Badan Litbang SDM dalam beberapa tahun terakhir telah menyelenggarakan program DTS dan pelatihan ASN sebagai inisiatif konkrit untuk mempercepat pengembangan talenta digital nasional.

Di tahun ini, Kementerian Kominfo telah melaksanakan program DTS dan DLA guna memberikan pelatihan intensif kepada 200.000 peserta agar memiliki keterampilan di berbagai bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan pilihan tema terkait keamanan siber, kecerdasan buatan, mahadata, komputasi awan, dan programming yang termasuk program DLA yang diberikan kepada 400 peserta yang mencakup pimpinan sektor publik dan swasta.

Pelatihan dilakukan dengan bekerja sama dengan 8 (delapan) universitas ternama di dunia, yakni University of Oxford, Harvard Kennedy School, Cornell University, National University of Singapore, Massachusetts Institute of Technology, University of Cambridge, Tsinghua University, dan Imperial College serta menargetkan untuk memberikan fasilitasi kepada 2.675 peserta ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial, dan fungsional.

Menurut laporan Coursera tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ketiga Global Skills Report 2022 dari 102 negara pengguna Coursera, peringkat tersebut naik 39 level dari periode sebelumnya. Coursera mengukur keterampilan peserta didik berdasarkan pencapaian pada masing-masing negara dan menghasilkan peringkat global. Indonesia mendapatkan peringkat teratas dalam bidang keterampilan teknologi dan *data science*.

Kementerian Kominfo menerjemahkan arahan Bapak Presiden dengan meluncurkan program DTS dan Pelatihan ASN. Program tersebut merupakan program pelatihan pengembangan kompetensi yang telah diberikan kepada talenta digital Indonesia sejak tahun 2018 dan pada tahun 2022 DTS dirancang untuk menciptakan ekosistem seimbang dalam memaksimalkan peran *pentahelix* (pemerintah, institusi pendidikan tinggi, komunitas/masyarakat, dunia usaha, dan media) untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital. Program tersebut dirancang sebagai upaya Kementerian Kominfo untuk memberikan pelatihan kecakapan digital di level menengah (*intermediate*) bagi masyarakat Indonesia.

Program DTS diperuntukkan bagi angkatan kerja muda, pekerja level teknis maupun profesional, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin melakukan *reskilling* dan/atau *upskilling* di bidang digital, seperti pelatihan *Cybersecurity, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Cloud Computing, Internet of Things, Mobile Programming, Digital Entrepreneurship, dan Digital Policy*. Program DTS diperuntukkan bagi angkatan kerja muda, pekerja level teknis maupun profesional, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin melakukan *reskilling* dan/atau *upskilling* di bidang digital, seperti pelatihan *Cybersecurity, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Cloud Computing, Internet of Things, Mobile Programming, Digital Entrepreneurship, dan Digital Policy*. Sedangkan program pelatihan ASN ditujukan khusus bagi ASN terkait pendidikan dan pelatihan baik bidang teknis, manajerial, dan fungsional.

Pada tahun 2022, pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi bidang digital, menargetkan pelatihan peningkatan kompetensi bagi 202.675 peserta yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Dengan dukungan mitra kerja dan pelaksana, perumusan ulang skema dan adaptasi di masa pandemi, membuat program peningkatan kompetensi SDM bidang digital tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan pembukaan 8 (delapan) akademi ditambah program pengenalan TIK, dan pelatihan ASN, yaitu:

No	Jenis Akademi/ Pelatihan	Deskripsi Program	Target Program
1	<b>Fresh Graduate Academy (FGA)</b>	Mempersiapkan para lulusan agar memiliki kompetensi profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0 agar dapat bersaing baik di industri dalam maupun luar negeri.	Lulusan D3, D4, S1 bidang TIK, MIPA dan Teknik yang belum atau tidak sedang bekerja
2	<b>Thematic Academy (TA)</b>	Akademi yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil di bidang TIK yang sesuai dengan kebutuhan industri.	Peserta umum yang ditujukan spesifik pada sektor industri/ kalangan tertentu
3	<b>Professional Academy (ProA)</b>	Mempersiapkan alih kompetensi SDM Indonesia dengan cara memberikan pelatihan secara online kepada masyarakat yang sedang bekerja agar tercipta tenaga kerja Indonesia yang lebih adaptif dan produktif. ProA juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas daya saing sumber daya manusia di bidang TIK sebagai bagian dari upaya alih kompetensi dan meningkatkan daya saing.	Peserta umum
4	<b>Government Transformation Academy (GTA)</b>	Meningkatkan kompetensi ASN dalam mendukung akselerasi transformasi digital di instansi pemerintah.	ASN di berbagai kementerian/ lembaga
5	<b>Vocational School Graduate Academy (VSGA)</b>	Program ini mempersiapkan para lulusan vokasi agar memiliki kompetensi profesional dengan tema pelatihan tertentu. Pilihan tema pelatihan, yakni <i>Network Administrator, Web Developer, Mobile Programmer, Graphic Designer, Motion Graphic Artist, Multimedia Designer, Drivetester, Fiber Optic Installation and Activation Technician, Video Editor, dan Data Management Staff</i> .	Lulusan SMK dan D3/D4 bidang TIK, Telekomunikasi, Multimedia, DKV, Elektro, serta yang terkait dan belum atau tidak sedang bekerja
6	<b>Digital Entrepreneurship Academy (DEA)</b>	Program ini bertujuan untuk mencetak <i>Digital Entrepreneur (Digipreneur)</i> baru.	Peserta umum
7	<b>Digital Leadership Academy (DLA)</b>	Meningkatkan kapasitas pemimpin dalam menginisiasi dan mendorong perubahan menuju transformasi digital, yang salah satu output dari pelatihan ini adalah merumuskan kebijakan kolaboratif yang mendorong sinergitas dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri digital sehingga meningkatkan daya saing ekonomi digital Indonesia.	Decision maker/eksekutif setingkat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian/ Lembaga, BUMN, TNI, maupun POLRI
8	<b>Talent Scouting Academy (TSA)</b>	Peningkatan kompetensi peserta di bidang TIK. Program Talent Scouting Academy bekerja sama dengan mitra perguruan tinggi dan perusahaan teknologi global dengan konsep pembelajaran secara daring serta <i>hybrid</i> .	Mahasiswa tingkat akhir berprestasi mitra kerja sama dengan Kementerian Kominfo
9	<b>Pelatihan ASN</b>	Pendidikan dan pelatihan baik bidang teknis, manajerial, dan fungsional.	ASN

▲ Tabel 3. 31 Jenis/Akademi Pelatihan Program

Sepanjang tahun 2022, sebanyak 245.224 orang telah mengikuti program pelatihan peningkatan kompetensi SDM bidang digital, secara rinci capaian pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

▼ Tabel 3. 32 Capaian Target Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Digital

No	Jenis Akademi/ Pelatihan	Target	Pendaftar	Peserta yang Diterima	Peserta On Boarding	Peserta yang Tersertifikasi
1	Fresh Graduate Academy (FGA)	25.000 orang	43.996 orang	35.850 orang	28.496 orang	1.731 orang
2	Thematic Academy (TA)	38.000 orang	68.509 orang	53.936 orang	47.579 orang	259 orang
3	Professional Academy (ProA)	35.000 orang	47.260 orang	46.776 orang	38.637 orang	252 orang
4	Government Transformation Academy (GTA)	25.300 orang	28.633 orang	27.284 orang	25.645 orang	-
5	Vocational School Graduate Academy (VSGA)	14.000 orang	32.947 orang	18.123 orang	16.794 orang	9.570 orang
6	Digital Entrepreneurship Academy (DEA)	56.800 orang	125.968 orang	90.650 orang	74.904 orang	-
7	Digital Leadership Academy (DLA)	400 orang	1.066 orang	571 orang	563 orang	-
8	Talent Scouting Academy (TSA)	5.500 orang	12.063 orang	10.741 orang	10.244 orang	817 orang
9	Pelatihan ASN	2.675 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diklat Teknis: 878 orang</li> <li>Diklat Manajerial: 1.155 orang</li> <li>Diklat Fungsional: 329 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diklat Teknis: 878 orang</li> <li>Diklat Manajerial: 1.155 orang</li> <li>Diklat Fungsional: 329 orang</li> </ul>	Peserta mengikuti ujian: <ul style="list-style-type: none"> <li>Diklat Teknis: 873 orang</li> <li>Diklat Manajerial: 1.153 orang</li> <li>Diklat Fungsional: 329 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diklat Teknis: 783 orang</li> <li>Diklat Manajerial: 1.150 orang</li> <li>Diklat Fungsional: 329 orang</li> </ul>

Target program pelatihan peningkatan kompetensi SDM bidang digital tahun ini telah tercapai meski mengalami peningkatan target yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun dalam penyelenggaraannya terdapat isu atau kendala yang dihadapi, antara lain:

- Drop rate* yang tinggi pada pelatihan yang dilaksanakan secara daring;
- Aplikasi pendaftaran masih terdapat kendala sistem yang dikarenakan perubahan penyedia, laman yang kurang *user friendly*, dan literasi peserta yang belum memadai

Kementerian Kominfo telah melakukan upaya dalam menghadapi permasalahan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan pelatihan DTS, antara lain:

- Mengoptimalkan dan memaksimalkan sosialisasi pelatihan DTS kepada masyarakat sesuai segmen akademi pelatihan untuk menjadikan DTS sebagai *top of mind* program prioritas Kementerian Kominfo
- Perubahan manajemen pengelolaan aplikasi pendaftaran dari semula penunjukkan pihak ketiga sebagai pengelola di tahun 2022, diganti menjadi *in house* Tim IT

Dengan diselenggarakannya program pelatihan peningkatan kompetensi SDM bidang digital, Kementerian Kominfo dapat berkontribusi dalam mengurangi pengangguran khususnya tenaga kerja di bidang Komunikasi dan Informatika, serta meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di bidang kecakapan digital. Kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, khususnya tenaga kerja di bidang TIK. Selain itu, Kementerian Kominfo memfasilitasi bagi tenaga kerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau berhenti bekerja dan ingin memulai jalur karir yang baru dengan mempersiapkan alih kompetensi bagi tenaga kerja melalui *reskilling* dan *upskilling*.

Selain itu, berdasarkan hasil studi Evaluasi Dampak Program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Tahun 2022, menyatakan bahwa peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi bidang digital berdampak terhadap beberapa hal sebagai berikut:

- Memiliki waktu tunggu rata-rata yang lebih singkat untuk mendapatkan pekerjaan sejak menyelesaikan pendidikan, dibandingkan dengan peserta yang telah mendaftar namun tidak mengikuti program.
- Secara rata-rata menghadapi respon yang lebih baik ketika mereka sedang mencari kerja. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata tingkat respon, baik dalam melakukan tahap seleksi lanjutan, wawancara, hingga memberikan tawaran kerja atau *offering letter*.
- 70% dari seluruh responden menyatakan jika keterampilan yang didapatkan dalam pelatihan digunakan pada pekerjaan sekarang. Hal ini memberikan gambaran singkat mengenai dampak program DTS terhadap kesesuaian kebutuhan industri.
- Keterampilan yang digunakan mengindikasikan bahwa perusahaan memang membutuhkan talenta digital dengan kapabilitas tertentu. Hal ini kembali diperjelas dengan 68 persen responden (peserta pelatihan) setuju jika melalui pelatihan DTS dapat meningkatkan performa kinerja.

Secara keseluruhan, penerima manfaat dari program pelatihan peningkatan kompetensi SDM bidang digital dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang TIK dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang memiliki keahlian di bidang profesi masing-masing untuk memperoleh kompetensi tambahan serta menciptakan sumber daya manusia yang lebih adaptif dan produktif dengan mengoptimalkan teknologi, demi memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat di multi sektor.

## Capaian IKSS pada Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut pemerintah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat (*obligation to tell*), dan untuk memenuhi hak untuk tahu (*right to know*). Hal tersebut terkait erat dengan tugas Kementerian Kominfo untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas sebagaimana menjalankan fungsi sebagai *Government Public Relations* (GPR).

Komunikasi publik merupakan penghubung antara publik dengan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah kepada publik. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang informasi dan komunikasi publik dan kehumasan pemerintah melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo diamanatkan untuk bisa menjadi koordinator pada bidang komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat.

Melalui peran ini, Kementerian Kominfo diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat agar dapat mengetahui setiap kebijakan yang sudah maupun sedang direncanakan pemerintah, beserta capaiannya, dengan tujuan agar kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat, di mana hal tersebut menjadi salah satu agenda penting saat ini.

Untuk itu, perlu pemahaman tentang pentingnya komunikasi publik terhadap kebijakan pemerintah serta bagaimana strategi yang harus dilakukan agar komunikasi publik tersebut menjadi efektif. Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, diukur berdasarkan keberhasilan pencapaian target IKSS, yaitu Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah.



**Tugas Kementerian Kominfo, dalam Inpres tersebut diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan Pemerintah (*Government Public Relations* "GPR").**

Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan berkualitas baik.

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022 (%)
			Target	Realisasi	
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>					<b>108,84</b>
6	Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	Persentase (%)	73	79,45	<b>108,84</b>

▲ Tabel 3. 33 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

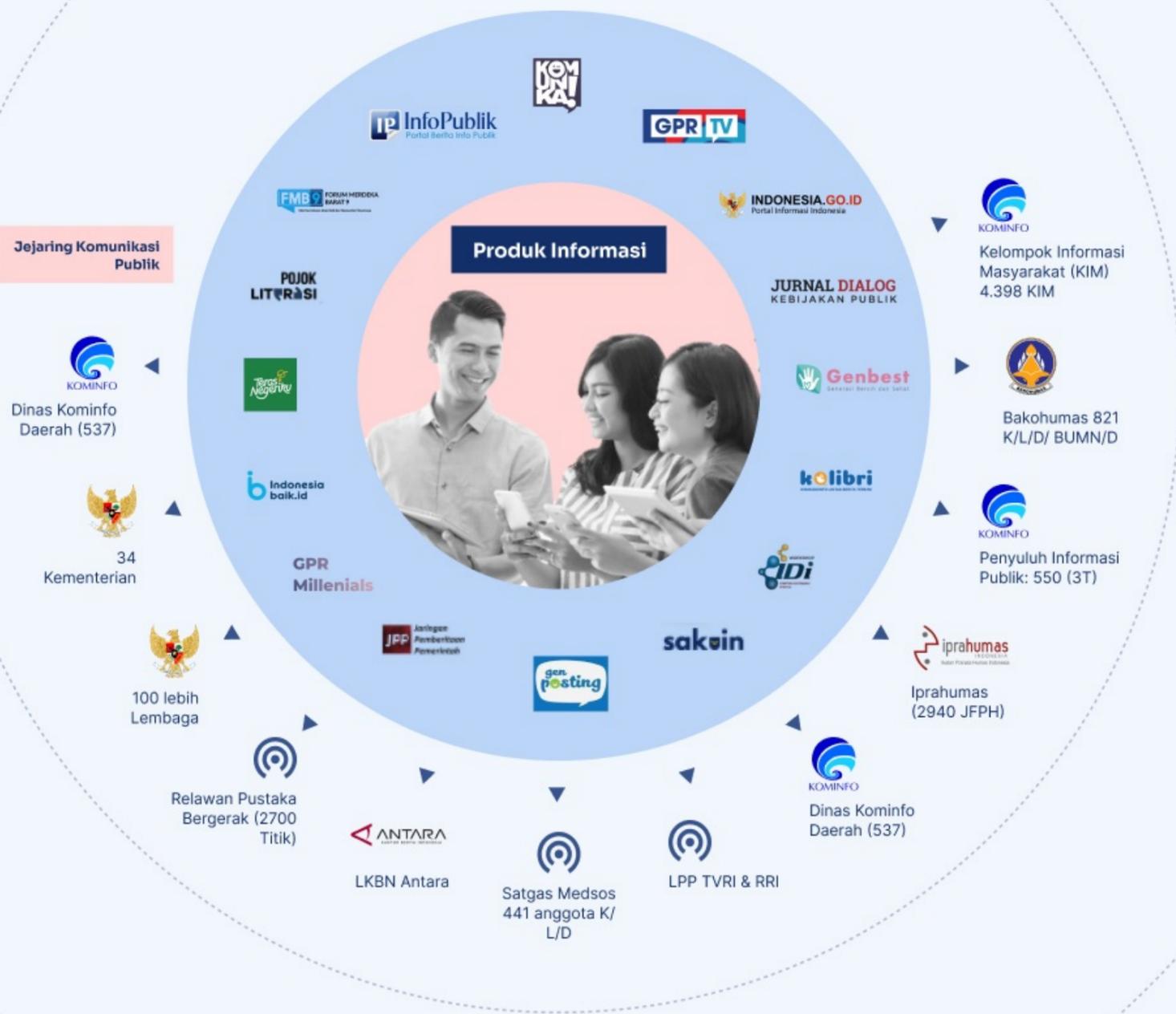
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 108,84 dengan status kinerja biru (melebihi target). Penjelasan atas capaian indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

### 6. Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

GPR merupakan strategi komunikasi yang memanfaatkan berbagai saluran komunikasi dalam rangka menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Untuk menguatkan fungsi GPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Presiden menginstruksikan kepada para Menteri, Kepala Lembaga Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan dari masing-masing Kementerian/ Lembaga dalam rangka mendukung pelaksanaan komunikasi publik.

Diseminasi informasi komunikasi publik dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kanal-kanal diseminasi yang dimiliki pemerintah, seperti Indonesiabaik.id, GPRTV, Infopublik.id, Indonesia.go.id, Komik Komunika, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, dan majalah GPRNews.

## Produk Informasi dan Jejaring Komunikasi Publik



Gambar 3. 13 Produk Informasi dan Jejaring Komunikasi Publik

Secara garis besar isu prioritas komunikasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo melalui produk informasi dan jejaring komunikasi publik yang tersedia, antara lain:

- ### Isu Prioritas
- Percepatan Penurunan Angka Stunting
  - Pendidikan Karakter Pancasila
  - Gerakan Bangga Buatan Indonesia
  - Literasi Keuangan Digital
  - Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat
  - Sosialisasi RUU KUHP
  - Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022

Gambar 3. 14 Tema Program Prioritas Komunikasi Publik

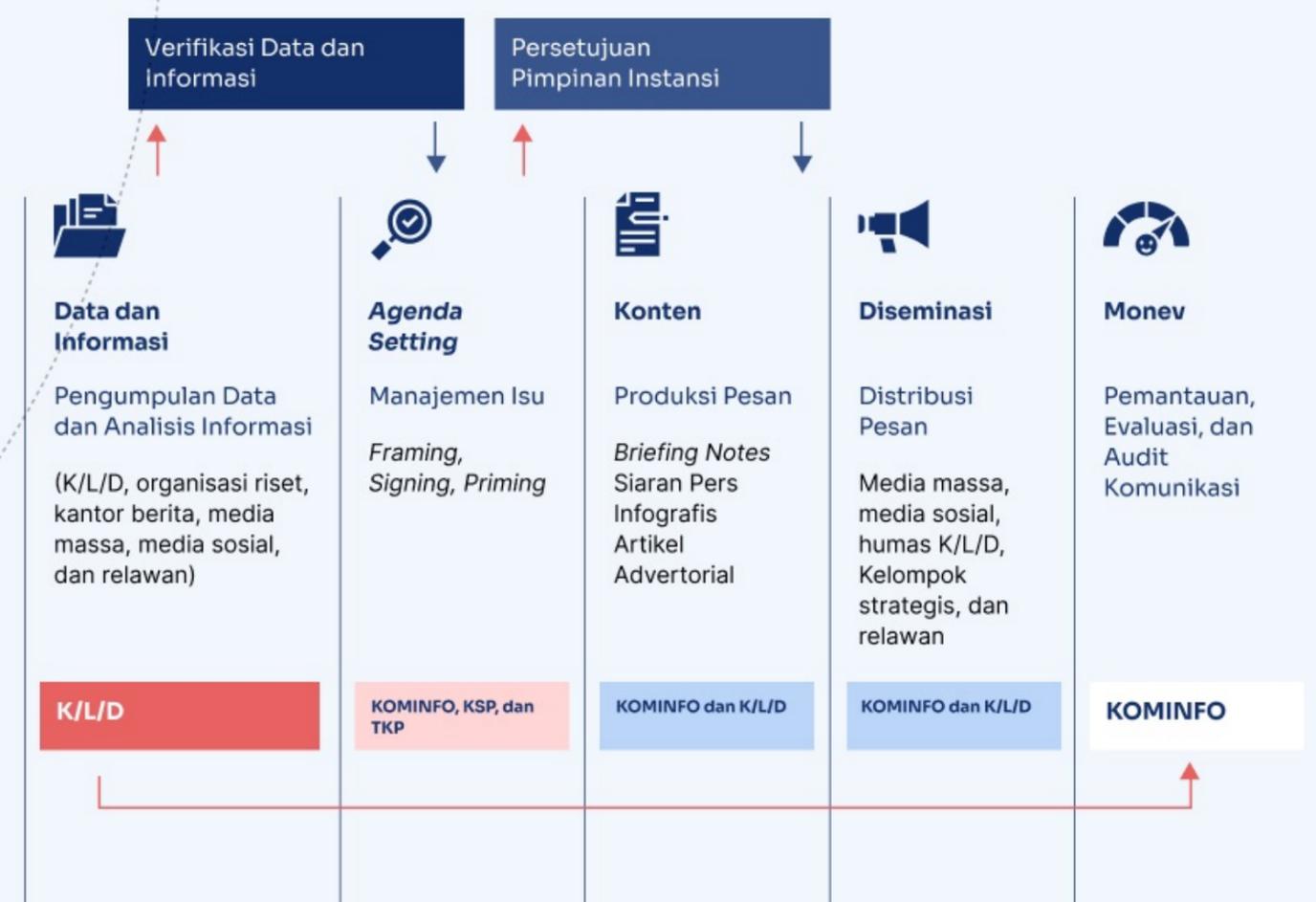
Dalam pelaksanaan diseminasi informasi komunikasi publik, Kementerian Kominfo berusaha membangun manajemen informasi yang efektif dan efisien.

Alur kerja GPR dimulai dari pengumpulan data dan analisis informasi, kemudian manajemen isu, memproduksi pesan, distribusi pesan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada gambar berikut.

### Government Public Relations

### Alur Kerja Pengelolaan Komunikasi Publik

Gambar 3. 15 Bisnis Proses GPR



Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, Kementerian Kominfo telah mendiseminasikan kebijakan dan program Pemerintah, serta kegiatan internasional dan nasional, diseminasi informasi program-program prioritas pemerintah di bidang POLHUKAM, bidang Perekonomian dan Maritim, serta bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan diseminasi informasi kegiatan nasional maupun internasional.

Dalam menjalankan fungsi *Government Public Relations*, Kementerian Kominfo selama tahun 2022 telah melaksanakan diseminasi program prioritas pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai kanal informasi baik *below the line*, *through the line*, dan *above the line*. Selain itu, Kementerian Kominfo dalam melaksanakan diseminasi informasi juga menggandeng berbagai mitra strategis seperti kelompok informasi masyarakat, penyuluh agama, lembaga keagamaan, universitas maupun organisasi masyarakat lainnya.

Pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik tentunya perlu diukur untuk mengetahui sejauh mana capaian pelaksanaan tersebut.

Pengukuran kinerja pelaksanaan pengelolaan komunikasi dan informasi publik ini, diukur dengan melihat persepsi publik atas akses informasi publik, kualitas informasi publik, dan kepuasan terhadap akses dan kualitas informasi publik tersebut. Pengukuran tahun 2022 dilaksanakan melalui survei persepsi di mana ruang lingkup survei adalah untuk mengukur ketersediaan akses dan kualitas informasi publik, serta kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah. Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode sampling di mana jumlah sampling adalah 400 panel yang tersebar di 13 Kota di Indonesia yang dianggap mewakili seluruh masyarakat. Penetapan sampling berdasarkan teori *Central Limit Theorem* di mana distribusi sampling mendekati distribusi normal ketika ukuran sampel semakin besar. Apabila jumlah sampel mencukupi ( $n \geq 30$  responden), maka distribusi sampel dapat dianggap memenuhi distribusi normal. Penambahan jumlah responden lebih banyak tidak akan mempengaruhi hasil secara signifikan.

Gambar 3. 16 Ruang Lingkup Survei Persepsi Publik



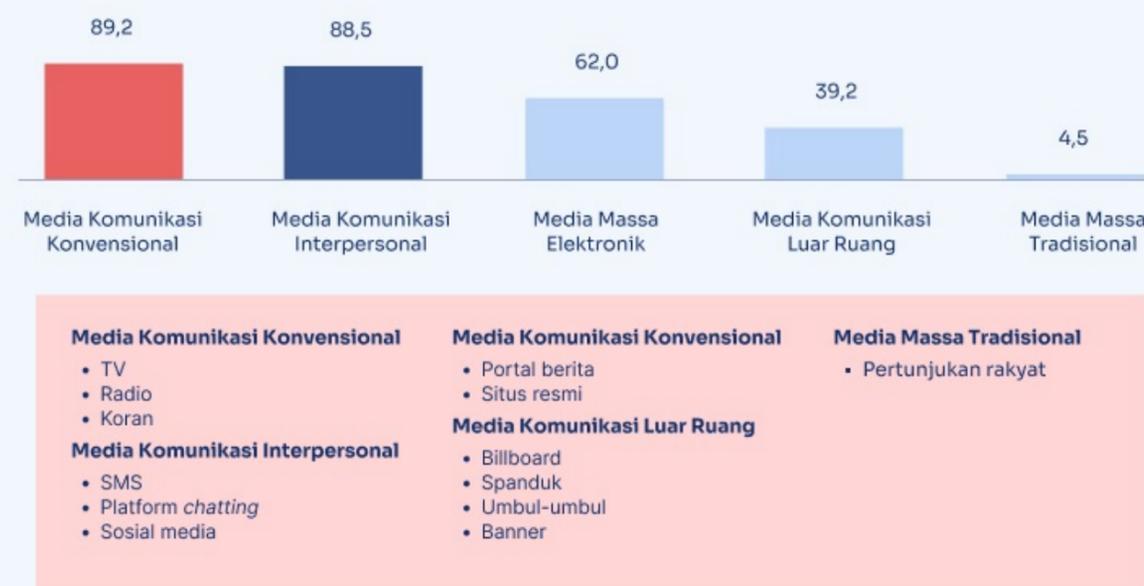
Mengukur penilaian dan kepuasan masyarakat terhadap kualitas, akses, dan penyampaian informasi publik terkait isu-isu prioritas maupun kebijakan masyarakat.

Referensi Informasi	Konten Informasi	Konteks Informasi	Penyampaian Informasi (Deliverable)
<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Jenis Informasi</b> Preferensi jenis informasi yang disimak</li> <li><b>Waktu Mengakses</b> Preferensi hari dan waktu menyimak informasi</li> <li><b>Lama Mengakses</b> Durasi dalam menyimak informasi</li> <li><b>Media Komunikasi</b> Media yang digunakan untuk menyimak informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Isu Prioritas</b> Isu-isu prioritas nasional yang banyak diberitakan di media nasional</li> <li><b>Pendapat</b> Tanggapan responden terhadap informasi dan pemberitaan isu prioritas</li> <li><b>Jenis Konten</b> Konten - konten yang tersedia dalam pemberitaan isu-isu prioritas (gambar, tulisan, audio, video)</li> <li><b>Pengemasan Informasi</b> Pengemasan informasi dan pemberitaan isu-isu prioritas</li> </ol>	<p><b>Kesesuaian Informasi &amp; Pemberitaan</b></p> <p>Penilaian responden terhadap aspek-aspek pemberitaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Saluran Komunikasi</b> Saluran komunikasi untuk menyimak isu-isu prioritas</li> <li><b>Media Sumber Informasi</b> Tipe media yang digunakan</li> </ol>

Survei ini melihat apakah ekspektasi masyarakat terhadap akses yang tersedia dan kualitas informasi yang mereka terima sudah sesuai atau belum memenuhi ekspektasi mereka.

Terdapat beberapa aspek dari masyarakat dalam memperoleh informasi publik dalam hasil survei tersebut.

### Saluran Informasi yang Tersedia di Domisili Responden (%)



▲ Grafik 3. 8 Saluran Informasi yang Tersedia di Domisili Responden (%)

Kedua terkait dengan *awareness* terhadap isu-isu prioritas, mayoritas responden lebih *aware* terhadap isu prioritas yang berkaitan dengan Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022,

diikuti dengan isu mengenai Percepatan Penurunan Angka *Stunting*, dan Sosialisasi RUU KUHP menjadi isu prioritas yang paling rendah tingkat *awareness*-nya.

### Awareness Isu Prioritas Nasional (%)



▲ Grafik 3. 9 Awareness Isu Prioritas Nasional (%)

Ketiga, terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diperoleh, media *online* dan televisi adalah media informasi yang paling sering diakses masyarakat.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan parameter aspek dari survei akses dan kualitas informasi publik terkait isu prioritas nasional pada masyarakat diperoleh hasil 79,45% yang menunjukkan hasil nilai indikator akses dan kualitas informasi publik di dalam survei ini.



**78,4%**

Nilai kualitas akses berada pada angka 78,4% yang didapat dari akumulasi 7 isu prioritas, yakni:



**80,5%**

Nilai kualitas konten sebesar 80,5 didapat dari akumulasi 7 isu prioritas, yakni:

1. Penurunan angka <i>stunting</i>	87,6%
2. Pendidikan karakter pancasila	75,9%
3. Gerakan Bangga Buatan Indonesia	79%
4. Literasi keuangan digital	85,5%
5. Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat	79,5%
6. Sosialisasi Rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	77%
7. Sosialisasi Presidensi G20 Indonesia	79%

1. Penurunan angka <i>stunting</i>	85,4%
2. Pendidikan karakter pancasila	74,6%
3. Gerakan Bangga Buatan Indonesia	72,6%
4. Literasi keuangan digital	82,3%
5. Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat	75%
6. Sosialisasi Rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	81,6%
7. Sosialisasi Presidensi G20 Indonesia	77,6%

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	70%	72%	73%
<b>Realisasi</b>	75,50%	77,78%	79,45%
<b>Capaian</b>	<b>107,86%</b>	<b>108,03%</b>	<b>108,84%</b>

▲ Tabel 3. 34 Capaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah

melebihi target yang telah ditetapkan, baik pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022, maupun pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022) dan RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022).

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	70%	71%	71%	72%	72%
<b>RENSTRA</b>	71%	72%	73%	74%	75%
<b>PK</b>	70%	72%	73%	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 35 Target Kepuasan Masyarakat terhadap Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah pada RPJMN, RENSTRA, dan PK



Penyampaian informasi terkait isu prioritas diharapkan bisa memberikan informasi yang relevan, variatif serta dari sumber yang bisa dipercaya. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Konten	Konteks	Delivery
<p>Exposure berita isu prioritas nasional yang dinilai masih kurang dari beberapa responden, di mana para responden mengaku kesulitan dalam mengakses berita isu prioritas tersebut, karena ketutup berita lain yang kurang relevan.</p>	<p>Banyaknya pemberitaan yang menggunakan <i>clickbait</i> sehingga informasi dan judul tidak sesuai yang diharapkan para responden.</p> <p>Para responden menyatakan adanya kendala akses karena beberapa berita diblokir oleh pemerintah kalau ada masalah di beberapa daerah di Indonesia.</p>	<p>Beberapa responden menyatakan bahwa terlalu banyak iklan menjadi kendala dalam mengakses informasi terkait isu-isu prioritas nasional melalui saluran komunikasi yang digunakan untuk menyimak.</p>
<p>"Pertama masuk terlalu banyak iklan yang muncul, apabila salah klik malah masuk ke laman yang lain jadi harus ulang dari awal"</p> <p>-FGD Grup 3</p>	<p>"Judul yang tertera memancing masyarakat, mungkin itu untuk menarik perhatian tapi bisa berdampak negatif bagi pembaca yang hanya baca judulnya saja..."</p> <p>-FGD Grup 3</p>	<p>"Ya mungkin beritanya sudah bagus ya ditambahi baik gambar sama video, terus sama 1 lagi mungkin ini penting juga jangan kebanyakan iklan, karena kalau dibuka iklan. Ya iklan memang penting, tapi kalau buka iklan-iklan-iklan terus."</p> <p>-FGD Grup 1- Solo</p>

- Isu-isu prioritas kominfo yang terdapat pada media komunikasi interpersonal masih kurang terekspos secara menyeluruh sehingga isu-isu prioritas sering tertutup dengan berita-berita viral lainnya. Sebesar 78,7% dari 400 responden menyimak berita berdasarkan berita/isu-isu terbaru.
- Masyarakat masih kesulitan dalam menemukan informasi isu prioritas melalui media komunikasi resmi Kominfo.
- Dari seluruh isu prioritas nasional, mayoritas responden mengetahui isu prioritas nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting namun 13,7% dari 400 responden tidak mengetahui adanya isu prioritas nasional.
- Berdasarkan survey yang dilakukan, mayoritas responden menyatakan menemukan isu-isu prioritas nasional melalui media massa konvensional dan media komunikasi interpersonal, namun pemberitaan isu prioritas nasional pada media massa elektronik, media komunikasi luar ruang, dan media komunikasi tradisional masih kurang.

Berdasarkan penilaian dari skala 1-6 terkait kesesuaian penyampaian informasi dan berita mengenai isu prioritas nasional, tidak ditemukan adanya kendala yang berarti. Mayoritas Responden merasa informasi dan berita yang diberikan sudah cukup tersedia, mudah dijangkau, cepat dalam distribusi, akurat dan sesuai kondisi, serta dapat dipercaya dan diandalkan.

Dari data yang ditemukan, saluran komunikasi penyampaian informasi media luar ruangan dan media massa tradisional merupakan media yang paling jarang yang digunakan untuk menyimak isu prioritas dibandingkan dengan media lainnya.

▲ Gambar 3. 17 Kendala Dalam Mengakses Informasi

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, Kementerian Kominfo melakukan beberapa langkah mitigasi, antara lain:



Rekomendasi	
<p><b>Referensi Informasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karena penggunaan media <i>online</i> dapat diakses oleh siapa saja, perlu adanya filter dan ketanggapan dari Kominfo untuk mencegah adanya <b>misinformasi</b> dan <b>disinformasi</b> terkait isu prioritas nasional.</li> <li>Selain media online, Kominfo perlu tanggap dalam penyampaian informasi melalui media konvensional karena <b>media konvensional</b> memiliki <b>kredibilitas</b> bagi masyarakat dalam penyampaian informasi.</li> <li><b>Intensitas penyampaian informasi</b> perlu <b>ditingkatkan</b> agar isu-isu prioritas nasional tidak terbenam dan cepat tergantikan dengan isu-isu viral lainnya.</li> <li>Penyajian informasi isu prioritas perlu <b>disajikan</b> pada hari <b>Sabtu-Minggu</b>, pukul 18.00-19.00 di mana pada waktu tersebut <b>masyarakat</b> sedang <b>aktif mengakses berita</b>.</li> </ul>
<p><b>Konten Informasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kominfo perlu <b>tanggap</b> dalam <b>mensosialisasikan isu-isu prioritas nasional</b>, serta perlu memastikan bahwa <b>konten informasi</b> diterima oleh <b>seluruh masyarakat nasional</b>.</li> <li>Perlu adanya <b>penataan bahasa</b> yang <b>mudah dipahami</b> dan <b>dicerna</b> oleh masyarakat terkait <b>penyajian isu prioritas nasional</b> agar <b>informasi isu prioritas</b> mampu diterima dengan baik oleh <b>seluruh masyarakat</b>.</li> <li>Kominfo perlu menyajikan isu prioritas dalam <b>kemasan yang menarik</b> bagi masyarakat, terutama dari segi <b>judul, gambar, serta kejelasan dan kelugasan berita</b> agar bisa <b>menarik perhatian masyarakat lebih luas</b>.</li> <li>Kominfo perlu <b>memaksimalkan semua media resminya</b> dalam penyebaran isu prioritas nasional <b>untuk memastikan</b> bahwa <b>masyarakat menyadari</b> adanya <b>isu-isu terkini</b> yang menjadi <b>urgensi/prioritas pemerintah nasional</b>.</li> </ul>
<p><b>Konteks Informasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kominfo perlu menentukan aturan yang jelas terkait <b>isu clickbait</b>. Khususnya, mengkaji apakah <b>clickbait</b> <b>banyak merugikan masyarakat</b>, sehingga dapat menentukan <b>langkah</b> yang perlu diambil.</li> <li>Perlu adanya <b>pemanfaatan media luar ruangan</b> dan <b>konvensional</b> seperti <b>Baliho, Poster, Radio, TV</b> untuk menyampaikan pemberitaan ke wilayah yang terdapat keterbatasan internet atau akses untuk isu-prioritas.</li> <li>Kominfo perlu <b>menyusun strategi</b> dalam <b>memberantas informasi atau berita palsu (hoax)</b> dengan <b>mendorong edukasi, dan sosialisasi</b> di masyarakat dalam menerima informasi.</li> <li>Kominfo perlu <b>mempertahankan dan meningkatkan kualitas konteks informasi dan pemberitaan terkait isu prioritas nasional</b> agar masyarakat <b>lebih mudah dalam menjangkau</b> informasi isu prioritas nasional yang <b>akurat dan dapat dipercaya</b>.</li> </ul>
<p><b>Penyampaian Informasi (Deliverable)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kominfo perlu mengemas informasi berita <b>lebih menarik</b> seperti tulisan berita yang dilengkapi dengan gambar/ ilustrasi. Selain itu perlu dimaksimalkan kembali <b>pemanfaatan Baliho</b> dan <b>media tradisional</b> khususnya di wilayah yang masih ada keterbatasan internet.</li> <li>Perlu adanya <b>kontrol dan kebijakan dari Kominfo</b> terkait <b>durasi iklan</b> maupun <b>ketentuan dalam online advertisement</b> sehingga tidak merugikan masyarakat.</li> <li><b>Media luar ruangan dan media massa tradisional</b> bisa menjadi media yang <b>sangat efektif</b> untuk menyampaikan informasi isu prioritas bisa <b>dikemas secara menarik dengan memberdayakan kearifan lokal</b> seperti budaya, bahasa dan lainnya sehingga penyampaian <b>informasi bisa dimaksimalkan dan menjangkau</b> seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Indonesia.</li> </ul>

▲ Tabel 3. 36 Rekomendasi Terhadap Kendala dalam Mengakses Informasi

Pelaksanaan diseminasi informasi komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo bertujuan agar masyarakat memperoleh pemahaman dan pemerintah mendapatkan kepercayaan publik. Dengan adanya komunikasi publik yang akurat, tepat dan pemilihan gaya komunikasi serta narasi sesuai segmentasi kelompok masyarakat, maka akan meningkatkan kredibilitas pemerintah.

Rangkaian program diseminasi informasi komunikasi publik yang dilakukan melalui berbagai produk informasi dan jejaring komunikasi publik akan menumbuhkan citra positif pemerintah di mata masyarakat terhadap kondisi kenegaraan. Pemerintah harus masuk ke dalam ruang-ruang publik agar eksistensi negara selalu berada di benak publik, yaitu masyarakat terutama dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah berjalan sejak awal tahun 2020. Penggunaan jaringan komunikasi serta media harus bisa dimanfaatkan secara efektif guna melakukan orkestrasi informasi dan komunikasi yang efektif, dengan harapan komunikasi ini yang menjadi sahabat dan teman masyarakat di setiap saat.



## Capaian IKSS pada Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Dalam mewujudkan Visi Indonesia Tahun 2045 melalui 4 (empat) pilar, yaitu Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Pemerataan Pembangunan, serta Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus dalam pencapaian visi tersebut. Perubahan tata kelola menjadi penting

untuk mengubah paradigma dan meningkatkan kinerja aparatur negara. Perubahan paradigma yang diharapkan yaitu menuju pada tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean government*) guna meningkatkan atau optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Berbagai aspek perlu diintervensi untuk mendukung aparatur yang berkinerja tinggi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Satuan	2022		Capaian 2022 (%)
			Target	Realisasi	
<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>					<b>98,76</b>
7	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai (skala 1 – 100)	80	79,01	<b>98,76</b>

▲ Tabel 3. 37 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Berdasarkan tabel 3. 37, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini belum memenuhi mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022. Penjelasan atas capaian Indikator Kinerja pada sasaran strategis ini dapat dilihat di bagian berikutnya.

### 7. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo

Penilaian Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Penilaian dilakukan terhadap 2 (dua) komponen, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil, dimana komponen

pengungkit dibagi menjadi 3 (tiga) aspek meliputi pemenuhan, hasil antara area perubahan, dan *reform*. Sedangkan komponen pengungkit terdiri dari 4 (empat) aspek Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, serta Kinerja Organisasi.

	2020	2021	2022
<b>Target</b>	76,50	78	80
<b>Realisasi</b>	76,28 (Hasil Penilaian Kemen PAN & RB)	78,18 (Hasil Penilaian Kemen PAN & RB)	79,01 (Hasil Penilaian Kemen PAN & RB)
<b>Capaian</b>	99,71%	100,23%	98,76%

▲ Tabel 3. 38 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, untuk tahun 2022, realisasi indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) belum memenuhi target yang telah ditetapkan, baik pada Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022 dan pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2020-2024

(untuk tahun 2022), namun telah memenuhi target untuk RPJMN Tahun 2020-2024 (untuk tahun 2022) karena indikator pada RPJMN berbunyi "Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) dengan Indeks RB Baik keatas", maka nilai 79,01 telah memenuhi Indeks RB dengan kategori baik ke atas.

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RPJMN</b>	70%	75%	80%	85%	85%
<b>RENSTRA</b>	78	80	82	83	84
<b>PK</b>	76,50	78	80	N/A	N/A

▲ Tabel 3. 39 Target Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo pada RPJMN, RENSTRA, dan PK

Jika dilihat pada tabel di atas, terdapat perbedaan antara target yang tercantum antara dokumen RPJMN/RENSTRA dengan PK untuk target Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo. Hal tersebut dikarenakan untuk RPJMN bunyi indikatornya adalah "Persentase Instansi Pemerintah Pusat (K/L) dengan Indeks RB Baik keatas", sehingga

fokusnya adalah jumlah instansi yang mendapatkan nilai Baik keatas. Sedangkan perbedaan untuk target RENSTRA dan PK yaitu dikarenakan terdapat arahan langsung dari Pimpinan dengan mempertimbangkan kondisi RB eksisting di Kementerian Kominfo, sehingga perlu target perlu disesuaikan.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Indeks RB Tahun 2021	Indeks RB Tahun 2022
<b>A. Komponen Pengungkit</b>				
I.	Pemenuhan	20,00	19,05	19,05
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,82	7,83
III.	Reform	30,00	20,01	19,51
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>45,88</b>	<b>46,39</b>
<b>B. Komponen Hasil</b>				
I.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,71	7,75
II.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,25	9,26
III.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,11	8,78
IV.	Kinerja Organisasi	10,00	7,23	6,83
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>32,30</b>	<b>32,62</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		<b>100,00</b>	<b>78,18</b>	<b>79,01</b>

▲ Tabel 3. 40 Indeks RB Kementerian Kominfo Tahun 2022  
Sumber: Hasil Evaluasi KemenPANRB, 2022

No	Kategori	Angka Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

▲ Tabel 3. 41 Kategori dan Predikat Nilai RB  
Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2020

Berdasarkan surat Kementerian PAN dan RB Nomor B/670/RB.06/2022 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo di tahun 2022 adalah 79,01 atau kategori "BB". Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Kominfo telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Terkait dengan aspek hasil antara, terdapat 13 hasil antara Kementerian Kominfo yang dilakukan pengukuran oleh instansi *leading sector*, dengan hasil sebagai berikut:

No	Jenis Akademi/ Pelatihan	Skala	Nilai 2021	Nilai 2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0 - 400	289,0	344,0	KASN
2	Kualitas Kebijakan	0 - 100	60,87	60,87	LAN
3	Pengelolaan Aset	0 - 4	3,32	3,45	Kementerian Keuangan
4	ASN yang Profesional	0 - 100	33,10	82,43	BKN
5	Implementasi SPBE	0 - 5	3,82	3,82	Kementerian PANRB
6	Kualitas Pengelolaan	0 - 100	32,65	69,50	LKPP
7	Pengadaan Barang dan Jasa	0 - 100	87,99	86,35	Kementerian Keuangan
8	Kualitas Pengelolaan Anggaran	0 - 5	4,73	4,62	Kementerian PANRB
9	Kualitas Pelayanan Publik	0 - 5	3	3	BPKP
10	Maturitas SPIP	0 - 5	3	3	BPKP
11	Kapabilitas APIP	0 - 100	82,08	92,70	Ombudsman Republik Indonesia
12	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0 - 100	84,05	87,11	ANRI
13	Kualitas Pengelolaan Arsip	0 - 100	-	86,20	Kementerian Hukum dan HAM

▲ Tabel 3. 42 Hasil Antara Kementerian Kominfo tahun 2022  
Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2022

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara, yaitu penilaian sistem merit, pengelolaan aset, ASN yang profesional, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan arsip. Selain itu, kualitas kebijakan, implementasi SPBE, maturitas SPIP dan kapabilitas APIP masih menunjukkan hasil yang sama dengan tahun sebelumnya. Penilaian hasil antara yang baru dilakukan pada tahun 2022 yaitu reformasi hukum menunjukkan hasil yang sangat baik. Meskipun penilaian kualitas pengelolaan anggaran dan kualitas pelayanan publik menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, secara keseluruhan hasil antara Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menunjukkan peningkatan.

Pada tahun 2022, Kementerian Kominfo telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi RB tahun 2021, antara lain:

- Meningkatkan jumlah kanal diseminasi informasi seperti brosur, booklet, website, dan media sosial (instagram, facebook, youtube, tiktok), sehingga informasi yang disampaikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- Melaksanakan survei IKM dan IPP secara berkala dan menindaklanjuti hasil survei tersebut, terutama pada komponen yang mendapatkan nilai rendah
- Tim RB unit kerja telah melaksanakan rencana aksi sesuai jadwal, selain itu tim monev RB telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tiap semester
- Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil assessment dan pemetaan talenta pegawai

Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program reformasi birokrasi di antaranya sebagai berikut:

- SOP yang disusun oleh Kementerian Kominfo belum mengakomodir kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan instansi pemerintah lain
- Kementerian Kominfo belum sepenuhnya menyelesaikan peraturan yang harus disusun yang menjadi turunan dari peraturan lain seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
- Mitigasi risiko yang dibangun belum sepenuhnya memetakan risiko yang bersifat strategis, baik untuk pencapaian sasaran kinerja maupun meminimalisir dampak atas risiko tersebut
- Pengaturan sistem kerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 7 Tahun 2022 belum diterapkan pada seluruh unit kerja yang ada di Kementerian Kominfo



## 3.2 Kinerja Lainnya

### a. Konten Internet yang ditangani

Pada era digital, ruang digital juga perlu dipastikan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat, yaitu untuk pendidikan, hiburan, dan akses informasi yang baik dan benar. Oleh sebab itu, Kementerian Kominfo terus menggalakkan strategi guna mendukung ruang digital yang positif: (1) di level hulu dengan menyelenggarakan pelatihan digital untuk mempersiapkan SDM yang melek digital, (2) level tengah dengan membangun peralatan dan mengembangkan sistem teknologi untuk pengendalian, dan (3) level hilir dengan mempersiapkan SOP dan peraturan yang lebih matang untuk antisipasi pelanggaran hukum di ruang digital. Langkah-langkah ini sejalan dengan peran Kementerian Kominfo mengawal pelaksanaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di mana Kominfo akan terus menjalankan pengendalian dan penanganan konten negatif agar pemanfaatan internet dapat berlangsung aman dan produktif.

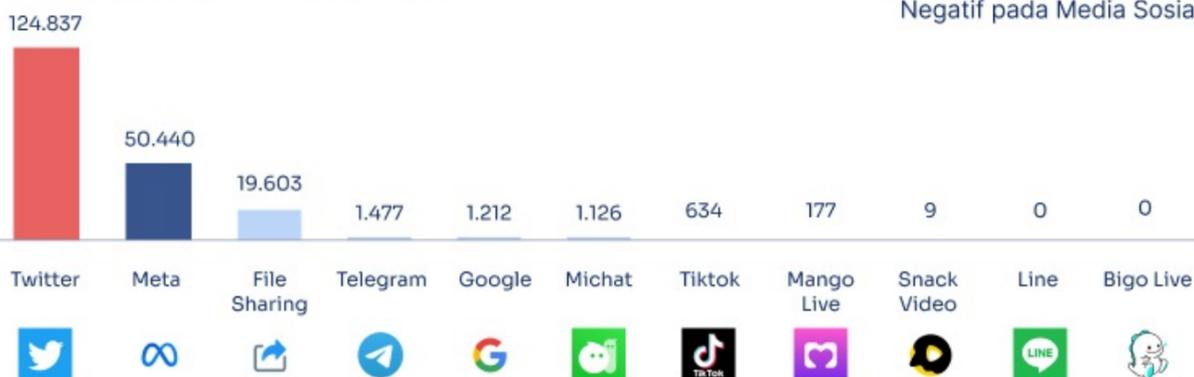
Sistem Pemblokiran Konten Negatif yang diterapkan oleh Kementerian Kominfo menggunakan mesin pengais konten negatif (Mesin AIS) yang mulai resmi difungsikan pada tanggal 3 Januari 2018.

Mesin AIS menggunakan metode *keyword based search* dengan memanfaatkan *Artificial Intelligence* untuk mencari konten negatif. Konten negatif yang ditemukan oleh mesin AIS kemudian digunakan sebagai salah satu input bagi tim verifikator yang memproses konten negatif. Bukti nyata konten negatif akan di-*screen capture* sebagai bukti digital, dan diteruskan ke eksekutor untuk tindakan terakhir. Jika sebuah situs atau akun memang terverifikasi melanggar peraturan-perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, eksekutor dari tim AIS akan memblokirnya dengan berkoordinasi ke penyedia jasa internet dan penyelenggara media sosial.

Saat ini, Kementerian Kominfo juga telah membangun peralatan dan mengoperasikan sistem pengembangan teknologi Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE).

Sepanjang tahun 2022, Kementerian Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap sejumlah konten negatif pada situs dan media sosial. Dengan rincian seperti pada gambar berikut:

#### Statistik Penanganan Konten Internet Negatif Pada Medsos



Grafik 3. 10 Statistik Penanganan Konten pada Situs Tahun 2022

**199.515**  
Penanganan Konten Internet Negatif pada Media Sosial

#### Statistik Penanganan Konten Internet Negatif Pada Situs

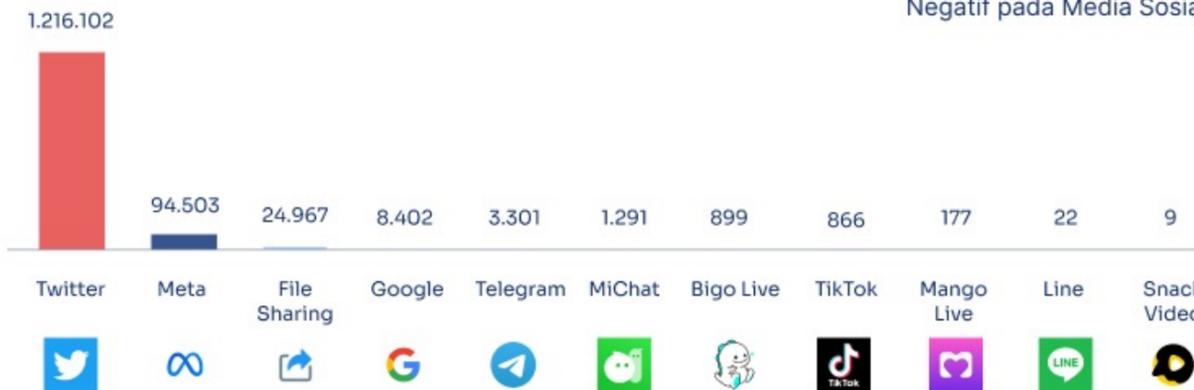
**238.226**  
Pemblokiran  
1 Januari - 31 Desember 2022

**437.741**  
Total Pemblokiran  
Konten Negatif

Perjudian	Pornografi	HKI	Penipuan	Konten Negatif yang Direkomendasikan Instansi Sektor
182.802	49.889	2.258	1.913	1.348
Kekerasan/Kekerasan pada Anak	Berita Bohong/Hoaks	Perdagangan Produk dengan Aturan Khusus	SARA	Separatisme/Organisasi Terlarang
7	3	2	1	1
Pelanggaran Keamanan Informasi	Terorisme/Radikalisme	Pencemaran Nama Baik	Konten yang Meresahkan Masyarakat	Konten yang Melanggar Nilai Sosial dan Budaya
1	1	0	0	0

Gambar 3. 18 Statistik Penanganan Konten pada Media Sosial Tahun 2022

#### Statistik Penanganan Konten Internet Negatif Pada Medsos, Kumulatif



Grafik 3. 11 Statistik Penanganan Konten pada Media Sosial s.d Tahun 2022

**1.350.359**  
Penanganan Konten Internet Negatif pada Media Sosial

#### Statistik Penanganan Konten Internet Negatif Pada Situs, Kumulatif

**1.829.665**  
Pemblokiran  
1 Januari - 31 Desember 2022

**3.180.204**  
Total Pemblokiran  
Konten Negatif

Pornografi	Perjudian	Penipuan	HKI	Konten Negatif yang Direkomendasikan Instansi Sektor
1.164.766	630.678	16.958	10.451	5.538
Terorisme/Radikalisme	Pelanggaran Keamanan Informasi	SARA	Perdagangan Produk dengan Aturan Khusus	Berita Bohong/HOAKS
512	326	189	130	29
Konten yang Melanggar Nilai Sosial dan Budaya	Konten yang Meresahkan Masyarakat	Separatisme/Organisasi Terlarang	Pencemaran Nama Baik	Kekerasan/Kekerasan pada Anak
26	23	15	12	12

Gambar 3. 19 Statistik Penanganan Konten Pada Situs Kumulatif s.d Tahun 2022

## b. Penyediaan Pusat Data Nasional (PDN)

Untuk terus memberikan pelayanan publik terbaik, pemerintah juga harus mentransformasi penyelenggaraan layanan dan datanya. Dalam mendukung transformasi digital di pemerintahan, Kominfo melaksanakan tugas sesuai amanat Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peran Kominfo difokuskan pada penyediaan aspek infrastruktur TIK pemerintahan, khususnya pembangunan Pusat Data Nasional. Proses panjang pada perencanaan dan diskusi teknis telah dilewati untuk menyiapkan konsep pembangunan Pusat Data Nasional berstandar internasional. Sesuai rencana pembangunan yang disiapkan, Pusat Data Nasional tersebut akan dibangun di 2 (dua) lokasi, yaitu Cikarang dan Batam, dengan pertimbangan kebutuhan integrasi data antar wilayah yang perlu dipenuhi.

Per tahun 2022, untuk Pusat Data Nasional yang berlokasi di kawasan Delta Mas - Cikarang, progres pembangunannya telah melewati tahap peletakan batu pertama (*groundbreaking*). Pusat data ini rencananya akan beroperasi pada tahun 2024. Sedangkan, untuk Pusat Data Nasional yang berlokasi di Batam, saat ini telah melewati tahap Serah Terima Sertifikat lahan seluas 50.066 m<sup>2</sup> oleh BPN Kota Batam. Selama tahap penyelesaian pembangunan Pusat Data Nasional, Kominfo secara paralel menyediakan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) untuk tetap memastikan layanan publik para kementerian dan lembaga terkait dapat tetap berjalan lancar. Saat ini PDNS dengan kapasitas 10.000 TB tersebut telah dimanfaatkan oleh sebanyak 296 K/L/D.

Dengan adanya PDN, dapat mendorong terlaksananya elektronifikasi transaksi pada instansi pemerintah. Dari sisi pelayanan publik, elektronifikasi transaksi pemerintah dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kehandalan layanan pemerintah melalui integrasi dengan kanal-kanal layanan eksisting baik yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Sementara itu ditinjau dari sisi layanan pemerintah, elektronifikasi transaksi pemerintah secara langsung akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan birokrasi pemerintah, mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang lebih baik dan meningkatkan potensi pendapatan pemerintah melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi.



## c. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP)

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah dijamin oleh konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945, serta selaras dengan penugasan Presiden pada Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang telah disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui surat nomor R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020.

Presiden menugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Presiden dalam pembahasan dengan Komisi I DPR RI untuk mendapatkan kesepakatan bersama.



2020

Pemerintah bersama DPR telah membahas payung hukum pelindungan data pribadi (Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi/RUU PDP)



20  
September  
2022

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati dan mengesahkan RUU PDP menjadi UU PDP pada Rapat Paripurna DPR RI



17  
Oktober  
2022

RUU PDP resmi diundangkan menjadi UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.



▲ Gambar 3. 20 Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dan Menkominfo saat pengesahan RUU PDP dalam rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Kominfo, Kemendagri, serta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), 7 September 2022



▲ Gambar 3. 21 Rapat Paripurna RUU PDP di Gedung Nusantara II DPR RI pada 20 September 2022

UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal yang mengatur mengenai beberapa substansi di antaranya: (1) definisi dan jenis data pribadi; (2) hak subjek data pribadi; (3) pemrosesan data pribadi; (4) kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; (5) transfer data pribadi; (6) sanksi administratif; (7) kelembagaan; (8) kerja sama internasional; (9) penyelesaian sengketa dan hukum acara; (10) larangan dalam penggunaan data pribadi; dan (11) ketentuan pidana. UU PDP mengatur masa penyesuaian selama 2 (dua) tahun untuk pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang ini.

Dengan adanya UU PDP diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif yang dapat melindungi kepentingan subjek data dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Secara luas, penyusunan UU PDP adalah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi seluruh Warga Negara Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan dengan adanya pengaturan mengenai PDP maka WNI memiliki kendali atas data pribadinya dan pemrosesan data pribadi lebih transparan dan akuntabel.

Selain itu, dengan adanya Undang-Undang PDP secara spesifik memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- Menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan rasa aman serta kesadaran masyarakat atas perlindungan data pribadi.
- Mendukung dan meningkatkan potensi iklim ekonomi yang positif pada dunia usaha dengan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan peningkatan kepercayaan konsumen.
- Meningkatkan kesiapan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam implementasi UU PDP sebagai manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat.
- Menjadi instrumen hukum kunci untuk implementasi tata kelola & pencegahan serta penindakan pelanggaran PDP.
- Memberikan kesetaraan hukum dalam pertukaran data lintas batas negara yang terpercaya (*cross-border data flow with trust*).

## d. Adopsi Teknologi Digital UMKM

Program Adopsi Teknologi Digital pada UMKM merupakan program Kominfo untuk mendorong UMKM khususnya sektor pengolahan untuk agar mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital dalam operasional usahanya agar dapat mencapai *scale-up* (peningkatan skala usaha). Hingga tahun 2024, program ini ditargetkan untuk melakukan peningkatan skala usaha bagi 33.000 pelaku UMKM yang tersebar di 13 Kawasan yang mencakup 15 provinsi, termasuk di dalamnya wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Papua Barat.

 7.401

**UMKM  
Scale Up**

dari 30 ribu pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan adopsi teknologi/difasilitasi *scale up*

Sepanjang tahun 2022, dari 30 ribu UMKM yang mengikuti pelatihan, sebanyak 7.401 di antaranya berhasil tetap melakukan penjualan aktif pada platform digital dengan terus didampingi. Untuk tahun 2023, ditargetkan sebanyak 4.700 UMKM difasilitasi untuk *scale up* dari sisi adopsi teknologinya.



## e. Startup Digital

Dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi digital baru, Kementerian Kominfo mengembangkan program pengembangan Startup Digital. Program *startup* ini dirancang dengan basis *end-to-end* yang dimulai dari level pengenalan terhadap *startup* melalui program 1000 Startup Digital, pengembangan startup digital di level *early stage* untuk mencapai *product market fit* melalui program Startup Studio, sampai dengan fasilitasi terjadinya *business matchmaking* melalui program HUB.id.

Tahun 2022, Kementerian Kominfo menargetkan pertumbuhan startup digital,

No	Startup	Sektor
1	Aksel	HR tech / Ed tech
2	Allure AI	BeautyTech, Artificial Intelligence, Consumer
3	Envio Logistics	Logistics
4	Friendchised	Technology Information
5	Kendali	SaaS / GovTech / Enterprise Software
6	Kibble	Pet Health Tech
7	Mufit Indonesia	Service
8	Paygua	Fintech
9	Seryu Cargo	Logistic
10	Surplus Indonesia	Greentech
11	Ternaknesia	Primary Industry (Agriculture)
12	Universitas123	Education
13	Alterstay	Hospitality

▲ Tabel 3. 42 Startup Digital Aktif

Selain itu, melalui program HUB.ID, Kementerian Kominfo terus mendorong startup lokal terus bertumbuh melalui penyelenggaraan *business matchmaking* bersama Pemerintah, Swasta, dan investor.

yakni sebanyak 26 startup digital aktif yang diraih melalui 30 startup digital aktif dari program Startup Studio Indonesia. Startup digital aktif yang dimaksud adalah jumlah startup yang menunjukkan perkembangan dalam beberapa *key metrics* meliputi peningkatan jumlah pendapatan, peningkatan perkembangan bisnis, peningkatan penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung dan jumlah investasi yang masuk dari dalam maupun dari luar negeri.

Berikut adalah 26 startup binaan yang menjadi startup digital aktif sampai dengan Desember 2022:

No	Startup	Sektor
14	Bioma	Rental, Circular Economy, Product-as-a-Service
15	Broom.id	Technology
16	DotX	Fintech
17	Eduku	Edtech
18	Eratani	Agritech
19	Fazpass (CitCall)	Security
20	Kanva	E-commerce, Online to Offline Enable
21	Meat Solution (Metion)	Agriculture
22	MyRobin	Jobs & Financial Services
23	MySkill	Education
24	Nona	FemTech
25	SHAFIQ	Fintech
26	Tripwe	Tourism

Sebanyak total 114 startup mengikuti kurasi dan difasilitasi menjalin bisnis dengan *stakeholder* dan investor terkait, di mana dua di antaranya berhasil mendapatkan komitmen pendanaan.

## f. Peran Kementerian Kominfo dalam Forum Internasional

Keikutsertaan Kementerian Kominfo dalam Forum Internasional juga mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Kontribusi Kementerian Kominfo di tingkat internasional meliputi:

### ○ International Telecommunication Union (ITU)

Sidang Plenipotentiary Conference merupakan sidang tertinggi International Telecommunication Union (ITU) yang diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali untuk menentukan arah dan kebijakan strategis ITU, memilih para pejabat eksekutif (Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Direktur Biro Radiokomunikasi, Direktur Standard Telekomunikasi, dan Direktur Pembangunan Telekomunikasi), anggota Radio Regulation Board (RRB), dan anggota Dewan (*Council*), serta, jika diperlukan, melakukan amademen Konstitusi dan Konvensi ITU.

Dewan ITU merupakan perwakilan 48 negara dari 193 negara anggota ITU yang mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan strategis ITU terutama, namun tidak terbatas pada program kegiatan dan anggaran terkait isu kebijakan telekomunikasi / Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Dewan ITU berperan sebagai organ tertinggi ITU di antara dua Plenipotentiary Conference.

Pada sidang ITU Plenipotentiary Conference 2022 (PP-22) yang diselenggarakan pada tanggal 26 September s.d. 14 Oktober 2022 di Bucharest, Rumania, Indonesia mencalonkan kembali menjadi anggota Dewan (*Council*) untuk periode 2023 – 2026.

Beberapa strategi utama dalam pemenangan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan ITU pada sidang ITU PP-22 antara lain sebagai berikut:

- Penyampaian surat permohonan dukungan dari Menteri Kominfo kepada Menteri TIK dari negara-negara anggota ITU, beserta Aide Memoire yang berisi prestasi dan janji Indonesia apabila terpilih kembali menjadi anggota Dewan ITU pada siklus 2023-2026.
- Pelaksanaan kampanye dalam bentuk social event “Jakarta Reception” dengan mengundang para Duta Besar negara anggota ITU yang berada di Jakarta, Indonesia.
- Pelaksanaan kampanye dalam bentuk social event “Indonesia Night” dengan mengundang para Ketua delegasi dan delegasi sidang ITU PP-22 di Bucharest, Rumania.
- Pembentukan tim kampanye yang terdiri dari perwakilan Kementerian Kominfo dan Kemenlu pada sidang ITU PP-22 guna melakukan kampanye dan lobi kepada Ketua Delegasi dan delegasi dari negara-negara anggota ITU.
- Pembuatan alat peraga kampanye seperti leaflet, *souvenir*, dan video kampanye, guna mendukung promosi penggalangan dukungan bagi Indonesia.
- Pelaksanaan koordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri untuk kampanye penggalangan dukungan melalui saluran diplomatik dan pemetaan suara dengan pencalonan Indonesia pada organisasi internasional lainnya.

Dengan kerjasama yang baik, Indonesia untuk kesembilan kalinya terpilih kembali menjadi perwakilan anggota Dewan (*Council*) periode 2023 -2026 dari Kawasan E - Asia dan Australasia. Indonesia berhasil menduduki peringkat ketiga dari 13 negara yang telah terpilih, dengan memperoleh 157 suara.

Dalam sidang ITU PP-22, Indonesia juga dipercaya oleh organisasi Asia-Pacific Telecommunity (APT) untuk menjadi leading country dari kawasan Asia Pasifik dalam pembahasan Resolusi 131 tentang *Measuring information and communication technologies to build an integrating and inclusive information society*.

#### ○ Digital Economy Working Group (DEWG) dan Digital Economy Ministers' Meeting (DEMM)

Pelaksanaan Kegiatan Digital Economy Working Group (DEWG) dan Digital Economy Ministers' Meeting (DEMM) dihadiri oleh lebih dari 600 delegasi dari negara anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional. Pertemuan DEWG dan DEMM memperundingkan tiga isu prioritas utama yaitu *Connectivity and Post-COVID-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy, dan Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flow*.

Dari Pertemuan DEWG dan DEMM tersebut dihasilkan kesepakatan yang tertuang dalam *Chair's Summary*, di mana anggota G20 menyepakati untuk meningkatkan peran dan kontribusi ekonomi digital untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan.

#### ○ Digital Transformation Expo (DTE)

Kementerian Kominfo juga berhasil menggelar Digital Transformation Expo (DTE). DTE merupakan salah satu side event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan salah satu *deliverable* DEWG yang bertujuan untuk menceritakan perjalanan transformasi digital Indonesia dan anggota G20 dengan metode penceritaan artistik audio-visual. DTE berhasil menarik jumlah pengunjung, total mencapai 4.783 orang atau 159,4% dari target sebanyak 3.000 orang.

#### ○ Dukungan Infrastruktur KTT G20

Kominfo juga memberikan dukungan infrastruktur telekomunikasi untuk penggelaran agenda KTT G20 di Bali melalui:

1. Penyiapan jaringan *backbone*, berupa penyediaan jaringan *backup* melalui dua *gateway* internasional, 5 jalur sistem komunikasi kabel laut (SKKL) *fiber optic* keluar dari pulau Bali yang terhubung ke 14 opsi rute kabel laut
2. Penguatan jaringan *backhaul*, berupa penambahan jalur redundansi kabel serat optik dan pentanahan kabel udara

3. Penyiapan jaringan akses *fixed broadband* di main dan *supporting venue*, serta penguatan *mobile broadband* untuk jaringan 4G serta 5G *experience* di 18 venue
4. Pengawasan spektrum frekuensi radio, termasuk untuk 11 bandara pendukung yang melibatkan 8 Balai Monitoring Frekuensi Kementerian Kominfo
5. Dukungan registrasi IMEI perangkat handphone, Komputer, dan Tablet (HKT) bagi media asing, delegasi, dan tamu negara pada penyelenggaraan KTT G20



### ○ Asia Pacific Economy Cooperation (APEC)

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi kawasan Asia-Pasifik dengan berpartisipasi aktif dalam fora perundingan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia turut mendorong upaya percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 melalui keikutsertaan dalam berbagai diskusi terkait penguatan rantai pasok, distribusi vaksin, fasilitasi pergerakan lintas batas untuk para pelaku bisnis serta pemanfaatan teknologi digital dalam fasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.

### ○ Asian Pacific Postal Union (APPU)

APPU merupakan salah organisasi regional di bawah Universal Postal Union (UPU) yang merupakan salah satu lembaga di bawah PBB. APPU menjadi forum koordinasi internasional di wilayah Asia Pasifik untuk 32 anggotanya pada sektor layanan pos. Kongres ini adalah merupakan sidang tertinggi di APPU yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali. Kongres Asia Pacific Postal Union (APPU) ke-13 telah diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus s.d. 2 September 2022 di Bangkok, Thailand. Indonesia sebagai salah satu anggota APPU mengirimkan delegasi yang hadir secara fisik, dari Kementerian Kominfo, KBRI Bangkok, dan PT. Pos Indonesia. Indonesia sendiri berperan penting dalam kongres ini yaitu sebagai *Chair of Credentials Committee* dalam memeriksa dan melaporkan keabsahan seluruh surat kredensial dan proksi setiap negara anggota APPU berdasarkan RoPC.

### ○ Asia Pacific Telecommunication (APT)

Peran serta Indonesia dalam the 29<sup>th</sup> and the 30<sup>th</sup> Meeting of the Asia Pacific Telecommunity (APT) Wireless Group. Asia-Pacific Telecommunity Wireless Group (AWG) merupakan salah satu Work Programs di bawah area program kerja Radiocommunication. Area ini mengharmonisasikan persepsi dan mengembangkan proposal bersama, serta mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan spektrum frekuensi radio dan teknologi nirkabel (*wireless*).

### ○ ASEAN

Beberapa capaian strategis sepanjang tahun 2022 yang telah dilaksanakan Kementerian Kominfo di lingkup kerja sama ASEAN melingkupi:

#### 1. *Substantially concluded upgrading perjanjian AANZFTA sektor telekomunikasi dan e-commerce*

Kementerian Kominfo sebagai focal point atas upgrading perjanjian ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) khususnya pada sektor telekomunikasi dan e-commerce, telah mengawal proses perundingan dengan koordinasi bersama satuan kerja dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait hingga dicapainya kesepakatan atas sejumlah pasal terutama pada *annex on telecommunications* dan *chapter e-commerce*. Proses perundingan upgrading perjanjian AANZFTA saat ini sedang dilanjutkan di tingkat AANZFTA Joint Committee (FJC) dan rencananya akan disahkan pada tahun 2023.

#### 2. *Chairmanship ASEAN DTSCWG tahun 2022*

Kementerian Kominfo mendapatkan kesempatan untuk menjabat sebagai *chair* pada pertemuan ASEAN Digital Trade Standards and Conformance Working Group (DTSCWG) ke-8 dan DTSCWG ke-9, setelah sebelumnya dipimpin oleh Vietnam. Chair bertugas untuk memimpin jalannya pertemuan serta menyampaikan hasil pertemuan DTSCWG pada working group ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ). Selain itu, pada bulan April 2022, Chair DTSCWG berkesempatan untuk melakukan pertemuan secara bilateral dengan salah satu mitra wicara ASEAN yaitu Australia untuk mendiskusikan program kerja sama ke depan di bawah kerangka kerja ASEAN-Australia Digital Trade Standards and Conformance initiative (AADTSC).

#### 3. *Proyek Indonesia tahun 2022 pada forum ASEAN yang disetujui dan diimplementasikan*

Proyek yang disetujui dan diimplementasikan yaitu mengenai *Capacity Building for Government Officials/Staff to Bridge the ASEAN Digital Divide in the Post-COVID19*, dan pada forum *Asia Pacific Telecommunity (APT)* yaitu *pilot project on Promoting Data Driven Farming Management Practices Using Smart Data Analytics Platform for Improving Agriculture Productivity in West Java*.

#### 4. *3 usulan Priority Deliverables sektor Digital dan Informasi dalam mendukung Ketekuaan ASEAN tahun 2023*

yang diterima, terdiri dari

- *ASEAN Framework on Logistics for Digital Economy Supply Chain for Rural Area*
- *Regulatory Pilot Space (RPS) to Facilitate Cross-Border Digital Data Flows to Enabling Self-Driving Car in ASEAN*
- *Guideline Development on Management of Government Information for Combatting Fake News and Disinformation in the Media*

#### 5. *Diterimanya 24 input proposal mengenai kepentingan Indonesia di kawasan Asia Pasifik*

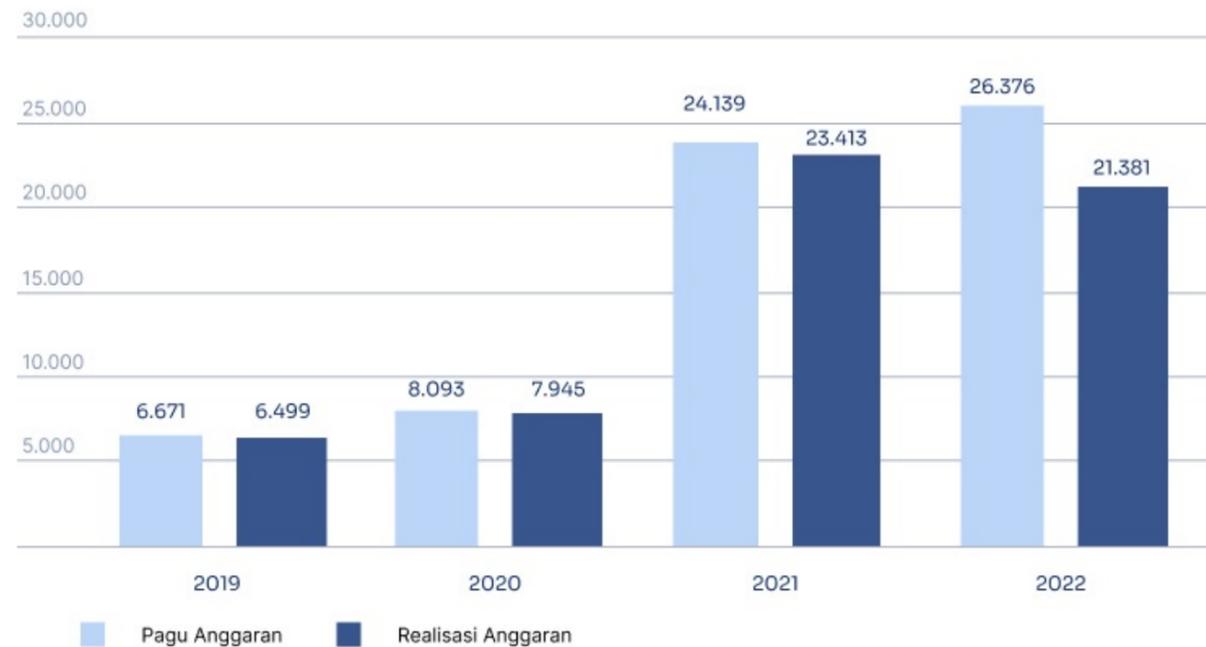
#### 6. *Indonesia menduduki posisi penting pada beberapa forum yaitu:*

- *Vice Chair ASEAN Senior Officials Meeting for Information (SOMRI) Working Group on Information, Media and Training (WG-IMT)*
- *Chair Credential Committee Asian-Pacific Postal Union (APPU) Congress ke-13*
- *Working Party Chair* pada APT Preparatory Group for WRC-23 (APG-23)
- *Drafting Group Chair* pada APG-23
- *Working Group Vice Chair* pada APT Preparatory Group for ITU PP-22

### 3.3 Realisasi Anggaran

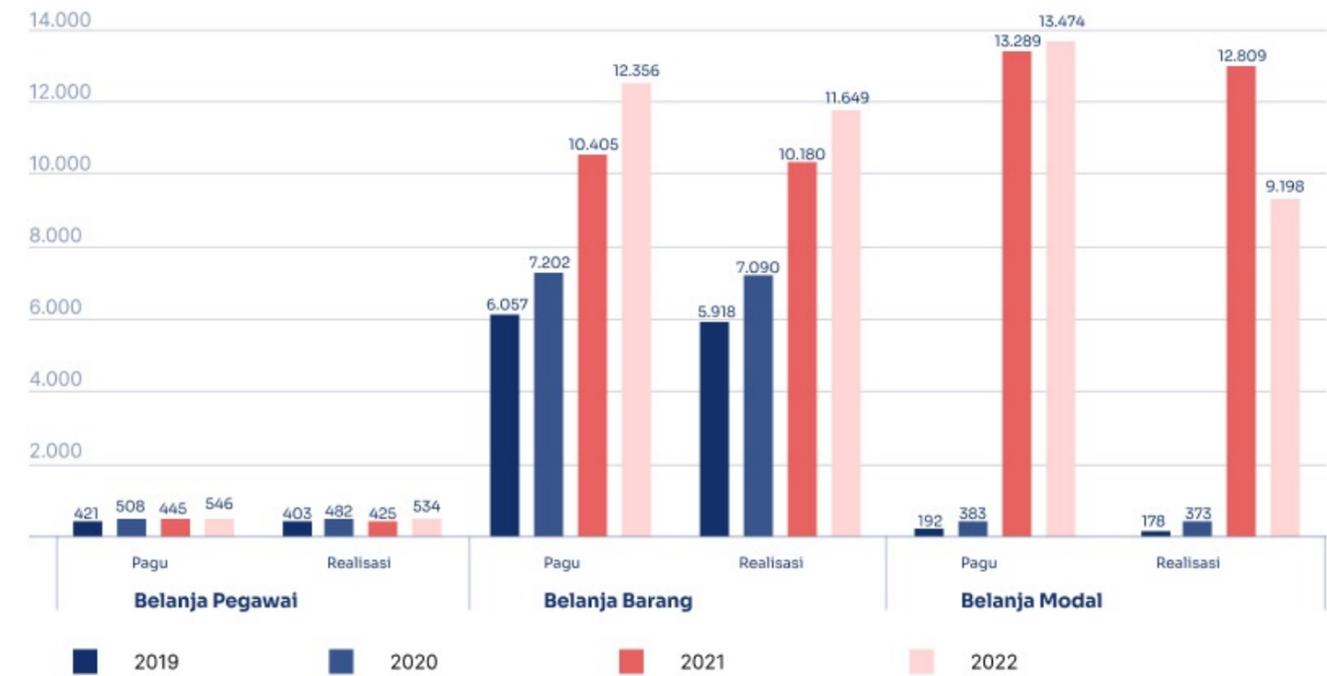
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2022 merupakan pedoman bagi Kementerian Kominfo untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022. Realisasi anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2022 berdasarkan jenis belanja, sumber dana, dan unit kerja sebesar 81,06% atau sebesar Rp21.381.061.310.289 dari total pagu sebesar Rp26.376.362.918.000.

Realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu dalam periode tahun 2019—2022 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:



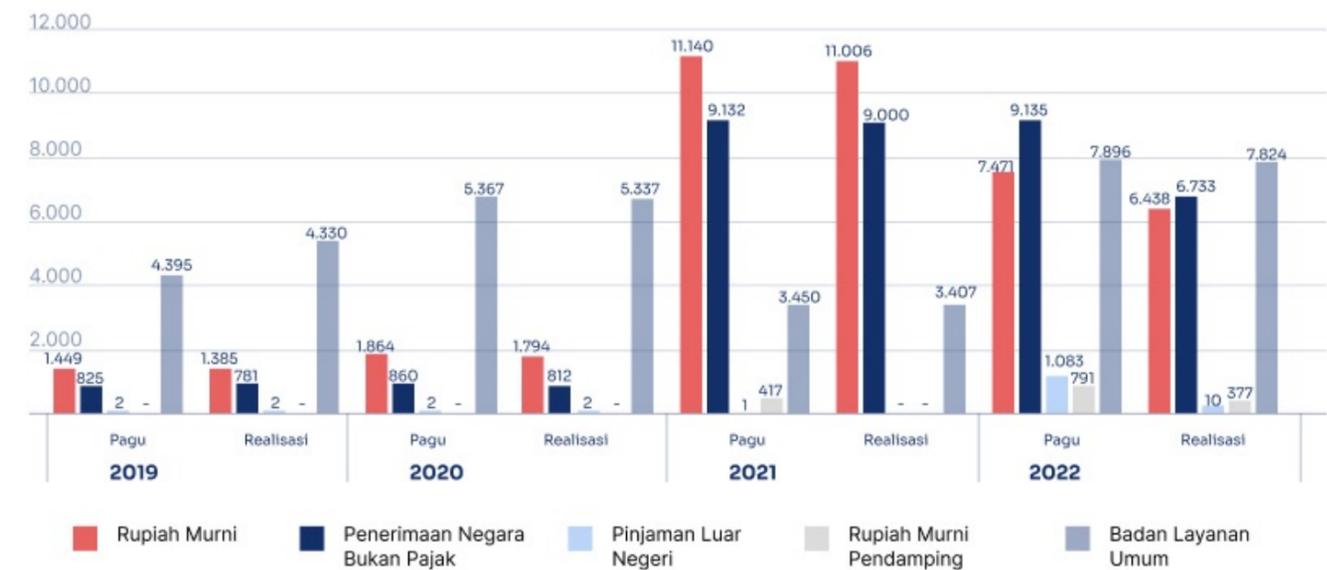
▲ Grafik 3.12 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2019—2022

Jika diklasifikasikan per jenis belanja, realisasi penyerapan anggaran dalam periode 2019—2022 dapat terlihat dalam grafik berikut:



▲ Grafik 3.13 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019—2022 Berdasarkan Jenis Belanja

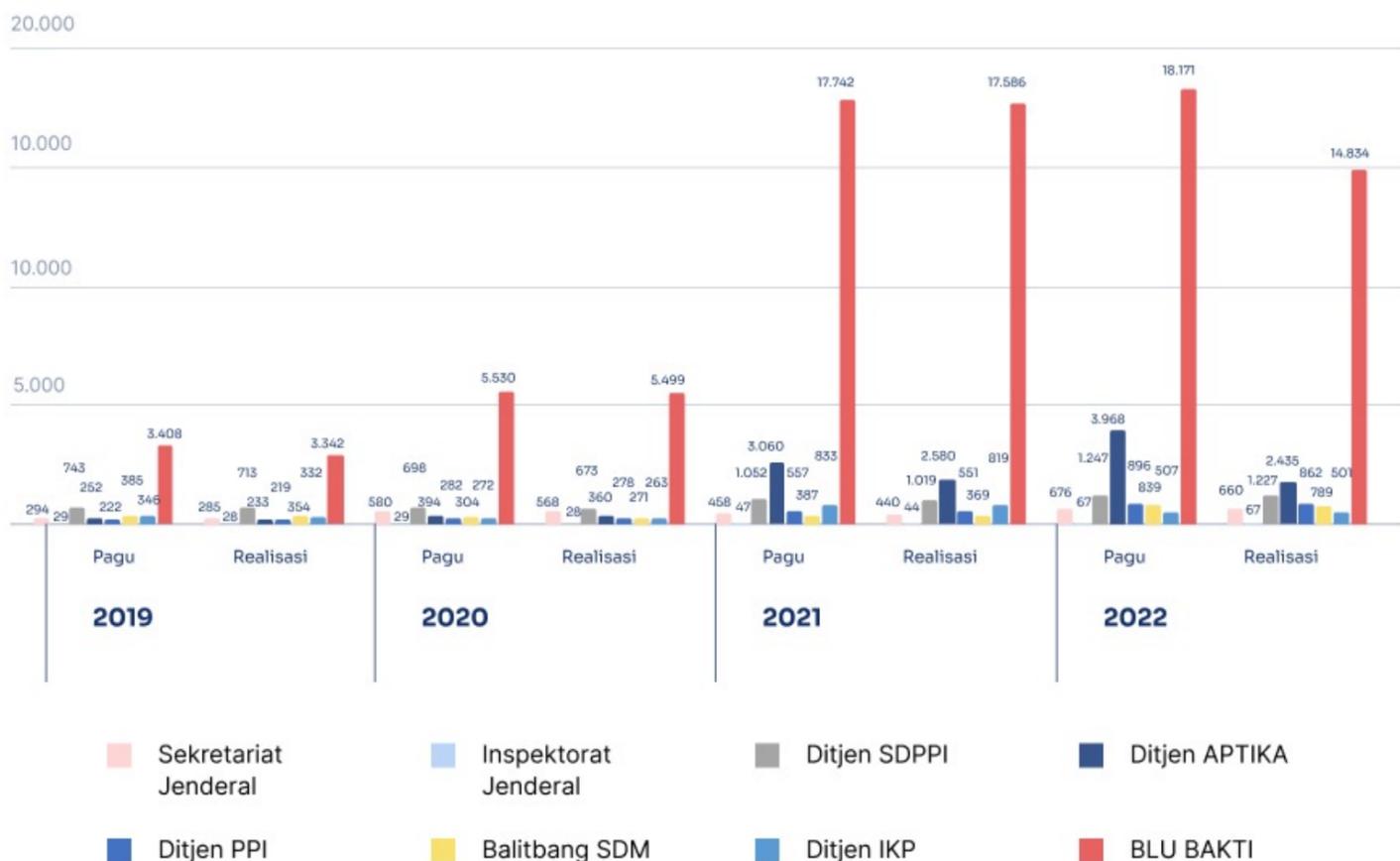
Adapun realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 berdasarkan sumber dana dapat dilihat dalam grafik berikut:



▲ Grafik 3.14 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022 berdasarkan Sumber Dana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2022 merupakan pedoman bagi Kementerian Kominfo untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022. Realisasi anggaran

Kementerian Kominfo Tahun 2022 berdasarkan jenis belanja, sumber dana, dan unit kerja sebesar 81,06% atau sebesar Rp21.381.061.310.289 dari total pagu sebesar Rp26.376.362.918.000.



Grafik 3. 15 Tren Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022 per Eselon I

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2022 menjadi instrumen yang mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kominfo melalui pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2022. Dalam lingkup nasional target realisasi anggaran tahun 2022 dihitung berdasarkan jenis belanja, target realisasi per jenis belanja triwulan I adalah 10-25%, triwulan II 40-50%, triwulan III 70-75%, dan triwulan IV 90-95%. Realisasi APBN Kementerian

Kominfo Tahun Anggaran 2022 yang sebesar 81,06% atau sebesar Rp. 21.381 miliar masih di bawah rata-rata realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar 98,8% atau Rp. 2.274,5 triliun dan di bawah rata-rata nasional realisasi belanja sebesar 99,5% atau Rp. 3.090,8 triliun. Secara umum, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2022 dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor-faktor tersebut antara lain:

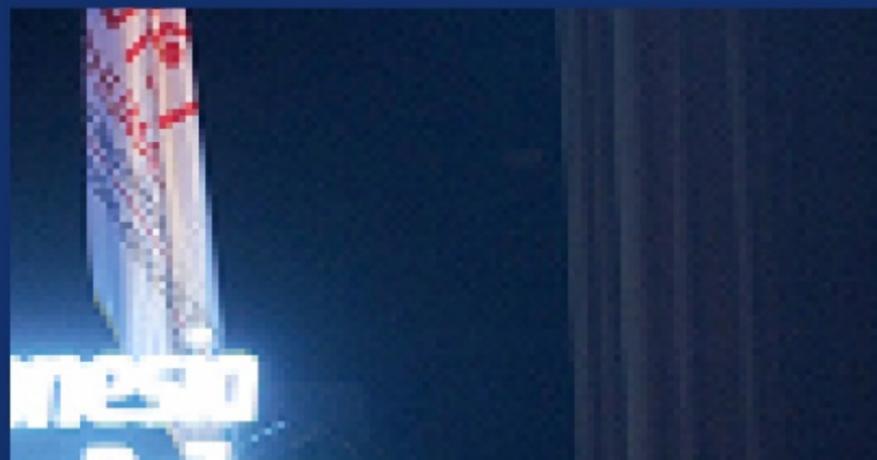
1. Terdapat sisa anggaran yang menjadi residu pada akhir tahun dikarenakan terdapat pekerjaan yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2022 sehingga anggaran tidak dapat terealisasi.
2. Terdapat *outstanding* kontrak yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Kementerian Kominfo sampai dengan akhir tahun 2022.
3. Terlambatnya proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikarenakan belum seluruh pengadaan mengoptimalkan proses melalui e-katalog.
4. Terdapat kebijakan Pemerintah terkait blokir pagu anggaran *automatic adjustment* sehingga terjadi keterlambatan dalam proses program/kegiatan yang dikarenakan anggaran yang di *automatic adjustment* tidak dapat dilaksanakan sampai dengan pembukaan blokir.
5. Terdapat kebijakan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) *full module* yang mempengaruhi persiapan Satuan Kerja, mulai dari persiapan hingga pelaksanaannya sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan anggaran pada saat awal implementasinya dan berdampak pada menurunnya capaian realisasi belanja pada awal tahun khususnya di triwulan I.
6. Adanya kebijakan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 yang menyebabkan paket-paket pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan harus ditinjau ulang agar memenuhi tingkat TKDN produk barang/jasa yang di persyaratkan, sehingga mengakibatkan terlambatnya pengadaan barang/jasa yang seharusnya diselesaikan pada triwulan II.
7. Terdapat kendala dan hambatan dalam penyelesaian program dan kegiatan Kementerian Kominfo tahun 2022, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: kondisi geografis lokasi yang menjadi target sulit dijangkau, situasi keamanan yang kurang kondusif pada lokasi pelaksanaan program, dan adanya beberapa titik layanan akses internet yang mengajukan terminasi dikarenakan telah memiliki layanan akses internet secara mandiri.

Kementerian Kominfo terus melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas maupun percepatan pelaksanaan anggaran di tahun 2022, antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas dan mempercepat ketersediaan TOR dan RAB pada saat pengajuan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Mengoptimalkan e-katalog dan mempercepat lelang tidak hanya yang rutin serta mengatur termin pembayaran pada belanja kontrak;
3. Menyusun perencanaan secara optimal;
4. Memperbaiki prioritas pengalokasian sumber dana PNB yang lebih jelas dan terukur;
5. Mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam rangka percepatan penyerapan;
6. Memastikan kelengkapan data dukung, sehingga tidak menjadi faktor penghambat atau penunda penyerapan anggaran;
7. Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) harus disusun dengan mempertimbangkan secara riil rencana pelaksanaan program/kegiatan; dan
8. Melakukan monitoring dan evaluasi atas setiap program dan kegiatan secara efektif dan meningkatkan pengendalian serta pengawasan intern.

## 3.4 Penghargaan

Kominfo terus berupaya mengoptimalkan kinerja guna mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berkualitas. Selama tahun 2022, terdapat berbagai penghargaan yang diterima Kementerian Kominfo. Beberapa penghargaan yang diterima, di antaranya sebagai berikut:



### Penghargaan Top Digital Awards 2022 (Majalah It Works)

- TOP Leader on Digital Implementation 2022 – Johnny G. Plate (Menteri Kominfo)
- TOP Digital Implementation 2022 Bintang 5
- TOP CIO on Digital Implementation 2022



### TOP GPR Award 2022

GPR Institute dan SUARAPEMERINTAH.ID



### Opini WTP

Penghargaan atas Laporan Keuangan TA. 2021 dari BPK RI dan telah diterima Kementerian Kominfo selama 6 tahun berturut-turut



### Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)

Kepatuhan Tinggi Tingkat K/L Tahun 2021



### Penghargaan Anugerah Meritokrasi 2022 (Kementerian PAN&RB)

- Sangat Baik



### BKN Award

- Peringkat 1: Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT
- Peringkat 5: Implementasi Penerapan Manajemen Kerja



### Public Relation Indonesia 2022 Awards (PRIA)

- *Silver Winner* - Kategori Program PR: Digital PR "Terujung Terkoneksi"
- *Bronze Winner* - Kategori Brand Guideline Manual Book Logo BAKTI
- *Bronze Winner* - Kategori Aplikasi: Aset Manajemen Sistem
- *Bronze Winner* - Kategori Departemen PR: untuk BAKTI secara kelembagaan



### Penghargaan Indonesia DEI (Diversity, Equality, Inclusivity) dan ESG (Environmental, Social & Governance) / IDEAS

- *Gold Winner* - Kategori ESG Sustainable Tourism – Mengembangkan Ekosistem Pariwisata Indonesia di Daerah 3T melalui Kolaborasi, Teknologi Digital, dan Akses Pasar Global
- *Bronze Winner* - Kategori DEI Keberpihakan terhadap Disabilitas – Aksesibilitas untuk Disabilitas



### Kinerja yang Baik di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2021 (Kementerian Keuangan)

- Juara III Utilisasi Barang Milik Negara (BMN) untuk Kelompok Kementerian/ Lembaga dengan Satuan Kerja 11 sampai dengan 100 Satuan Kerja

# Penutup

## Bab IV

Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

Akselerasi transformasi digital nasional yang merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo dan masih terus berlanjut pada tahun 2023.

Mempercepat transformasi digital adalah kunci untuk membuka potensi kita dalam daya saing global dan pembangunan jangka panjang, memberdayakan masyarakat dan bisnis untuk meraih peluang pasar baru, terutama untuk pemulihan pasca pandemi.





Laporan Kinerja Kementerian Kominfo tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo. Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan yang merefleksikan pelaksanaan Renstra Kementerian Kominfo 2020—2024 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Penetapan indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam proses penetapannya, senantiasa terus dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas Kementerian Kominfo dan kondisi terkini dengan target yang menantang. Dengan harapan, sistem manajemen ini tidak hanya menjadi rutinitas, namun harus mampu menggambarkan dan mendorong reformasi organisasi.

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kementerian Kominfo dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2022. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Pada tahun 2022, Kementerian Kominfo telah memberikan dukungan terhadap Pemerintah dalam menghadapi tantangan di tahun 2022 dengan baik. Mulai dari penanganan pandemi COVID-19, keberhasilan Presidensi G20 yang mendapat apresiasi dari para pemimpin dunia, masyarakat domestik, hingga keberhasilan resiliensi melalui leadership yang kuat dari Presiden RI. Capaian itu memungkinkan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Digitalisasi memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Adopsi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ke ranah digital turut memberikan kemudahan akses bahan baku dan akses pasar yang lebih luas di seluruh nusantara. Sehingga, pemanfaatan industri digital pada sektor UMKM akan meningkatkan produktivitas hingga 10-20%. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan adopsi digital melalui integrasi data sehingga dapat membantu meningkatkan hasil kerja dan efisiensi.

Dalam upaya mendukung transformasi digital, Kementerian Kominfo berfokus pada pembangunan infrastruktur digital yang kuat dan inklusif untuk mempercepat perluasan akses dan layanan internet. Selain program pembangunan infrastruktur, Kementerian Kominfo juga terus mendorong transformasi digital di sektor ekonomi dan pemerintahan membangun Pusat Data Nasional, serta menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sejumlah kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri teknologi pun turut dilakukan untuk mempersiapkan talenta digital yang terbekali dengan skill set dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan industri nasional dan global, terutama mengingat pesatnya industri teknologi berkembang dan persaingan tidak dibatasi oleh geografi.

Ke depan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi untuk mewujudkan kedaulatan digital dan ruang digital yang aman bagi seluruh masyarakat khususnya dalam hal pemanfaatan infrastruktur digital dari hulu hingga hilir. Untuk mengatasi tantangan maupun kendala yang ada, serta mewujudkan digitalisasi yang lebih masif lagi, salah satu kunci yang penting untuk bersama-sama dijunjung adalah kolaborasi menjadi hal yang krusial, sehingga seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk terus bersinergi mendukung pelaksanaan program-program Kementerian Kominfo.



Foto: Helmy Zainuddin - Balmon SFR Kelas II Merauke - Menari di Atas Menara

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kementerian Kominfo Tahun 2022

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johnny G. Plate

Jabatan : Menteri Komunikasi dan Informatika

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 28 Januari 2022

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny G. Plate

### KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau	1. Jumlah Desa/Kelurahan Mendapatkan Layanan Seluler 4G	11.661 Desa/Kelurahan (Kumulatif)
		2. Persentase (%) Rancangan Kebijakan Penambahan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) untuk Layanan Broadband Sebesar 90 MHz	100%
2.	Meningkatnya Cakupan Wilayah yang Terlayani Penyiaran Digital	Persentase (%) Populasi Masyarakat yang Mendapatkan Layanan Penyiaran Digital	75% (196.565.321 dari 262.067.095 Orang)
3.	Meningkatnya Pemahaman, Kompetensi, dan Kemampuan SDM Nasional Bidang Digital	1. Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Literasi Bidang TIK	5.500.000 Orang
		2. Jumlah SDM yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi Bidang Digital	202.675 Peserta
4.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase (%) Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah	73%
5.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo berdasarkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80 (skala 1-100)

Program	Anggaran
1. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Rp. 4.192.046.149.000,-
2. Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik	Rp. 725.577.840.000,-
3. Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Rp. 14.693.014.536.000,-
4. Program Komunikasi Publik	Rp. 366.336.291.000,-
5. Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.801.112.960.800,-

Jakarta, 28 Januari 2022

Menteri Komunikasi dan Informatika,



Johnny G. Plate

## Lampiran 2. Hasil Reviu Laporan Kinerja oleh Inspektorat Jenderal



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta 10110 Telp./Faks. (021) 3865607 [www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id)

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

#### LAPORAN KINERJA

#### KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2023

PLT. Inspektur Jenderal



Ditandatangani secara elektronik  
PLT INSPEKTUR JENDERAL  
HARY BUDIARTO

## Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Pengelolaan Kinerja dan Risiko

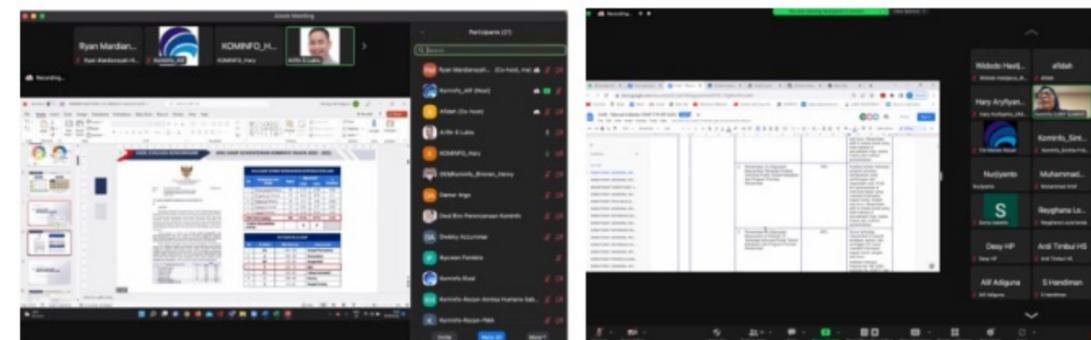


Foto: Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan pengelolaan kinerja



Foto: Keterlibatan Pimpinan (Menteri dan Eselon I) dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Kominfo



Foto: Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan pengelolaan risiko

## Tim Penyusun

**Pengarah**  
Johnny G. Plate

**Pembina**  
Mira Tayyiba

**Penanggung Jawab &  
Pimpinan Redaksi**  
Arifin Saleh Lubis

**Editor**  
Hary Aryfiyanto  
Sinthia Fridaningrum

**Penulis**  
Ryan Mardiansyah Hidayat  
Harsatya Alif Adiguna  
Reyghana Louisrianda  
Astri Nur Afidah

**Desain & Layout**  
Selaksa

©2023



KOMINFO

selaksa



Kementerian Komunikasi dan Informatika  
Republik Indonesia

Gedung Kominfo  
Medan Merdeka Barat No. 9  
Jakarta Pusat  
10110